LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
FIGHT
GAKKUM

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tim Penyusun

Ardi Risman, Novel Arief, Irene B. Batoarung, Achmad Reza Maulana, Adzani Fawzia, Endrasworo Wiryawan, Ghusnun Khairunnisa, Zinda Rahma Ilfana, Octa Dandy Saiyar

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK
Direktorat Pendegakan Hukum Pidana LHK
Direktorat Penyelesaian Sengketa LH
Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif LHK
BPPHLHK Wilayah Sumatera
BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
BPPHLHK Wilayah Kalimantan
BPPHLHK Wilayah Sulawesi
BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penegakan hukum mencerminkan martabat dan kewibawaan suatu bangsa, sehingga ketegasan dan keadilan merupakan nilai yang tak dapat dikompromikan. Seiring perkembangan proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) fokusnya kini lebih pada keadilan restoratif tanpa mengesampingkan aspek pidana. Implementasi penegakan hukum LHK yang tegas dan adil tidak hanya untuk menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk memulihkan dan mengganti kerugian terhadap lingkungan, ekosistem, masyarakat, dan negara.

Transformasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan saat ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat restoratif. Tujuannya adalah agar dampak dari kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan dapat diminimalisir, dan pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin.

497	Operasi TSL
785	Operasi Pembalakan
864	Operasi Perambahan Kawasan

Untuk memperkuat pendekatan penegakan hukum restoratif, beberapa elemen strategis perlu diimplementasikan. Pertama, penguatan upaya pencegahan melalui pengamanan yang terkoordinasi. Kedua, penerapan sanksi administratif, termasuk perintah pemulihan lingkungan dan denda. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui ganti rugi dan tindakan khusus atas perusakan dan pencemaran. Keempat, penegakan hukum pidana yang melibatkan tindakan perbaikan kualitas lingkungan. Kelima pendekatan penegakan hukum multidoor dan tindak pidana pencucian uang untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara.

Inovasi dan inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk penerapan kecerdasan buatan dan big data, pendekatan berbasis sains, denda administratif, serta langkah-langkah paksa seperti gizelling. Sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) telah menangani sejumlah pengaduan, menerapkan sanksi administratif, melakukan operasi pengamanan hutan, dan mengawasi ribuan perusahaan melalui perizinan. Selain itu, tindakan hukum perdata dan permasalahan penggunaan Kawasan hutan, telah menghasilkan pembayaran PNBP signifikan ke kas negara.

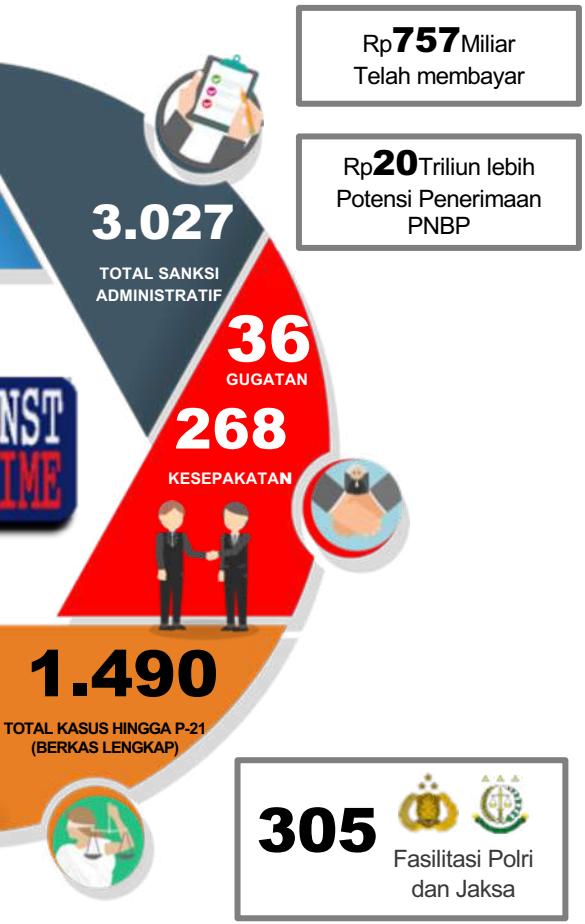

Ditjen Gakkum LHK juga aktif dalam menangani perkara pidana seperti Karhutla, perusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Instrumen-instrumen yang terus dikembangkan oleh Ditjen Gakkum LHK, baik melalui pendekatan di luar pengadilan maupun di dalamnya, bertujuan untuk memastikan terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan kelestarian hutan yang bermanfaat bagi Masyarakat dan negara.

Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan saat ini menjadi instrumen kunci dalam mencapai emisi karbon netral dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use - FOLU) Net Sink pada tahun 2030. Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan semua instrumen hukum guna menindaklanjuti pelanggaran yang dapat menghambat pencapaian FOLU Net Sink 2030.

Saat ini kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu instrumen yang berperan dalam pencapaian emisi karbon *neutral* dari sektor kehutanan serta penggunaan lahan lainnya atau *Forestry and other Land Use* (FOLU) *Net Sink* di tahun 2030. FOLU Net Sink 2030 ini menjadi agenda dan komitmen pemerintah yang akan diwujudkan dengan menggunakan seluruh instrumen hukum sehingga seluruh pelanggaran terlebih yang dapat menghambat pencapaian FOLU *Net Sink* 2030 akan ditindaklanjuti secara tegas.

Laporan Kinerja Ditjen Gakkum LHK tahun 2023 ini merupakan langkah awal dalam perencanaan mewujudkan agenda FOLU *Net Sink* 2030. Semoga Laporan Kinerja Ditjen Gakkum LHK Tahun 2023 ini dapat memberi dampak bagi kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia.

Jakarta, 23 Januari 2024

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani

IKHTISAR EKSEKUTIF

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ditjen Gakkum LHK merupakan bagian dari agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum lingkungan yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Oleh karena itu dalam agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang terkait langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disebutkan mengenai kebijakan terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan adalah peningkatan instrument penegakan hukum, peningkatan efektivitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Tekanan terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan seiring meningkatnya kompleksitas persoalan pelanggaran dan kejahatan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam, sebagai konsekuensi dari meningkatnya sektor perekonomian secara nasional maupun lokal serta belum berjalannya perbaikan tata kelola sumber daya alam secara optimal menghadapi berbagai tantangan – baik internal maupun eksternal – antara lain: dalam memperbaiki layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan, pengamanan kawasan hutan serta menurunkan tindakan pelanggaran hukum pidana. Kapasitas kelembagaan penegakan hukum baik di pusat maupun di daerah masih perlu ditingkatkan secara professional dan berkualitas untuk menangani kompleksitas kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2023 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2023, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pembentukan IKN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1173 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Kinerja Program sebagai berikut:

KINERJA PROGRAM

K-1
IKLH 69,48 Poin
Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan

K-2
IKLH 69,48 Poin
Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani

K-3
Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan 0,2 Juta Ha
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman

K-4
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 83 Poin
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum, capaian Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisa tugas dan fungsi maupun mandat regulasi yang ada, yaitu:

1. Pengelolaan pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi;
2. Penyelesaian sengketa lingkugan hidup;
3. Penegakan hukum pidana; dan
4. Pencegahan dan pengamanan hutan.

Namun demikian disadari ada beberapa capaian yang bersifat pendukung misalnya berbagai langkah kebijakan yang dilakukan untuk memperkuat keempat kelompok capaian di atas sebagai fungsi Dukungan Manajemen.

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023 merupakan sebuah capaian yang diraih dengan sete;ah melalui proses adaptif penanganan penegakan hukum dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi, dimana dalam pelaksanaanya Ditjen PHLHK melakukan penguatan kapasitas SDM dan peningkatan sistem informasi dalam pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dana PNBP sehingga Ditjen Gakkum LHK terus berkembang menjadi instansi utama dalam penegakan hukum khususnya terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2023 Capaian Sasaran Program Ditjen Gakkum LHK dapat melampaui target dengan capaian Indikator Kinerja Progran sebagai berikut:

CAPAIAN IKP-1

Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

94%

Target : 51%
Realisasi : 48%

Jumlah Luas Hutan yang Diamankan Dari Gangguan dan Ancaman

Target : 300.000 Ha
Realisasi : 862.321 Ha

120%

CAPAIAN IKP-3

CAPAIAN IKP-2

Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani

120%

Target (revisi) : 474 Perkara
Realisasi : 580 Perkara

Nilai SAKIP Ditjen PHLHK

Target : 78
Realisasi : 77,4

99,2%

CAPAIAN IKP-4

KALEIDOSKOP TAHUN 2023

JANUARI

- HUT SPORC
- Laporan Kinerja Ditjen Gakkum LHK Tahun 2022
- Pengarusutamaan Gender: Pasar Ide Gender dari Generasi Muda

MARET

- Konferensi pers Gakkum LHK tangkap perusak Kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Mangkol, Bangka Belitung

MEI

- Konferensi pers Bentuk tim gabungan, dengan PPATK, Gakkum KLHK perkuat penyidikan TPPU
- Konferensi pers Gakkum KLHK dan Bea Cukai gagalkan penyelundupan 360kg sisik trenggiling di Banjarmasin

FEBRUARI

- Kunjungan sekolah alam Indonesia Jakarta
- Kunjungan mahasiswa FH UGM
- Konferensi pers WNA Vietnam tersangka penyelundupan satwa diindungi segera disidangkan
- Konferensi pers Direktur dihukum penjara 5 tahun dan denda Rp2,5Milyar oleh PN Makassar secara In Absentia terkait kayu illegal
- Pelatihan dasar OSINT dari Kepolisian

APRIL

- Konferensi pers Dalami penyidikan: KLHK tindak pemodal tambang timah illegal di Manggar, Belitung Timur

JUNI

- Konferensi pers Bongkar sindikat perdagangan sataw illegal di Kalbar, Gakkum KLHK dan tim gabungan tangkap 3 orang tersangka dan sita 57kg sisik trenggiling

JULI

- Pilot training Polhut
- Sosialisasi tindak pidana LHK

SEPTEMBER

- Penanaman bersama di UIII
- Siaran pers Hentikan karhutla, Gakkum KLHK segel lokasi karhutla di 4 perusahaan di Kalbar

NOVEMBER

- Penghargaan di bidang kearsipan
- Peningkatan kapasitas bekerja sama dengan Kejaksaan Agung

AGUSTUS

- Forum ahli
- Operasi gabungan TN Gunung Gede Pangrango
- Peningkatan kapasitas PPNS
- Pembentukan satgas polusi udara

OKTOBER

- Pelaksanaan AALCO
- Kuliah umum Green PIL
- Siaran pers Akibat Karhutla, Dirjen Gakkum KLHK segel langsung karhutla PT SA perusahaan Singapura
- Diklat Polhut

DESEMBER

- Gakkum Festival
- Refleksi akhir tahun
- Hut Polhut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
KALEIDOSKOP TAHUN 2023
DAFTAR ISI

1

PENDAHULUAN ... 1

LATAR BELAKANG ... 2
TUGAS FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI ... 9
SUMBERDAYA ORGANISASI ... 12
MANDAT & PERAN ORGANISASI ... 23

2

PERENCANAAN KINERJA ... 26

VISI, MISI, PRIORITAS NASIONAL ... 27
RENCANA STRATEGIS 2020-2024 ... 33
RENCANA KERJA 2023 ... 37
PERJANJIAN KINERJA 2023 ... 40
POHON KINERJA ... 41
PENGUKURAN KINERJA ... 43

3

AKUNTABILITAS KINERJA ... 47

KERJA PENEGAKAN HUKUM LHK ... 48
CAPAIAN DAN EVALUASI ANGGARAN ... 67
KINERJA LAINNYA ... 71
DATA TEMATIK GAKKUM LHK ... 97

4

PENUTUP ... 107

PENUTUP ... 108
REKOMENDASI ... 109

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang juga disertai ancaman dan gangguan terhadapnya menyebabkan isu kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi perhatian global. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks bahkan melibatkan lebih dari dua negara menjadikan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan perlu semakin diperkuat.

Ditjen Penegakan Hukum LHK sebagai pelaksana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Beberapa pendekatan instrumen hukum yang dimiliki Ditjen Gakkum LHK antara lain pengawasan perijinan, pencegahan dan pengamanan LHK, sanksi administratif, dan gugatan kerusakan lingkungan hidup dan tuntutan pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Ditjen Gakkum LHK kepada publik, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKJ) Ditjen Gakkum LHK dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta SK MenLHK Nomor 975 Tahun 2023.

Potensi Permasalahan

Kejahatan lingkungan memiliki definisi yang multitafsir dan perlu pemahaman lebih. Kejahatan lingkungan dapat didefinisikan sebagai tindakan perampasan atas sumber daya yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh kekuatan modal, politik, dan kekuatan dalam suatu badan usaha/pemerintahan yang menimbulkan dan mengakibatkan pengerusakan atau pemusnahan secara terus menerus atas lingkungan hidup dan sumber daya lain serta ancaman terhadap gangguan hidup manusia.

Luasnya cakupan kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*) maupun kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Sebagai contoh perdagangan satwa liar yang turut memindahkan satwa dari suatu daerah ke daerah lain bahkan melintasi batas negara. Tipikal kejahatan tersebut membutuhkan jaringan yang Menghubungkan pembeli dengan penjual secara global. Secara umum kejahatan transnasional dan terorganisasi di bidang lingkungan turut menyertakan kejahatan lainnya seperti penggelapan, korupsi, penipuan, penghindaran pajak, hingga pencucian uang, yang terjadi melalui transaksi yang kompleks tanpa memandang batas-batas geografis negara. Aktivitas ilegal ini tidak hanya berdampak pada perusakan lingkungan tetapi juga mengakibatkan kerugian pendapatan negara, beban negara untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan menurunnya kepercayaan publik dan wibawa negara.

Potensi Permasalahan

Persentase Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2023 per Tipologi Kasus

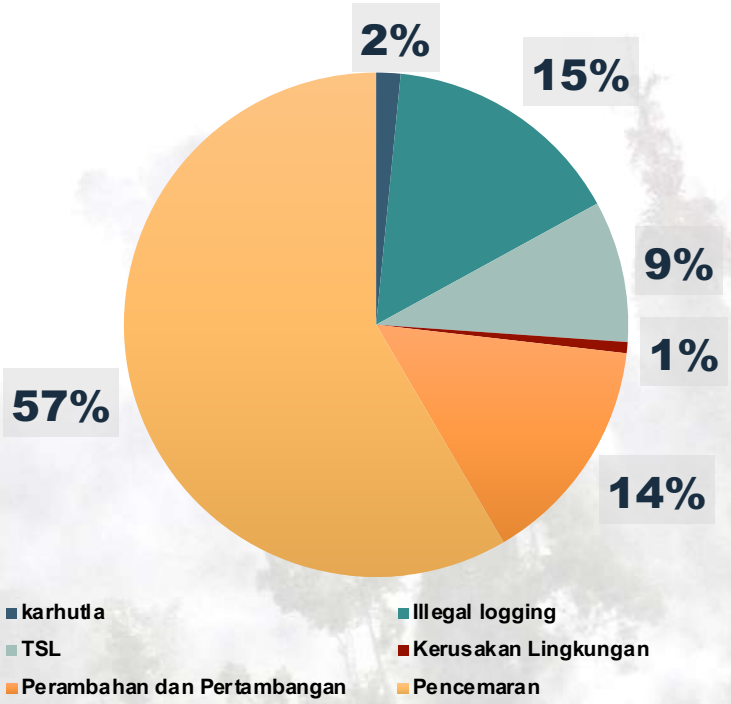

Dinamika kejahatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sejak berdirinya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, dapat dikatagorikan berdasarkan beberapa tipologi, antara lain permasalahan kebakaran hutan dan lahan sebesar 2%, illegal loging sebesar 15%, kasus peredaran TSL sebesar 9%, kerusakan lingkungan sebesar 1%, perambahan dan pertambangan sebesar 14% dan pencemaran lingkungan 57%.

Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2023

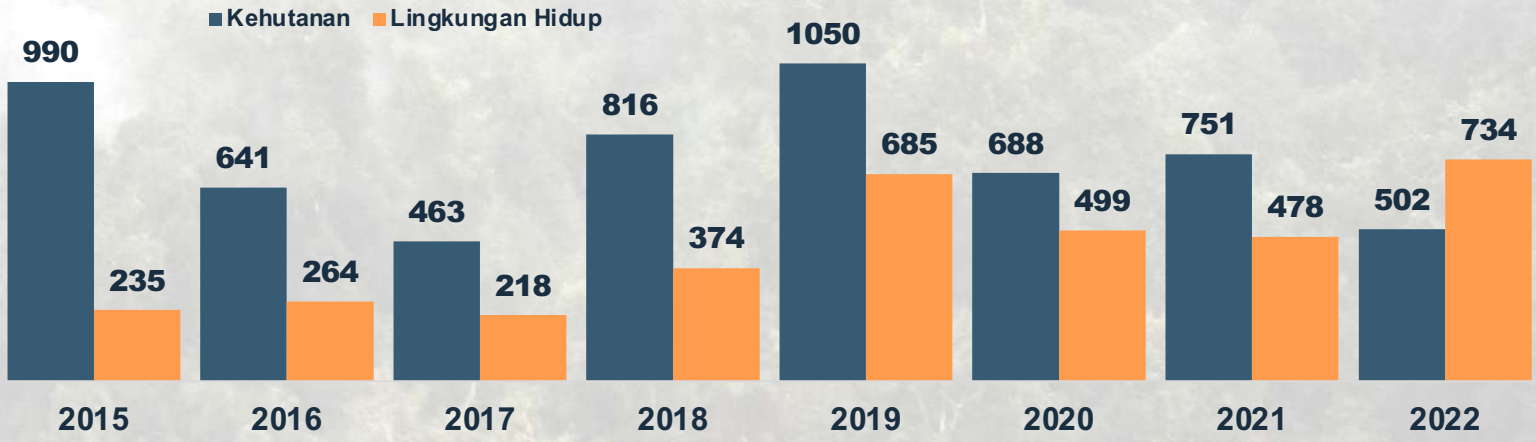

Isu Strategis

Ditjen Gakkum LHK memiliki basis yang kuat untuk perancangan strategi organisasi ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen Gakkum LHK tengah menghadapi beberapa isu yang menjadi prioritas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pertama, terkait dengan tingginya angka kerugian dan dampak lingkungan hidup akibat pelanggaran dan kejahatan lingkungan yang berefek domino terhadap sulitnya eksekusi atas perkara hukum terkait. Pada kasus kebakaran hutan, misalnya. Derita yang langsung dirasakan, jika dikonversikan jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah, termasuk kehilangan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia.

Kedua, tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan harus diakui termasuk *extraordinary crime*. Luasnya cakupan kejahatan lingkungan dan kehutanan membuatnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan baik trans-nasional maupun terorganisir. Sebagai contoh adalah perdagangan satwa liar yang melintasi batas negara. Tipikal kejahatan tersebut bukan hanya memiliki jaringan internasional, tetapi juga turut menyertakan kejahatan lainnya seperti korupsi, penggelapan, pencucian uang hingga penghindaran pajak melalui transaksi yang rumit tanpa memandang batas geografis suatu negara. Di Indonesia, kasus – kasus kejahatan lingkungan yang terorganisir hampir terjadi di segala isu dengan pelaku intelektual yang sulit disentuh. Pelaku yang dipidana biasanya hanyalah pelaku lapangan. Oleh sebab itu, jaringan kerja sama Ditjen Gakkum LHK terhadap institusi dan organisasi lain, baik nasional maupun internasional haruslah sangat solid dan bersinergi agar dapat menuntaskan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan secara holistik.

Ketiga, kesenjangan antara penegakan hukum di pusat dan daerah, sehingga penguatan sistem dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegritas, konsisten dan terpadu sangat diperlukan. Hal ini juga lantas memengaruhi kepercayaan publik yang akhirnya memilih untuk melakukan pengaduan terpusat kepada Kementerian LHK alih – alih kepada pemerintah daerahnya.

Keempat, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2022, Indonesia telah mulai melangkah dalam operasionalisasi

Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) *Net Sink* 2030, yang dapat didefinisikan menjadi berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan guna menyerap karbon yang lebih optimal dari pelepasan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang konsisten dan intensif untuk mencegah deforestasi, degradasi kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perusakan mangrove dan perusakan lahan gambut baik untuk kegiatan yang berizin melalui pengawasan maupun yang ilegal melalui operasi pengamanan.

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan maka diterapkan tiga instrumen penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. Terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran juga dikenai pemberatan sanksi baik berupa pidana tambahan maupun pengenaan denda administratif sebagaimana yang tercantum dalam UUCK.

Kelima, dalam rangka pelaksanaan *Major Projects* Ibu Kota Negara (IKN), tidak terlepas dari kontribusi Ditjen PHLHK khususnya pada kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan melalui kegiatan operasi pengamanan hutan, pencegahan tindak pidana kehutanan melalui pengumpulan data dan informasi, dan kegiatan intelijen. Sedangkan pada kegiatan pengawasan perusahaan, di tahun 2023 Ditjen PHLHK telah melakukan pengawasan terhadap 598 perusahaan.

Strategi *Law Enforcement* dalam FoLU *Net Sink* 2030

1

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

a. Pencegahan Deforestrasi dan Degradasi, Gangguan Pengamanan Hutan Hutan Alam dan Mangrove;
b. Penanggulangan Deforestrasi dan Degradasi, Gangguan Pengamanan Hutan Hutan Alam dan Mangrove;
c. Penegakan Hukum yang tegas (yustisi) bagi Pelaku Perambahan, Illegal Logging, Pertambangan tanpa izin, Pembakaran Hutan dan Lahan, Perusakan Mangrove dan Ekosistem Gambut.

2

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

Pengawasan Penataan Perizinan LHK:
- Pencegahan Karhutla;
- Mitigasi deforestasi dan degradasi lahan mineral;
- Pengelolaan ekosistem gambut;
- Pengawasan terhadap HTI dan Perkebunan yang memiliki HGU di lokasi dengan nilai IPL tinggi;
- Penerapan Sanksi Administrasi;
- Ganti Kerugian Lingkungan;
- Penegakan Hukum Pidana.

3

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

a. Pembentukan paralegal
b. Pembinaan paralegal

Tantangan

Setelah 8 (delapan) tahun Ditjen Gakkum LHK terbentuk, beberapa tantangan dikelompokkan menjadi tantangan internal dan tantangan eksternal. Secara internal, tantangan yang banyak dihadapi antara lain terkait sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi baik antar lembaga penegak hukum dan pemerintahan di pusat maupun di daerah, anggaran, sarana prasarana, sistem dan teknologi informasi serta jaringan intelijen yang mampu mendeteksi dini adanya pelanggaran.

Per 31 Desember 2023, jumlah SDM Ditjen Gakkum LHK sebanyak 1.334 orang yang tersebar di 10 (sepuluh) unit kerja dan terdiri dari beberapa macam jabatan. Untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan pelatihan rutin untuk dalam rangka *skill improvement.* Ditjen Gakkum LHK juga terus mengoptimalkan kerja sama dan peran instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain permasalahan sumber daya manusia, penting pula diperhatikan faktor integritas sumber daya manusia. Integritas sumber daya manusia berkaitan dengan penerapan aturan perilaku dan kode etik, penghargaan dan hukuman (*reward and punishment)* yang harus terus dijaga.

Sarana dan prasarana DitjenGakkum LHK selama ini sudah cukup memadai, namun kebutuhan sarana prasarana yang mutakhir dirasakan mendesak mengingat perkembangan yang akan dihadapi Ditjen Gakkum LHK di tahun-tahun yang akan datang. Sarana dan prasarana harus dibedakan antara wilayah dan tempat penanganan perkara yang biayanya dapat bervariasi tergantung pada karakteristik kasus dan kondisi lapangan.

Pengembangan sistem intelijen diperlukan agar operasi pencegahan dan pengamanan hutan yang dilakukan dapat tepat sasaran, perlu didukung dengan kegiatan intelijen yang kuat sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk menentukan strategi yang tepat.

Tantangan

Pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki karakteristik lintas batas negara, berdampak luas, multiaktor, terorganisasi dan terkait dengan tindak pidana lain. Pelanggaran tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dapat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat luas.

Pada tingkat tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran laut dapat bersifat lintas negara, selain lintas batas wilayah administratif dalam satu negara. Dalam kasus tertentu, pelanggaran sulit ter-deteksi apabila terjadi pembuangan limbah di tengah laut yang berasal dari sumber bergerak di laut. Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di darat (*terrestrial*) namun juga banyak yang terjadi di kawasan perairan (*marine*) seperti pencemaran laut (baik dari sumber di darat maupun sumber di laut). Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Upaya pelanggaran dilakukan secara terorganisasi dan tidakn terlepas dari kegiatan usaha, namun dalam suatu mafia tertentu yang tidak dapat diketahui secara terang-terangan.

01 PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LHK
- Rasio Polhut dengan luas Kawasan yang diamankan belum sebanding
- Komitmen Pemangku Kawasan dan Pemerintah Daerah
- Sinergitas antar penegak hukum belum terbangun sampai ke tingkat tapak

02 PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI
- Kuantitas dan Kualitas PPLH yang terbatas
- Rendahnya komitmen daerah untuk pengawasan dan Pemberian Sanksi
- Kurangnya pembebanan kewajiban pencegahan dalam persyaratan perizinan
- Perlawanan Hukum Melalui Gugatan TUN terhadap Sanksi Administrasi

03 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
- Terbatasnya ahli yang bersedia memberi keterangan di persidangan
- Pemahaman Hakim dalam penerapan *Strict Liability* dan Komitmen ketua PN dalam eksekusi
- Perlawanan hukum melalui gugatan balik, gugatan perlawanan, gugatan perlawanan pihak ketiga
- Penolakan pelaksanaan eksekusi oleh termohon eksekusi

04 PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK
- Perlawanan melalui gugatan praperadilan, gugatan perdata, pengaduan, perlindungan hukum, mangkir dari panggilan, melarikan diri/menghilang,
- Keterbatasan waktu penyidikan 90 hari UU 18 Tahun 2013
- Komitmen Penyidik Kementerian otoritas rendah
- Terbatasnya ahli dalam memberi keterangan di persidangan
- Kualitas dan kuantitas penyidik yang terbatas

B. TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK memiliki tugas **"menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum LHK"**. Ditjen Gakkum LHK berdasarkan peraturan Menteri LHK RI tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. **Perumusan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
2. **Pelaksanaan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;

3. **Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
4. **Koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
5. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
6. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
7. **Pelaksanaan tugas administrasi** Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK; dan
8. **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktur Jenderal Gakkum LHK
Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Com., MPM.

Sekretaris Direktorat Jenderal Gakkum LHK
Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., MBA.

Ardyanto Nugroho, S.Hut., MM.
Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK

Yazid Nurhuda, S.H., M.A.
Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si.
Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H.
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Ditjen Gakkum LHK per 31 Desember 2023 sebanyak 1.331 pegawai yang tersebar dalam lima Unit Kerja Eselon II dan 5 Unit Pelaksana Teknis. Dari sepuluh Unit Kerja yang berada pada Ditjen Gakkum LHK, Balai PPHLHK Sumatera memiliki jumlah ASN terbanyak yaitu sebesar 243 orang, dan Direktorat PSLH memiliki jumlah paling sedikit yaitu 48 orang. Jumlah ASN Ditjen PHLHK sebesar 76,39%. berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 1.016 orang, dan 23,61% sisanya berjenis kelamin perempuan atau sebanyak 315 orang.

Dari keseluruhan jumlah pegawai Ditjen Gakkum LHK masih terdapat ketimpangan antara kedua jenis kelamin. Namun, dalam proses perekrutan pegawainya, Ditjen Gakkum LHK selalu memperhatikan kesetaraan gender.

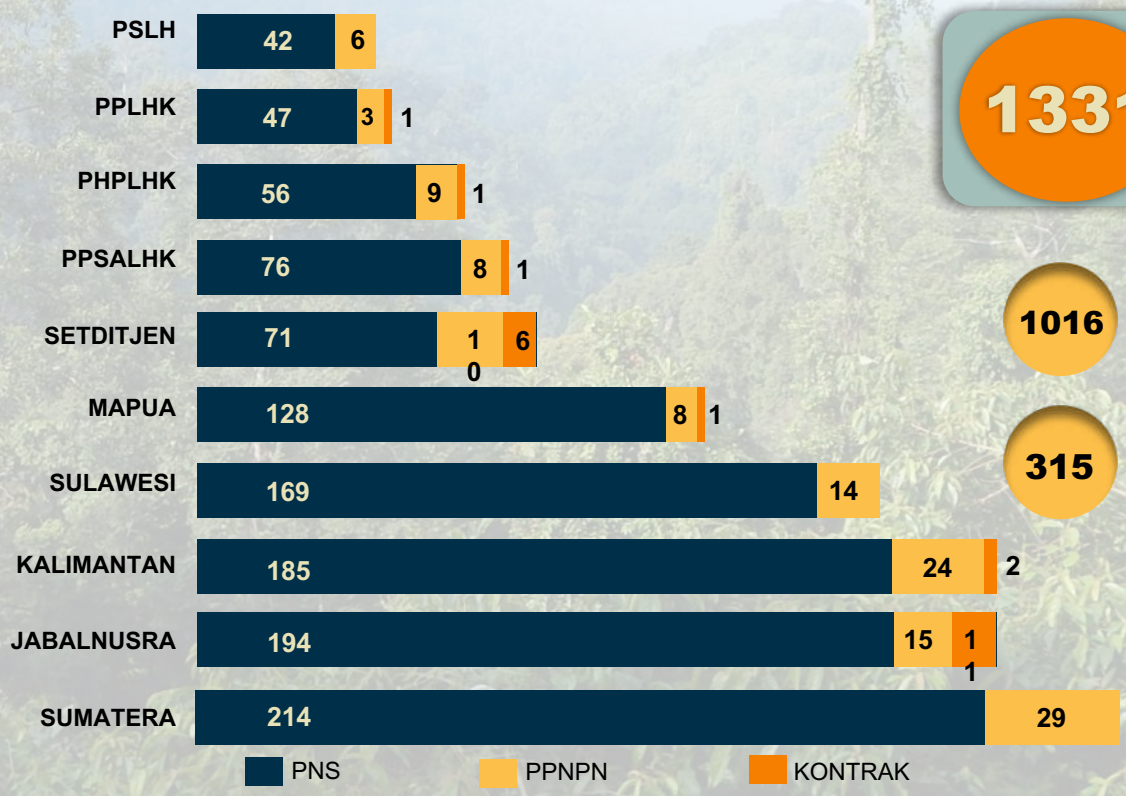

Sumber Daya Manusia

Adanya pembaruan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk sebagai langkah perampingan organisasi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, menjadikan adanya perubahan / alih fungsi Eselon IV menjadi jabatan fungsional. Sehingga mengubah komposisi ASN jika dipilah berdasarkan jabatan. Saat ini jabatan yang paling banyak berada di Ditjen Gakkum LHK yaitu jabatan fungsional sebesar 86,29% atau sebanyak 1.020 orang ASN, selanjutnya jabatan pelaksana sebesar 9,81% atau sebanyak 116 orang ASN dan jabatan struktural sebesar 3,89% atau sebanyak 46 orang ASN.

Jumlah jabatan fungsional yang diampu oleh Ditjen Gakkum LHK sebanyak 16 jabatan. Jabatan fungsional yang diampu ini terdiri dari jabatan fungsional binaan KLHK maupun di luar binaan KLHK. Rincian jabatan fungsional yang ada antara lain, Pengawas Lingkungan Hidup, Polisi Kehutanan, Pengendali Dampak Lingkungan. Perencana, Analis Kebijakan, Analis SDM Aparatur, Analis Hukum, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Penerjemah, Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pranata Humas, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, Pranata SDM Aparatur dan Penata Laksana Barang.

Berdasarkan golongan, ASN terbanyak yaitu Golongan III atau sebesar 74,76% atau sebanyak 856 orang ASN, selanjutnya Golongan II sebesar 13,19% atau sebanyak 151 orang ASN dan Golongan IV sebesar 12,05% atau sebanyak 138 orang ASN.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, diketahui bahwa ASN Ditjen Gakkum LHK paling banyak dari lulusan sarjana (S1) sebanyak 606 orang ASN (51,27%). Latar belakang pendidikan terbanyak selanjutnya adalah SMA sebanyak 349 orang ASN (29,53%), magister/S2 sebanyak 121 orang ASN (10,24%) dan D-III sebanyak 101 orang ASN (8,54%). Hingga tahun 2023 hanya ada 5 orang ASN lingkup Ditjen Gakkum LHK yang memiliki pendidikan S3 (0,42%)

ASN Ditjen Gakkum LHK berdasarkan Jabatan

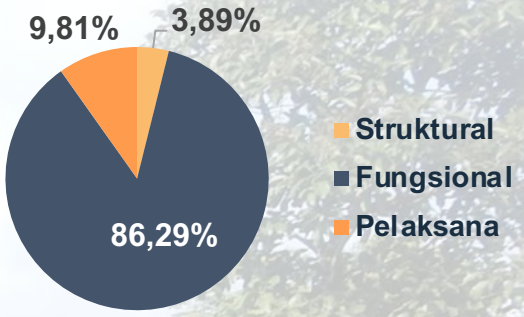

ASN Ditjen Gakkum LHK berdasarkan Golongan

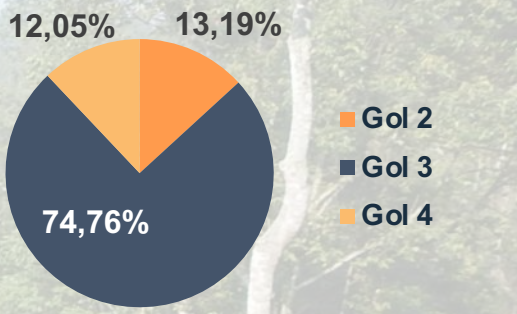

ASN Ditjen Gakkum LHK berdasarkan Tingkat Pendidikan

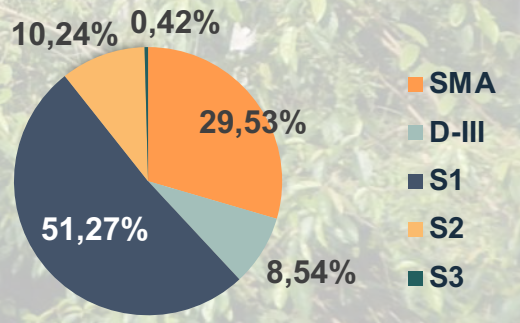

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kelas usia, Ditjen Gakkum LHK didominasi oleh angkatan kerja usia 41 – 50 tahun sebesar 30,03% atau sebanyak 355 orang ASN. Selanjutnya kelas usia 31 – 40 tahun sebesar 24,70% atau 292 ASN, kelas usia < 30 tahun sebesar 23,94% atau sebanyak 283 orang ASN, kelas usia > 50 tahun sebesar 21,32% atau sebanyak 252 orang ASN. Berdasarkan bentuk piramida usia ASN Ditjen Gakkum LHK memiliki bentuk stasioner, jumlah ASN Ditjen Gakkum LHK > 50 tahun merupakan kelompok yang mendekati usia pensiun sehingga kelompok ini harus menjadi pertimbangan dalam penataan ASN maupun rencana perekrutan di tahun-tahun selanjutnya.

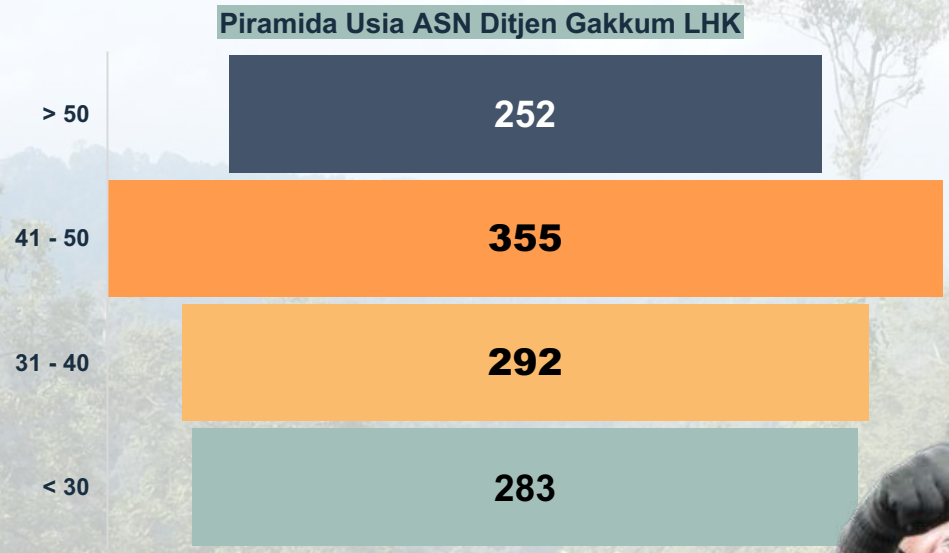

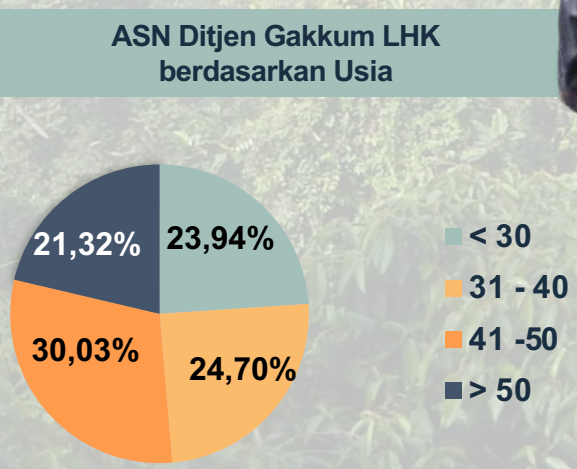

Sumber Daya Manusia

Sebaran SDM Ditjen Gakkum LHK

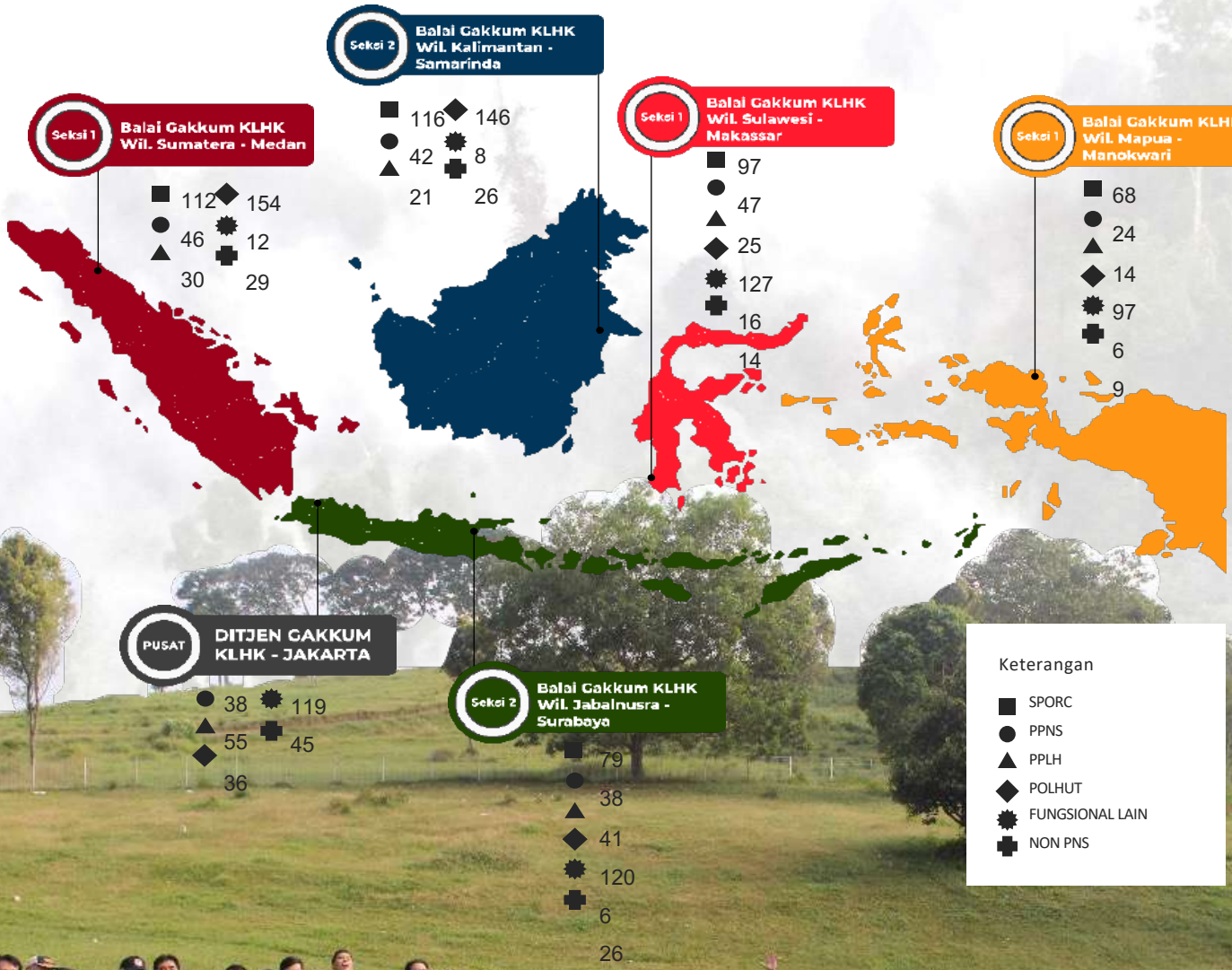

Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki oleh Ditjen Gakkum LHK didominasi oleh Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) dengan jumlah 680 orang. Disusul dengan SDM dengan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dengan jumlah 472 orang. Selain itu, terdapat 235 orang Penyidik PNS (PPNS) serta 167 orang ASN yang memiliki jabatan fungsional lainnya.

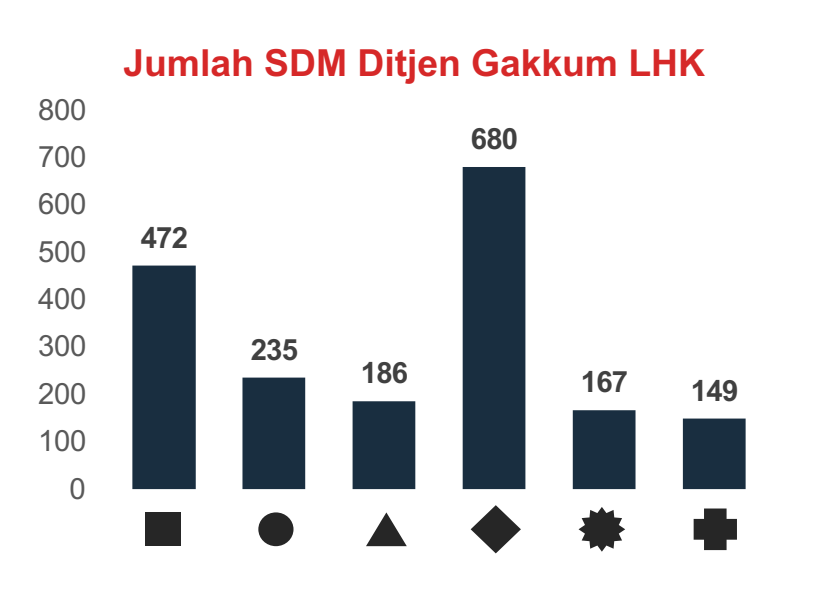

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan Ditjen Gakkum LHK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya meliputi barang bergerak, antara lain perangkat perkantoran dan barang milik negara lainnya.

1.119
Laptop

22
Mobil Pengawas

177
GPS

2.279
Senjata Api

131
Mobil Patrol/Intelijen

330
Sepeda Motor

6
Mobil Tahanan

141
Kamera Udara

Sarana dan Prasarana

ANGGARAN 2015-2023
DITJEN GAKKUM LHK

2023
P : 495,7 M
R : 488,4 M
98,53%

2022
P : 290,3 M
R : 288,9 M
99,53%

2021
P : 294,4 M
R : 293,6 M
99,70%

2020
P : 313,6 M
R : 310,9 M
99,10%

2015
P : 278,9 M
R : 219,6 M
76,70%

Keterangan:
P = Pagu
R = Realisasi

Kinerja Ditjen Gakkum LHK didukung dengan Dukungan Anggaran yang memadai dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2023, Ditjen Gakkum LHK mendapatkan anggaran sejumlah Rp495,7M. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah anggaran di tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2022, dengan jumlah anggaran Rp290,3M. Jumlah anggaran Ditjen Gakkum LHK di Tahun 2023 tersebut merupakan jumlah anggaran tertinggi yang pernah didapatkan oleh Ditjen Gakkum LHk dibandingkan dengan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

2016
P : 206,5 M
R : 202,7 M
98,90%

2017
P : 218,8 M
R : 212,0 M
96,90%

2018
P : 372,6 M
R : 357,4 M
95,90%

2019
P : 450,6 M
R : 444,8 M
98,70%

Jumlah tersebut diikuti dengan pencapaian realisasi anggaran Ditjen Gakkum LHK yang tinggi, dengan nilai sejumlah Rp488,4M (persentase 98,53%). Realisasi ini menunjukkan bahwa Ditjen Gakkum LHK mampu mempertahankan persentase realisasi anggaran pada nilai >95,00% selama 9 tahun berturut-turut sejak tahun 2023.

Dengan adanya dukungan tersebut, Ditjen Gakkum LHK mampu mengerjakan tugas dan fungsinya untuk melakukan penegakan hukum LHK secara optimal dan terus meningkatkan kuantitas serta kualitas kinerja penegakan hukum LHK untuk mencapai visi dan misi Ditjen Gakkum LHK.

PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Ditjen Gakkum LHK mendapatkan anggaran sebesar Rp 354.211.103.000 sesuai Pagu Alokasi Anggaran KLHK TA 2023. Dari jumlah tersebut, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* I sebesar Rp21.697.366.000 dengan jumlah pagu tetap.

Selama TA 2023, Ditjen Gakkum LHK mengalami penyesuaian pagu anggaran sebanyak 3 (tiga) kali, yang terjadi karena adanya *Top Up* PNBP, Pengembalian Blokir Belanja Pegawai dan Pengembalian Blokir Belanja Non Pegawai.

2

AUTOMATIC ADJUSTMENT I

Rp21.697.366.000 (PAGU TETAP)

Memo Menteri LHK M.41/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tanggal 16 Desember 2022

1

PAGU ALOKASI ANGGARAN KLHK TA 2023

Rp354.211.103.000

Memo Menteri LHK M.38/MENLHK/SETJEN/REN.0/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022

Perubahan pagu anggaran yang pertama terjadi karena adanya *Top Up* PNBP sebesar Rp163.241.510.000 pada bulan Mei 2023. Dengan adanya penambahan tersebut, pagu anggaran Ditjen Gakkum LHK berubah menjadi sebesar Rp517.452.613.000.

Selanjutnya, terdapat Realokasi AA Belanja Pegawai sebesar Rp6.354.222.000 di bulan Juli 2023, sehingga pagu anggaran Ditjen Gakkum LHK berubah menjadi sebesar Rp511.098.391.000. Realokasi AA kembali terjadi untuk Belanja Non Pegawai sebesar Rp15.343.144.000, sehingga pagu anggaran Ditjen Gakkum LHK berubah menjadi sebesar Rp495.755.247.000 dan bertahan pada angka yang sama hingga akhir tahun 2023.

3

TOP UP PNBP

Rp517.452.613.000

Surat Menteri LHK Nomor S.507/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/5/2023 tanggal 17 Mei 2023

4

REALOKASI AA BELANJA PEGAWAI

Rp511.098.391.000

Surat Menteri LHK Nomor S.701/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023

5

REALOKASI AA BELANJA NON PEGAWAI

Rp495.755.247.000

Surat Menteri LHK Nomor S.1111/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023

D. MANDAT & PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Ditjen Gakkum LHK adalah bagian integral dari KLHK. Organisasi ini memiliki mandate dan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum.

1. Mandat
   Ditjen Gakkum LHK memiliki mandate untuk menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mandat tersebut mencakup pengawasan, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Peran Strategis
   a. Penegakan hukum → Ditjen Gakkum LHK bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan lingkungan hidup dan kehutanan. Ini mencakup penanganan kasus illegal logging, perburuan satwa yang dilindungi, pencemaran lingkungan, pelanggaran izin lingkungan dan pelanggaran lainnya.
   b. Pencegahan pelanggaran → Ditjen Gakkum LHK memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan dan strategi pencegahan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dapat melibatkan penyuluhan, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat serta perusahaan terkait pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kehutanan, serta ketaatan terhadap izin lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan.
   c. Kerjasama dan koordinasi → Ditjen Gakkum LHK bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah lainnya (*transboundary*), dewan legislative, lembaga yudikatif, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta untuk tujuan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
   d. Monitoring dan evaluasi → Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memastikan hukum lingkungan ditegakkan.
   e. Penyidikan dan penuntutan → Menjalankan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum yang merugikan lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini mencakup kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya.
   f. Manajemen data dan informasi --> Mengelola data dan informasi terkait pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan

g. Advokasi kebijakan → Berperan sebagai advokat kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat nasional maupun internasional untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan secara holistik.

Dengan melaksanakan mandat dan peran strategis ini, Ditjen Gakkum LHK menjadi garda terdepan di Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan, serta menegakkan hukum demi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam

TRANSFORMASI DITJEN GAKKUM LHK

Sejak tahun 2015, Ditjen Gakkum LHK telah mengimplementasikan sejumlah program reformasi dan transformasi untuk memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ditjen Gakkum LHK menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Tantangan tersebut termasuk meningkatnya tingkat deforestasi, perburuan liar, illegal logging, globalisasi perdagangan hutan, pencemaran, sengketa lingkungan, kapasitas dan sarana prasarana aparat, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat.

PROGRAM REFORMASI 2015 - 2020

TRANSFORMASI 2020 - SEKARANG

- PENGUATAN KERANGKA HUKUM
- OPTIMASI TEKNOLOGI CANGGIH
- PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
- PENGUATAN JEJARING INTERNASIONAL

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai bentuk penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis suatu instansi atau lembaga. Perencanaan kinerja merupakan titik awal yang bisa digunakan oleh pimpinan suatu instansi untuk memulai proses kinerja (Simanjuntak 2005). Hendi *et al*. (2019) menyatakan bahwa perencanaan kinerja adalah tahap awal dari siklus manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait serta membentuk siklus yang terus berlanjut. Manajemen kinerja menurut Cho dan Lee (2012) terdiri dari proses identifikasi dan perumusan tujuan kinerja secara jelas dan terukur, pengukuran kinerja guna memantau progres pencapaian tujuan, penyediaan umpan balik pada hasil kinerja, dan pemanfaatan penilaian kinerja pada pengambilan keputusan sebagian besar manajemen personalia seperti penghargaan dan akuntabilitas.

Perencanaan kinerja merupakan proses awal dari manajemen kinerja yang bertujuan untuk merencanakan tujuan yang diharapkan di masa mendatang serta menyusun seluruh sumberdaya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Nursam 2017). As'ad (2018) menyampaikan bahwa perencanaan kinerja adalah proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sistematis berarti teratur dan logis berarti masuk akal sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Dokumen wujud tahapan perencanaan kinerja yang dilakukan pada lingkup Ditjen Gakkum LHK terdiri dari 3 buah dokumen yakni: Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Seluruh kegiatan Ditjen Gakkum LHK pada Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024 Ditjen Gakkum LHK (revisi), Rencana Kerja Ditjen Gakkum LHK Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Ditjen Gakkum LHK Tahun 2023.

Dokumen Perencanaan Ditjen Gakkum LHK Tahun 2023

Visi dan Misi

Visi

> **Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Berkualitas dan Berkeadilan demi Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Misi

1

Penegakan hukum LHK yang efektif melalui SDM yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif, serta berkesetaraan gender

2

Penegakan hukum LHK **berbasiskan sains dan teknologi** yang mengedepankan norma dan budaya hukum

3

Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrumen, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas SDM, serta dukungan pengambilan keputusan

4

Penegakan hukum LHK yang **konsisten, bermartabat, dan terpercaya**

Ditjen Gakkum LHK berperan mendukung pencapaian sasaran tema RKP Tahun 2022 yang akan diwujudkan pada **Prioritas Nasional 6 (PN 6)** dalam rangka ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*** yaitu pada **Program Prioritas 1 yakni "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup"** pada **Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**. Ditjen Gakkum LHK pada Tahun 2023 mendukung 2 dari 3 poin pencapaian Sasaran Pembangunan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) berupa:

(1) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;

(2) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

(3) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

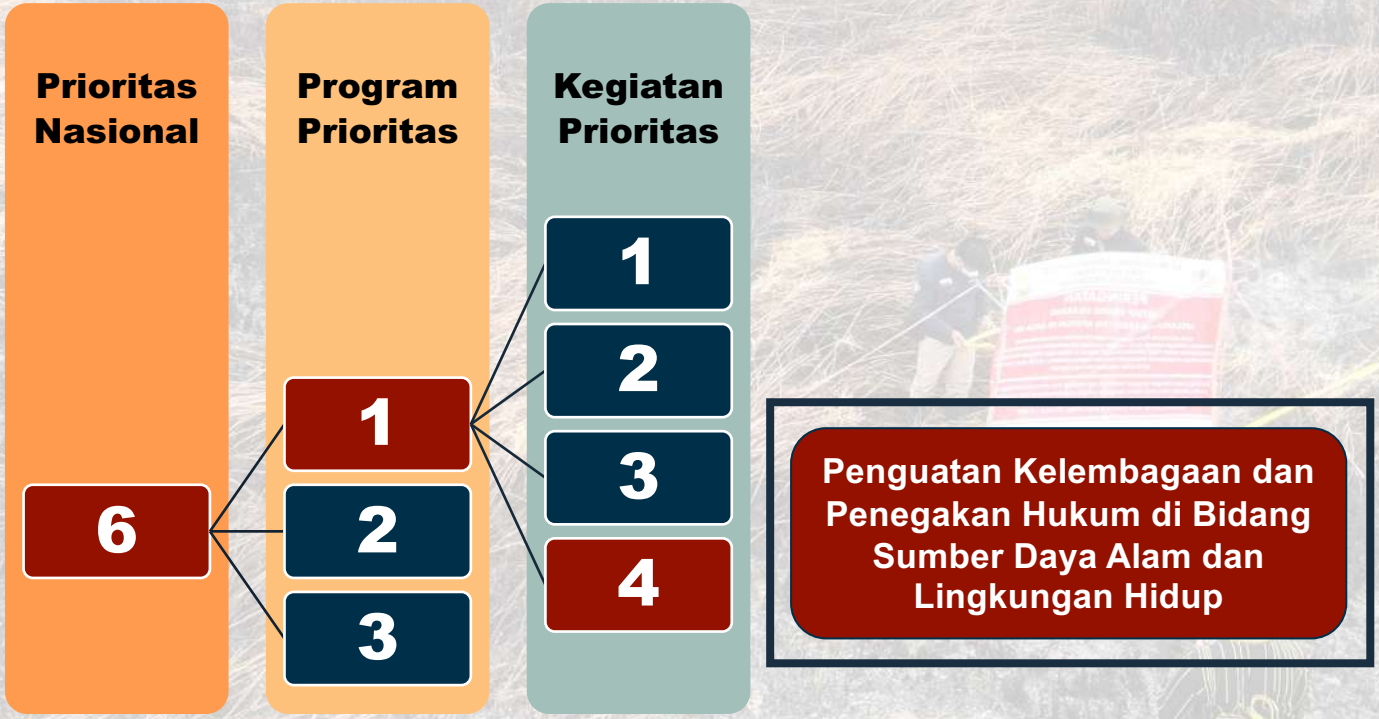

Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL

PN.1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PN.2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN.3
Meningkatkan Sumber Daya Manuasia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN.4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN.5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN.6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PN.7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PRIORITAS

PP.1
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PP.2
Peningkatan Ketahanan Bencana Iklim

PP.3
Pembangunan Rendah Karbon

KEGIATAN PRIORITAS

KP.1
Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

KP.2
Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

KP.3
Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

KP.4
Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

Proyek Prioritas Nasional 2023

Pro-PN	Rincian Output	Target Semula	Anggaran Semula	Target Menjadi	Anggaran Menjadi
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan					
02 – Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan SDA dan LH	001 – Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51 Operasi	1	73 Operasi	1
	002 – Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	25 Operasi	1	28 Operasi	1
Program: Kualitas Lingkungan Hidup					
02 – Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan SDA dan LH	001 – Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	750 Perusahaan	1	1045 Perusahaan	1
	002 – Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	50 Badan Usaha	1	50 Badan Usaha	1
03 – Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LHK	001 – Kasus Tindak Pidana LHK P21	160 Perkara	1	160 Perkara	1
	002 – Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60 Perkara	1	250 Perkara	1
	001 – Penanganan Sengketa LH	30 Perkara	1	64 Perkara	1
Total Anggaran Prioritas Nasional 2023			**1**		**1**

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkup KLHK. KLHK menetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan dari Sasaran Strategis tersebut. Sasaran Strategis KLHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah **Sasaran Strategis ke-4 (SS.4**, yaitu "***Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing***".

Dalam Sasaran Strategis 4 tersebut, Ditjen Gakkum LHK memiliki 2 poin Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni **IKU 14 – Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum** dan **IKU 18 – Nilai SAKIP Ditjen PHLHK.**

Sasaran Strategis KLHK

SS 1:
Terwujudnya lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim

SS 2:
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

SS 3:
Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

SS 4:
Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing

IKU 14	IKU 18
Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK

A. RENCANA STRATEGIS

MILE STONE RENSTRA
DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2020-2024

IKU 14 : Jumlah Kasus LHK yang ditangani oleh Penegakan Hukum LHK

2020 — IKU 14
IKU Target : 856
IKU Capaian : 1.261

2021 — IKU 14
IKU Target : 762
IKU Capaian : 1.194

2022 — IKU 14
IKU Target : 1.041
IKU Capaian : 1.370

2023 — IKU 14
IKU Target : 1.126

2024 — IKU 14
IKU Target : 2.970

IKU 18 : Nilai SAKIP Ditjen PHLHK

2020 — IKU 18
IKU Target : 72
IKU Capaian : 81,92

2021 — IKU 18
IKU Target : 74
IKU Capaian : 76,35

2022 — IKU 18
IKU Target : 76
IKU Capaian : 77,4

2023 — IKU 18
IKU Target : 78
IKU Capaian : *
*akan dilaksanakan tahun 2024

2024 — IKU 18
IKU Target : 80

2020
Efektivitas : 0,9
Efisiensi : 1,6

2021
Efektivitas : 0,91
Efisiensi : 1,04

2022
Efektifitas :
Efisiensi :

2023
Penilaian pada 2024

2024
Penilaian pada 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup						
Meningkatnya budaya ketaatan terhadap perundang-undangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang LHK	32,3%	40%	48%	68%	70%
Kegiatan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK						
Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	726	505	700	1.800	1.900
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	209	100	150	800	900
	Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	0	0	40	60	70
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani	273	152	182	498	570
Kegiatan Penyelesaian Lingkungan Hidup						
Meningkatnya perkara sengketa LH yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	53	22	22	138	150

Rencana Strategis 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup						
Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK						
Meningkatnya kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesai- kan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	220	130	110	300	350
	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	570	200	182	200	260
	Jumlah berkas penyelesaian perma- salahan penggunaan kawasan hutan	0	0	50	60	70
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diaman- kan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan	2.412.707 ha	600.000 ha	300.000 ha	900.000 ha	1.200.000 ha
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan LHK						
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan LH	89	63	31	160	180
	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	197	42	28	220	250
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	210	342	400	350	400

Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72	74	76	78	80
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen Gakkum LHK						
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai SAKIP pada Ditjen PHLHK	72	74	76	78	80
	Level maturitas SPIP Ditjen PHLHK	3	3	3	4	4
	Laporan Keuangan Ditjen PHLHK yang tertib dan akuntabel	1	1	1	1	1

B. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 bertema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** merupakan upaya dalam mendukung salah satu Prioritas Nasional (PN). Ditjen Gakkum LHK mendukung pada Prioritas Nasional 6 (PN-6) yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dukungan pada PN-6 tersebut diinternalisasikan ke dalam kebijakan Ditjen Gakkum LHK sebagai berikut:

Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan	Penanggulangan Pengangguran Disertai Dengan Peningkatan Decent Job	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)	Pengembangan Ibu Kota Nusantara
Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum LHK	Pelaksanaan Penegakan Hukum LHK untuk memastikan masyarakat sekitar hutan tidak kehilangan haknya	Prinsip *Restorative Justice* dengan Penerapan Sanksi Administratif pada perusahaan sebagai pelaksanaan mandat UUCK	Penegakan Hukum LHK sebagai bentuk kontribusi pada FOLU Net Sink 2030	Penguatan Penegakan Hukum LHK di sekitar kawasan IKN dengan pelaksanaan operasi, pengawasan dann penindakan

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi (1) upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; (2) penanganan limbah dan sampah spesifik; serta (3) optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut akan diperkuat oleh edukasi, penyadartahuan, dan penguatan kapasitas kelembagaan di pusat dan daerah. Upaya tersebut juga didukung dengan penguatan sistem perizinan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Kegiatan Prioritas	Indikator	Target RKP 2023	Target Renja 2023		Satuan
			Semula	Menjadi	
Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	68	51	51	Persen
	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	610	250	483	Kasus
	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	2.150.000	300.000	300.000	Hektar
Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	2.000	800*	1.095	Badan Usaha
	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	85	76	99	Operasi
Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21 /berkas perkara dinyatakan lengkap	500	220*	410	Perkara
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	110	30	64	Perkara

Keterangan:
*Target diakumulasikan dengan Rincian Output UUCK

RENCANA KERJA 2023

Indikator Kinerja Utama	Target		Satuan
	Semula	Menjadi	
Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum	1.126	1.670	Kasus
Rincian Output			
Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	750	1.045	Badan Usaha
Sanksi Administratif Badan Usaha pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	50	50	Badan Usaha
Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	30	64	Perkara
Kasus Tindak Pidana LHK (P-21)	160	160	Perkara
Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60	250	Perkara
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51	73	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	25	28	Operasi
Indikator Kinerja Utama			
Nilai Kinerja Reforma Birokrasi (KLHK)	80	80	Poin

C. PERJANJIAN KERJA 2023

NO	SASARAN UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET	
			SEMULA	MENJADI
1	Meningkatkan budaya ketaatan terhadap Perundang-undangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang LHK	51 persen	51 persen
2	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani	250 kasus	480 kasus
3	Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	300.000 hektar	600.000 hektar
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen PHLHK	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	78 poin	78 poin

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	
		SEMULA	MENJADI
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		Rp104.274.581.000,-	Rp159.595.155.000,-
1	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi		
2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
3	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		Rp46.034.639.000,-	Rp77.435.803.000,-
4	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		Rp203.901.883.000,-	Rp258.724.289.000,-
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK		

D. POHON KINERJA DIREKTORAT

PROGRAM

Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN

Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK

Indikator Ditjen PHLHK	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemegang Izin yang Taat terhadap Peraturan Terkait Bidang LHK	% (persen)	32,23	40	65	68	70

KEGIATAN PENGADUAN PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRASI

SASARAN

Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan yang Diawasi Terhadap Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Badan Usaha	726	505	750	1800	1900
Jumlah Penerapan Sanksi Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	Badan Usaha	0	0	50	60	70
Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	209	100	150	800	900

SASARAN

Terselesaikannya Kasus Penegakkan Hukum Bidang LHK

Indikator Ditjen PHLHK	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Pidana dan Perdata LHK yang Ditangani	Kasus	273	152	182	498	570

KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN

Meningkatnya Perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Kasus	53	22	22	138	150

KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK

SASARA

Meningkatnya Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Diselesaikan sampai dengan P21

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Ta		
		2020	2021	2
Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P21/Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap	Kasus	220	130	
Jumlah Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	Perkara	0	0	
Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	570	200	

JENDERAL GAKKUM LHK

PROGRAM
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

SASARAN
Meningkatnya Pengamanan Hutan dari Gangguan dan Ancaman

Indikator Ditjen PHLHK	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas Hutan yang Diamankan dari Ancaman dan Gangguan Hutan, serta Perusakan Lingkungan	Hektar	2.412.707	600.000	300.000	900.000	1.200.000

KEGIATAN PENCEGAHAN PENGAMANAN LINGKGUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SASARAN
Meningkatnya Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan Hidup dan Peredaran Hasil Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup	Operasi	89	63	31	160	180
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi	197	42	28	220	250
Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	210	342	400	350	400

PROGRAM
Dukungan Manajemen

SASARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK

Indikator Ditjen PHLHK	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Poin	72	74	76	78	80

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PHLHK

SASARAN
Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien Lingkup Direktorat Jenderal PHLHK

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PHLHK	Poin	72	74	76	78	80
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PHLHK	Level	3	3	3	4	4
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PHLHK	Dokumen	1	1	1	1	1

N

arget		
022	2023	2024
110	300	350
50	60	70
182	200	260

E. PENGUKURAN KINERJA

Ditjen Gakkum LHK mendukung Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2020-2024.

Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama lingkup Ditjen Gakkum LHK diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan pengukuran kinerja dalam lingkup program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan hingga tahun 2024.

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	Satuan	Penanggung Jawab
A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Ditjen PPKL
Program : Kualitas Lingkungan Hidup Outcome : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IKU 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			

No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya budaya ketaatan terhadap Perundangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	% (Persen)	Direktur Jenderal PHLHK
2	Terselesaikannya kasus penegakan hukum LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Kasus	Direktur Jenderal PHLHK

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I PERSENTASE PENAATAN (PERSENTASE)

$$\sum \frac{(\Delta CX1 + \Delta CX2 + \Delta CX3)}{(\Delta TX1 + \Delta TX2)} x\ 100\%$$

$\Delta \boldsymbol{C}$X1 : Total Capaian Penaatan Pengaduan Badan Usaha

$\Delta \boldsymbol{C}$X2 : Total Capaian Penaatan Pengawasan Badan Usaha

$\Delta \boldsymbol{C}$X3 : Total Capaian Pencabutan Sanksi Administrasi Badan Usaha

$\Delta \boldsymbol{T}$X1 : Total Target Penaatan Pengaduan Badan Usaha

$\Delta \boldsymbol{T}$X2 : Total Target Penaatan Pengawasan Badan Usaha

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA (KASUS)

$$\sum (\Delta CX1 + \Delta CX2)\ \ Kasus$$

$\Delta \boldsymbol{C}$X1 : Total Capaian Perkara Kasus Pidana bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani hingga berkas lengkap (P-21)

$\Delta \boldsymbol{C}$X2 : Total Capaian Perkara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 4)	Satuan	Penanggung Jawab
B	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Juta Hektar	Ditjen PKTL

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Outcome : Menurunnya Laju Penyusutan Hutan
IKU 4 : Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan

No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Ha (Juta Hektar)	Direktur Jenderal PHLHK

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN (HEKTAR)

$$\sum(\Delta CX1)\ \ Hektar$$

ΔCX1 : Total Capaian Luas Kawasan Hutan yang diamankan melalui Operasi Pengamanan Hutan

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	Satuan	Penanggung Jawab
C	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	Sekretaris Jenderal KLHK

Program : Dukungan Manajemen
Outcome : Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang *agile*, efektif dan efisien
IKU 4 : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	Seluruh Direktur Jenderal UKE I

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I NILAI SAKIP DITJEN PHLHK (POIN)

$$\sum(\Delta CX1)Poin$$

ΔCX1 : Total Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen PHLHK di Tahun sebelumnya (T-1)

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERJA PENEGAKAN HUKUM LHK TAHUN 2023

KERJA PENEGAKAN HUKUM KLHK TAHUN 2023

1009
PENANGANAN PENGADUAN

602	407
Perusahaan	Non Perusahaan

14
PROSES GUGATAN PERDATA

PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN

42
PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN

426
SANKSI ADMINISTRATIF

173
PENYELESAIAN KASUS PIDANA P21

75 Pembalakan Liar	45 Peredaran Ilegal TSL
32 Perambahan Hutan	1 TPPU
16 Pencemaran LH	4 Kerusakan LH

37
Fasilitasi Polri/Jaksa

598
PENGAWASAN IZIN

351
Berkas Penyelesaian Kawasan Hutan

185
OPERASI PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN

- **109** Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
  648.379 Ha
  Luas Hutan diamankan
- **440** Operasi TSL
  8.306 satwa
  4.321 buah bagian tubuh
- **36** Operasi Pembalakan Liar
  231.182 m^3

24
PENERAPAN PNBP GAKKUM

619 Miliar Rupiah

Indikator Kinerja Utama 14:

Jumlah Kasus yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum

IKU 14
IKHTISAR KINERJA

Target	1.679
Realisasi	2.015
Capaian Kinerja (%)	120%
Pagu	224.389.840.000
Realisasi	221 251 023.243
Capaian Anggaran (%)	98,6%
Efektivitas	1
Efisiensi	1,21

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.323 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama KLHK Tahun 2020 s.d 2023, dan Peraturan Dirjen PHLHK No. P.8 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Ditjen PHLHK, Ditjen PHLHK turut berperan pada IKU 14

Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengawasan Ketaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Usaha	1.048	1.200	114 %
Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	Badan Usaha	50	50	100 %
Penanganan Perkara Sengketa Lingkungan Hidup	Perkara	64	56	87,5 %
Kasus Tindak Pidana LHK (P-21)	Perkara	166	173	104 %
Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	Perkara	250	351	120 %
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	73	109	120 %
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	28	76	120 %

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efektivitas	Efisiensi
Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51 persen	50% persen	98 %	0,78	0,9
Jumlah Luas Hutan yang Diamankan Dari Gangguan dan Ancaman	600.000 ha	648.379 ha	108 %	1	1,08
Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani	480 kasus	580 kasus	120 %	1,03	1,04
Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	76 poin	77,19 poin	103 %	0,91	1,04

Penyebab tidak tercapainya target persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan LHK karena adanya *Automatic Adjusment*, sehingga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak mengurus perizinan ketaatan.

Rumus Perhitungan Jumlah Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman:

$$\frac{\text{Jumlah luas hutan (ha)yang diamankan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus Perhitungan Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

$$\frac{\text{(Total Perusahaan Pengaduan Taat + Total Pengawasan Taat + Pencabutan Sanksi Administrasi)}}{\text{(Total Perusahaan Pengaduan + Pengawasan yang diawasi)}} \times 100\ \%$$

Rumus Perhitungan Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pidana (perseorangan/perusahaan)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

a. Guna memberikan evaluasi yang komprehensif sebagai bahan perbaikan, dalam pengukuran akuntabilitas juga disertai analisis efektivitas dan analisis efisiensi penggunaan sumber dana. Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran indikator kinerja adalah sebagai berikut:

   Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut diketahui kemajuan efektivitas kinerja yaitu:

   1. Rasio perbandingan > 1 artinya terjadi peningkatan efektivitas / pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya
   2. Rasio perbandingan = 1 artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2023 tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2022
   3. Rasio perbandingan < 1 menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektivitas kinerja tahun 2023 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja tahun 2022

b. Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 2022. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2023. Kriteria yang dijadikan pedoman efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:

   1. Rasio Perbandingan > 1 atau = 1 artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2023 berjalan secara efisien.
   2. Rasio Perbandingan < 1 menunjukan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023, anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja.

c. Nilai efektivitas pada IKP 1 > 1 yaitu 1.04, artinya terjadi peningkatan pencapaian kinerja. Sedangkan nilai efisiensi IKP 1 < 1 yaitu 0,83 yang artinya pencapaian kinerja tahun 2023 belum berjalan secara efisien. Hal ini disebabkan karena ada anggaran yang terkena *Automatic Adjusment.*

d. Nilai efektivitas pada IKP 2 = 1, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2023 tetap/sama dengan dengan kinerja tahun 2022. Sedangkan nilai efisiensi IKP 2 > 1 yaitu 1,2 yang artinya pencapaian kinerja tahun 2022 berjalan secara efisien.

e. Nilai efektivitas pada IKP 3 = 1, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2023 tetap/sama dengan dengan kinerja tahun 2022. Sedangkan nilai efisiensi IKP 3 > 1 yaitu 1,2 yang artinya pencapaian kinerja tahun 2023 berjalan secara efisien.

f. Nilai efektivitas IKP 4 < 1 yaitu 0,91 yang artinya terjadi penurunan kinerja jika dibandingkan tahun 2022. Nilai efisiensi IKP 4 >1 yaitu 1,04 berarti pencapaian kinerja tahun 2023 sudah berjalan efisien.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 :
Persentase Pemegang Izin yang Taat terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target	51%
Realisasi	50%
Capaian Kinerja (%)	98%
Efektivitas	0,9
Efisiensi	1,2
Pagu	19.798.465.000
Realisasi	19.765.292.830
Capaian Anggaran (%)	99,83%

Persentase pemegang izin yang taat terhadap perturan bidang LHK terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu penanganan pengaduan perusahaan, penanganan pengaduan non perusahaan, pengawasan bidang LHK, sanksi administrasi serta penerapan denda administrasi permasalahan penggunaan kawasan hutan. Dari target 51% terealisasi sebesar 50%, hal tersebut dikarenakan terdapat *automatic adjustment* sehingga anggaran yang digunakan berkurang dan berpengaruh terhadap kegiatan yang dapat terlaksana.

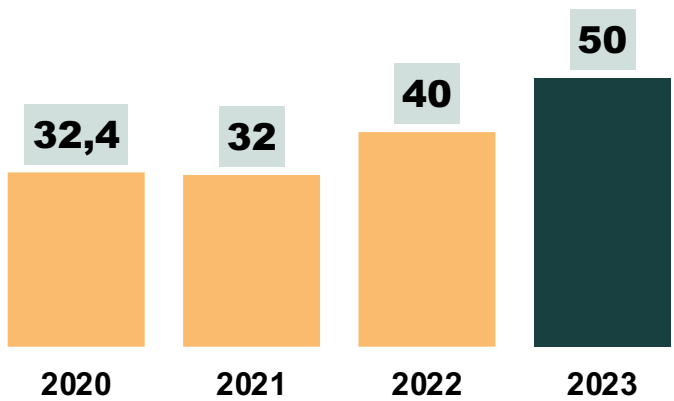

Persentase Pemegang Izin yang Taat terhadap Peraturan LHK Tahun 2020-2023

Satuan Kerja	Jumlah Perusahaan Pengaduan dan Pengawasan
Dit. PPSALHK	599
Jabalnusra	214
Kalimantan	159
Mapua	33
Sulawesi	92
Sumatera	103
Total	1.200

Persentase Ketaatan Badan Usaha

IKP/Kegiatan	Taat Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Realisasi	Capaian
Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang LHK			50%	98%
Pengaduan	40	*453		
Pengawasan	7	*133		
Pencabutan Sanksi Administrasi	204			
Total	251	586		

*Jumlah pengaduan perusahaan
*Jumlah Pengawasan reguler

Rumus Perhitungan Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

$$\frac{\text{Total Pengaduan perusahaan Taat + Total Pengawasan Taat + Pencabutan Sanksi Administrasi}}{\text{Total Perusahaan Pengaduan + Pengawasan yang diawasi}}$$

Hasil Perhitungan Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

$$\frac{251}{586} \times 100 = 50\,\%$$

Target tahun 2023 sebesar 51% berhasil diselesaikan dengan realisasi 50%, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak manajemen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga harus diterapkan upaya penegakan hukum berupa sanksi administrasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, persentase ketataan naik dari 40% menjadi 50%.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2 :
Jumlah Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman

Target	300.000 ha
Realisasi	648,379 ha
Capaian Kinerja (%)	120%
Efektivitas	1
Efisiensi	1,2
Pagu	50.142.595.000
Realisasi	49.918.187.585
Capaian Anggaran (%)	99,55%

Capaian kinerja program pengamanan luas hutan dari gangguan dan ancaman telah mencapai 120% dari target. Dari 600.000 ha telah terealisasi seluas 648.379 ha hutan yang telah teramankan dari gangguan dan ancaman.

Kegiatan pengamanan yang dilakukan Direktorat PPLHK dan 5 (lima) Balai Ditjen PHLHK berdampak pada peningkatan keamanan kawasan hutan dari gangguan dan acaman seperti perambahan, penambangan ilegal, pembalakan liar dan peredaran TSL liar.

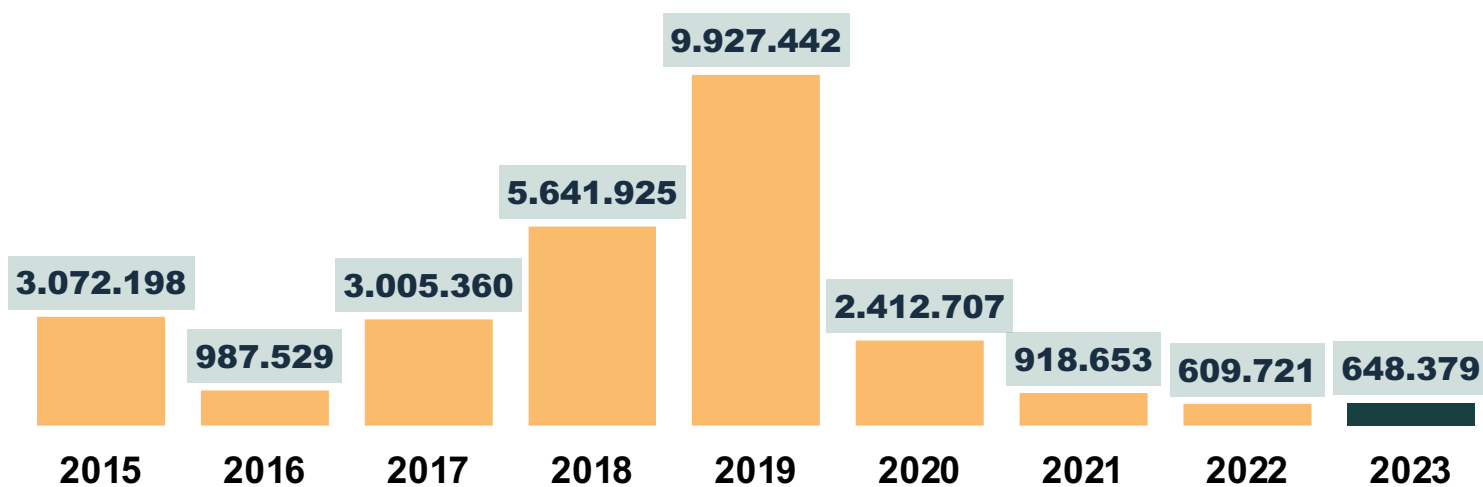

Total Luas lahan yang telah diamankan
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2022 **25.964.815,44 Ha**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3 :
Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup yang Ditangani

Target	480 Kasus
Realisasi	580 Kasus
Capaian Kinerja (%)	102%
Efektivitas	1,03
Efisiensi	1,04
Pagu	88.087.455.000
Realisasi	86.415.989.746
Capaian Anggaran (%)	98%

Satuan Kerja	Kasus Pidana dan Perdata
Dit. PSLH	49
Dit. PHPLHK	16
Jabalnusra	35
Kalimantan	46
Mapua	7
Sulawesi	35
Sumatera	41

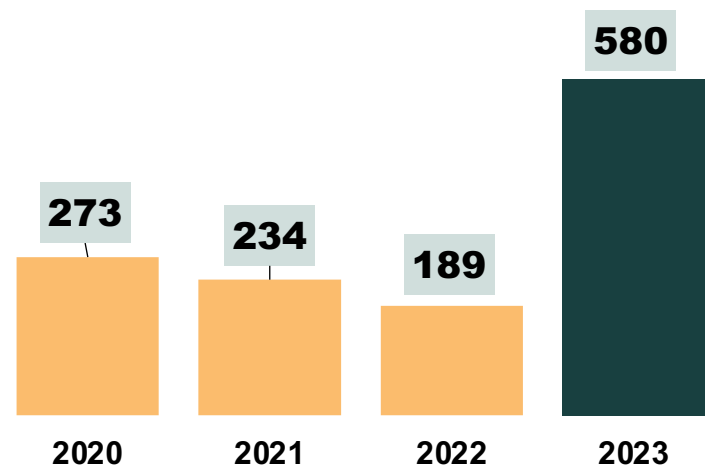

Kasus Pidana dan Perdata yang ditangani
Ditjen PHLHK Tahun 2020-2023

Realisasi jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang telah dilakukan oleh Direktorat PHPLHK, Direktorat PSLH dan 5 (lima) Balai Ditjen PHLHK sebanyak 580 kasus dari target 480 kasus.

Indikator Kinerja Kegiatan PHPLHK :

1. Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P21/Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap
2. Jumlah Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan
3. Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21

Target	160 Kasus
Realisasi	173 Kasus
Capaian Kinerja (%)	108%

Dari target 160 kasus telah terealisasi sebanyak 173 kasus yang diselesaikan sampai dengan P-21. Rincian 173 kasus tersebut berasal dari semua Balai Ditjen PHLHK dan Direktorat PHPLHK dengan realisasi paling banyak berasal dari BPPHLHK Wilayah Kalimantan yaitu 40 kasus.

Satuan Kerja	Kasus Tindak Pidana LHK P-21
Dit. PHPLHK	16
Jabalnusra	33
Kalimantan	44
Mapua	7
Sulawesi	32
Sumatera	41
Total	**173**

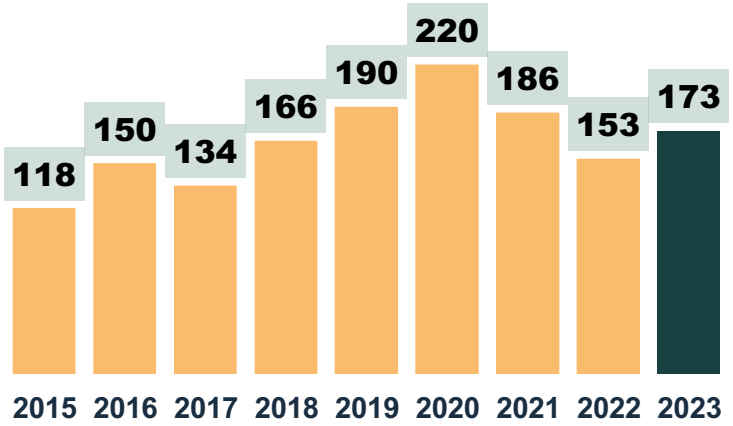

Kasus Tindak Pidana LHK P-21 yang ditangani oleh Ditjen PHLHK Tahun 2015-2023berjumlah 1.490

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan

Target	250 Perkara
Realisasi	351 Perkara
Capaian Kinerja (%)	120%

Subjek Hukum	Jumlah
Instansi Pemerintah	3
Masyarakat Kelompok Tani	182
Perusahaan	166
Total	**351**

Indikator kegiatan jumlah berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalah penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang diamanatkan dalam Pasal 110 A dan Pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari target 50 perkara telah terealisasi 110 perkaran. Realisasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan (input) oleh unit kerja lain di Kementerian LHK yang berwenang menerbitkan Sanksi Administratif terkait pengenaan denda.

Dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja yang memuat terobosan kebijakan baru yaitu penerapan prinsip ultimum remedium, terhadap kegiatan usaha dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan. Terdapat 2 skema penyelesaian terhadap kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, yaitu skema Pasal 110A atau Pasal 110B UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

Pasal 110A dikhususkan untuk kebun sawit di kawasan hutan sebelum 2 November 2020 dan memiliki izin lokasi dan/atau IUP yang sesuai Tata Ruang (termasuk STD-B untuk masyarakat dengan luasan maksimal 25 ha). Subyek hukum dalam skema Pasal 110A diwajibkan membayar PSDH-DR untuk selanjutnya diberikan legalitas berupa Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Produksi) atau Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha dan/atau Kerja Sama (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Konservasi/Lindung). Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha berlaku 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam. Sedangkan kerja Sama dilakukan dalam hal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di Kawasan Hutan Produksi. Kerja sama dimaksud dilakukan selama 1 (satu) daur paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam.

Pasal 110B ditujukan bagi kegiatan ilegal berupa perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya di dalam kawasan hutan sebelum 2 November 2020 dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Subyek hukum dalam skema Pasal 110B diwajibkan membayar denda administratif untuk selanjutnya diterbitkan legalitas berupa:

a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Produksi);
b. fasilitasi kerja sama (dalam hal areal kegiatan usaha berada di dalam kawasan Hutan Produksi dan terdapat tumpang tindih dengan keberadaan perizinan di bidang kehutanan); atau
c. perintah pengembalian areal kegiatan usaha kepada Negara (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Konservasi/Lindung).

Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Target	230 orang
Realisasi	396 orang
Capaian Kinerja (%)	120%

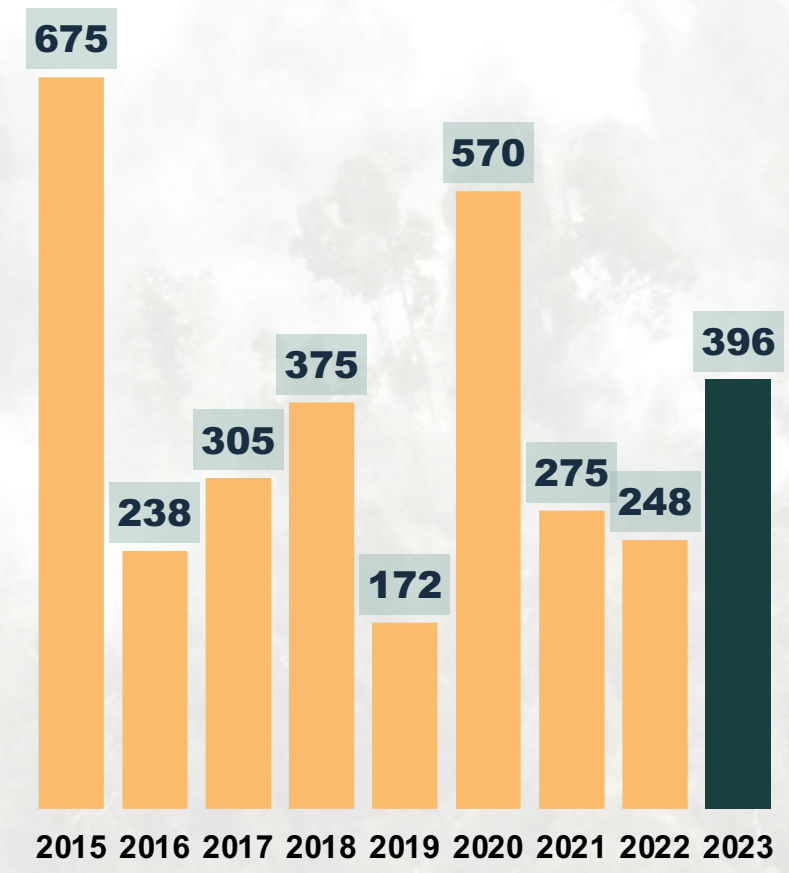

Peningkatan Kapasitas PPNS Ditjen PHLHK Tahun 2023

Peningkatan kapasitas PPNS merupakan upaya dalam rangka pemberian bimbingan teknis di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan dan penanganan barang bukti. Peningkatan kapasitas tidak hanya diberikan kepada PPNS di kantor pusat tetapi juga Balai Ditjen PHLHK. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas PPNS antara lain pendidikan dan pelatihan (diklat) pembentukan PPNS baru dan peningkatan kapasitas bagi PPNS yang sudah dilantik dan tenaga teknis lain yang mendukung penegakan hukum pidana LHK.

Satuan Kerja	Peningkatan Kapasitas PPNS
Dit. PHPLHK	347
Jabalnusra	14
Kalimantan	14
Mapua	5
Sulawesi	11
Sumatera	5
Total	**396**

Indikator Kinerja Kegiatan PSLH :

Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan	64 Kasus	14	120 %
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Luar Pengadilan		42	
TOTAL		**56**	

Unit Kegiatan	PNBP	Realisasi	Sisa
PSLH-MP	267.185.292.369,00	217.929.849.569,00	49.255.442.800,00
PSLH-LP	13.810.744.359,00	13.479.500.061,45	331.244.298,12,
Total	**280.996.036.728,00**	**231.409.349.635,45**	**49.586.687.098,12**

Berdasarkan capaian tersebut, Direktorat PSLH baik pusat dan Balai berhasil menghimpun penerimaan yang bersumber dari PNBP yang diperoleh dari pelaku usaha yang membayar kerugian lingkungan hidup sebagai kompensasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Adapun realisasi yang disajikan dalam tabel di atas PNBP yang telah disetor ke Kas Negara pada tahun 2023 sebesar Rp231.409.249.635,45 sisanya yang belum dibayar sebesar Rp49.586.687.098,12 dan diharapkan akan diselesaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada periode berikutnya secara bertahap sesuai kesepakatan.

Penerimaan PNBP Tahun 2023 sebesar

280.996.036.728,00

PNBP Tahun 2015-2023

Unit Kegiatan	PNBP	Realisasi	Sisa
PSLH-MP	420.837.735.610	351.973.592.810	68.864.142.800
PSLH-LP	199.157.964.144	186.185.012.235	12.972.951.908
Total	**619.995.699.754,59**	**538.158.605.045**	**81.837.094.708**

Adapun jumlah potensi PNBP dari tahun 2015-2023 sebesar Rp, 619.995.699.754,59 dan total yang sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp 538.158.605.045,86 sehingga terdapat sisa piutang PNBP hingga saat yang belum terbayarkan oleh wajib bayar berjumlah Rp 81.837.094.708,73

Total potensi PNBP dari perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap *(Inkracht Van Gewijde)* berjumlah Rp 20.558.864.869,016 (20,7 T).

Indikator Kinerja Kegiatan PPLHK:

1. Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar
3. Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

Target	73
Realisasi	109
Capaian Kinerja (%)	120

Pengamanan kawasan hutan selama tahun 2015 - 2023 telah diselenggarakan melalui kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan Operasi Hasil Hutan di beberapa kawasan hutan yang tersebar di Indonesia. Selama tahun 2023 dari target 73 operasi telah terelasisasi 109 operasi. Dengan adanya operasi pengamanan kawasan hutan akan berdampak pada peningkatan keamanan kawasan hutan dari gangguan dan ancaman.

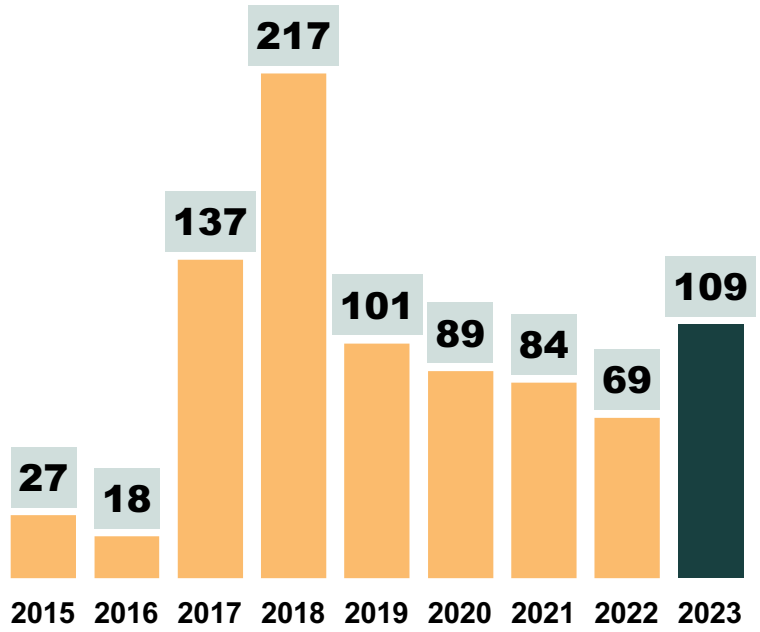

Operasi Pembalakan Liar
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2023

Satuan Kerja	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
Dit. PPLHK	27
Jabalnusra	15
Kalimantan	29
Mapua	2
Sulawesi	24
Sumatera	12

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan

Target	28
Realisasi	76
Capaian Kinerja (%)	120%

Operasi Peredaran Hasil Hutan terdiri dari Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Operasi Pembalakan Liar

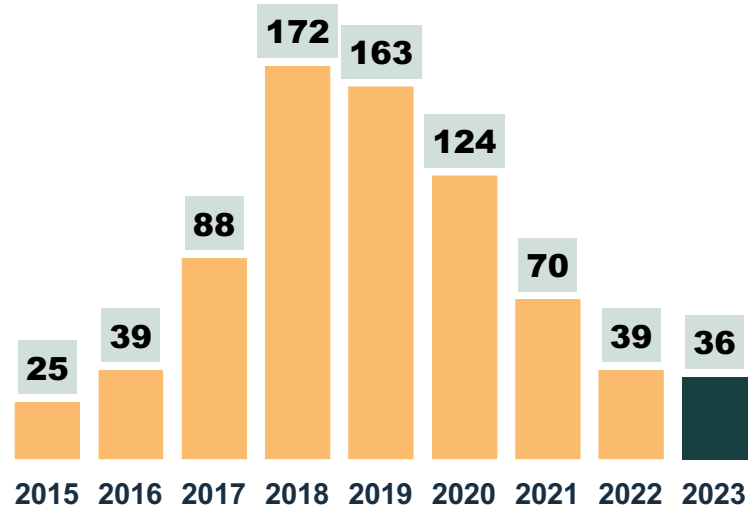

Operasi Pembalakan Liar
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2023

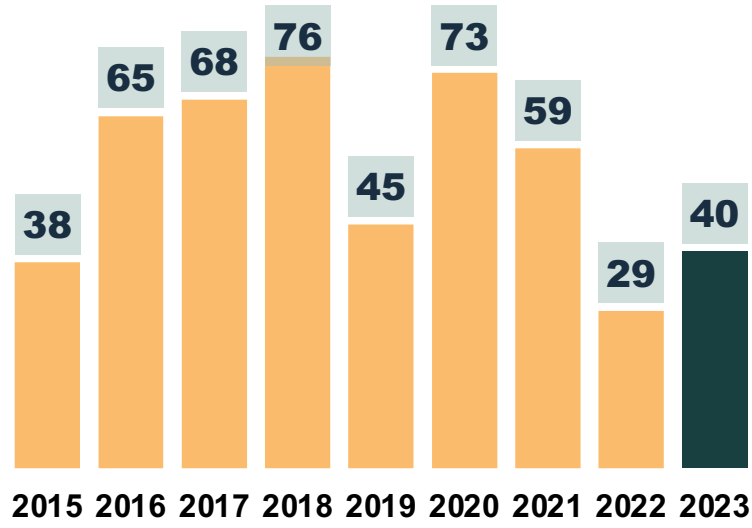

Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa dan Liar
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2023

Operasi Peredaran Hasil Hutan

Satuan Kerja	Operasi TSL	Operasi Pembalakan Liar	Total
Dit. PPLHK	8	5	13
Jabalnusra	10	5	15
Kalimantan	6	11	17
Mapua	4		4
Sulawesi	4	11	15
Sumatera	8	4	12

Hasil Operasi Peredaran Hasil Hutan

Tahun	Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (Ekor Satwa)	Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (Bagian Tubuh)	Hasil Kayu yang diamankan (m^3)
2015	2.592	283	1.041,83
2016	6.120	5.288	3.642
2017	4.178	4.639	3.820
2018	213.205	689	11.123
2019	1.325	1.799	17.144
2020	5.232	2.751	1.674
2021	5.710	421	592.999
2022	1.542	179	132.659
2023	8.305	4321	231.182

Operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar dari tahun 2015-2023 paling banyak terjadi di tahun 2018 dan mengalami kenaikan realisasi dari tahun 2022 ke 2023, salah satu faktornya adalah dilakukan Top Up PNBP.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Target	230
Realisasi	464
Capaian Kinerja (%)	120

Pada tahun 2023, sebanyak 464 Polisi Kehutanan yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan jejaring baik lingkup satuan kerja maupun lingkup yang lebih luas.

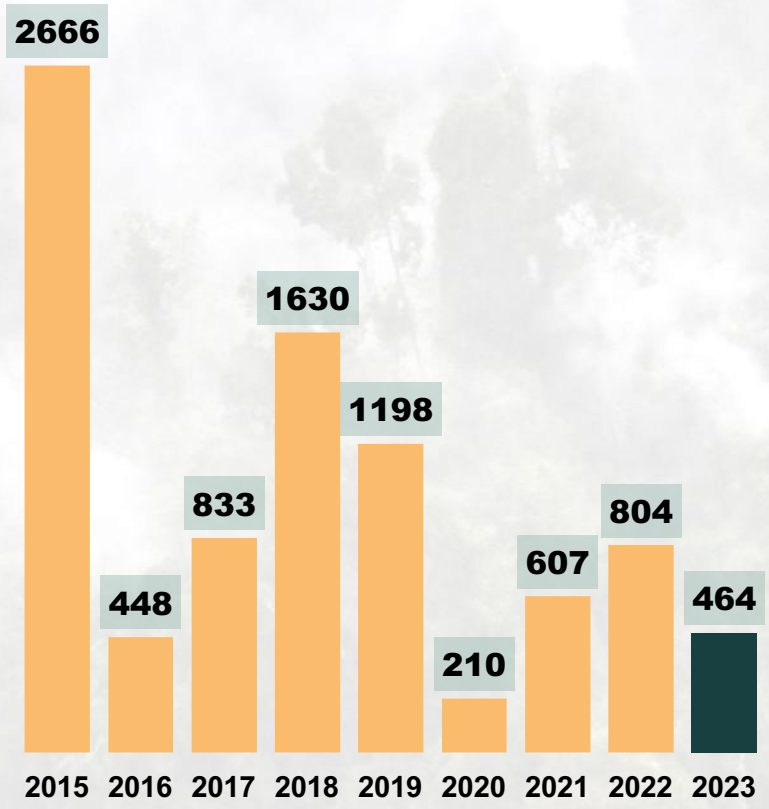

Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya Ditjen PHLHK Tahun 2015-2022

Tahun 2023	Capaian
Dit. PPLHK	141
Jabalnusra	119
Kalimantan	145
Mapua	40
Sulawesi	160
Sumatera	158
Total	464

Indikator Kinerja Kegiatan PPSALHK:

1. Jumlah Usaha Atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK
2. Jumlah Penerapan Sanksi Administratif Pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan
3. Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Usaha Atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK

Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif

1. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan yang diterima berasal dari sektor lingkungan hidup, kehutanan, LHK dan non LHK. Penerimaan aduan diterima dari berbagai *platform* antara lain website, aplikasi, media sosial, whatsapp, email, surat, atau dengan aduan langsung ke kantor pusat.

Penanganan pengaduan tidak hanya dilakukan oleh Direktorat PPSA tetapi juga semua Balai Ditjen PHLHK.

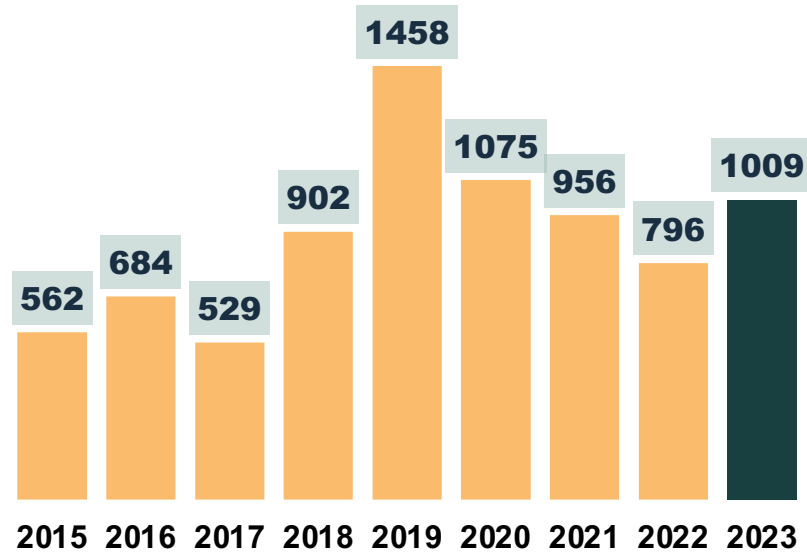

Jumlah Pengaduan yang Tertangani Tahun 2015 – 2022 adalah 6.962

Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan, dengan demikian pengaduan dikatakan tertangani apabila sudah dalam tahapan pengaduan baru, dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, direkomendasikan ke unit lain yang terkait, maupun pengaduan yang ditindaklanjuti sampai selesai dan dikeluarkan sanksi oleh KLHK.

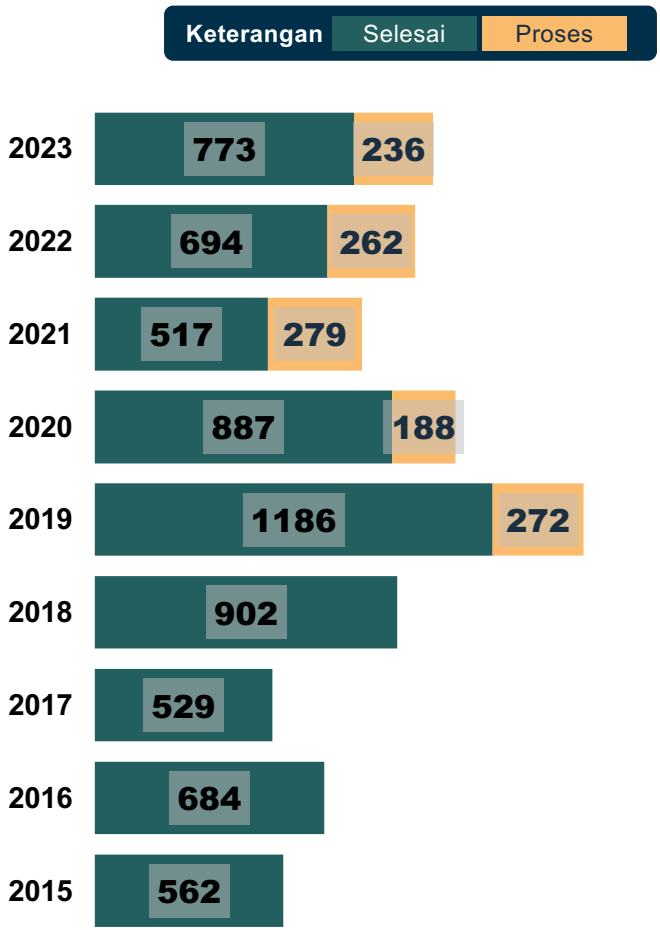

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Proses Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2023 terdapat 1.009 pengaduan, yang terdiri dari 362 pengaduan melalui surat, 287 pengaduan melalui website, 224 melalui media sosial dan aplikasi pesan (Whatsapp), 107 melalui pengaduan langsung, 6 pengaduan melalui aplikasi *mobile, 4* pengaduan melalui telepon dan 19 pengaduan melalui email.

Pengaduan dinyatakan selesai apabila telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sektor lain, unit lain di KLHK atau dikenakan sanksi administratif oleh KLHK. Selain itu, juga dinyatakan selesai jika data pengaduan tidak lengkap, bukan merupakan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan, dilakukan operasi yustisi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK, serta pengaduan tidak terbukti.

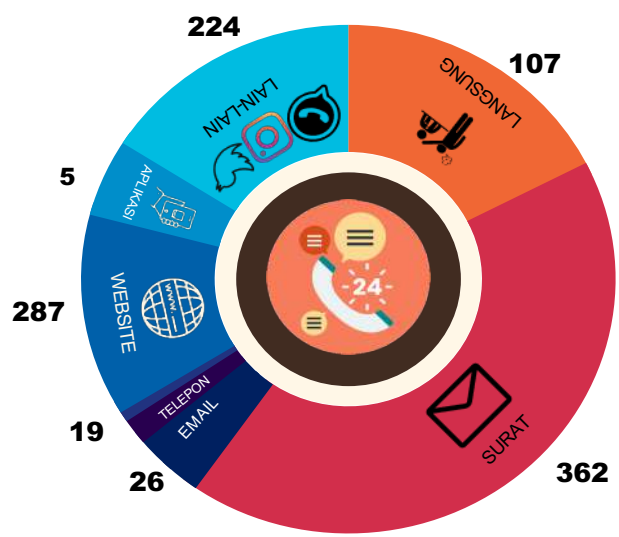

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2015-2022

No	Sumber Pengaduan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Langsung	108	113	122	211	311	128	82	120	107	1.302
2	Surat	291	396	290	333	474	388	441	353	362	3.328
3	SMS	65	30	3	3	7	1				109
4	Email	43	9	13	14	29	31	6	26	19	190
5	Telepon	2	17	3	9	32	26	13	2	4	108
6	Komnas HAM	40	0	0	0	0	0				40
7	Website	13	1	12	137	182	232	216	196	287	1.276
8	Aplikasi (Gakkum, Lapor, MOBILE)	0	109	42	16	59	47	30	5	6	314
9	Lain-Lain (WA, Media Sosial)	0	9	44	179	364	222	168	94	224	1.304
	Total	**562**	**684**	**529**	**902**	**1458**	**1075**	**956**	**796**	**1.009**	**7.971**

2. Pengawasan Ketaatan Perusahaan

Secara keseluruhan jumlah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat PPSA dan 5 (lima) Balai UPT Gakkum pada tahun 2023 sebanyak 1.009 perusahaan. Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat 167 perusahaan yang taat.

Sektor yang dilakukan pengawasan adalah sektor industri, prasarana dan jasa, sektor kehutanan, dan sektor SDA. Sejak tahun 2015 hingga 2023 jumlah perusahaan yang telah diawasi dari ketiga sektor tersebut berjumlah 2.874 perusahaan, tren peningkatan ditunjukkan di tahun 2023.

Jika dibandingkan dari tahun 2022, dan 2023 perusahaan yang diawasi sedikit lebih banyak, dikarenakan top up PNBP yang dilakukan untuk mendukung penegakan hukum LHK.

Jumlah Perusahaan yang diawasi
Tahun 2015 – 2023

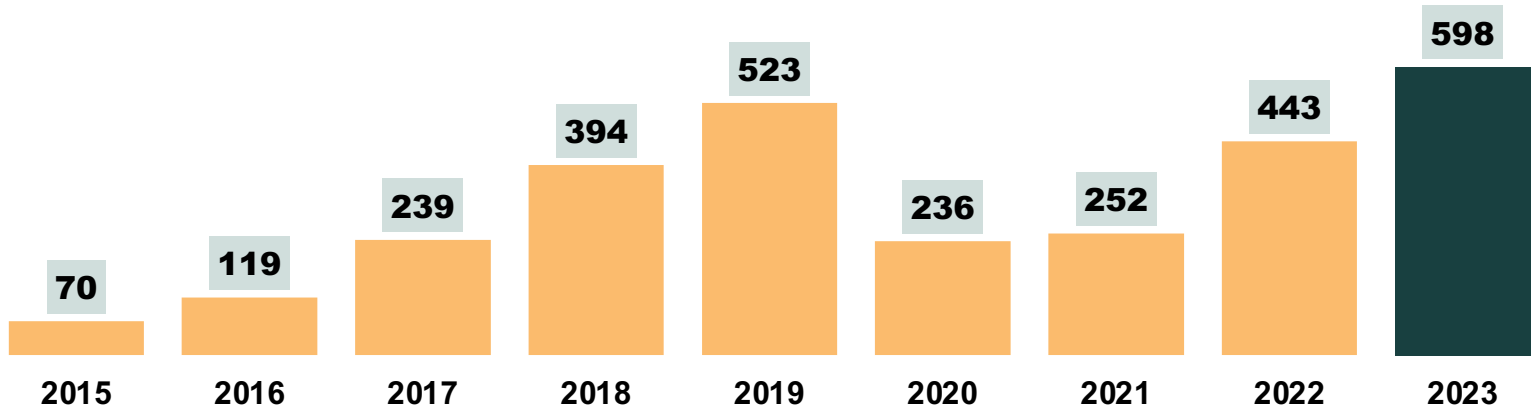

Jumlah Pengawasan Perusahaan

No	SEKTOR INDUSTRI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Industri, Prasarana dan Jasa	15	71	165	284	285	143	182	209	352	1.706
2	Kehutanan (Karhutla)	53	30	13	42	58	43	5	10	1	255
3	SDA	2	18	61	68	180	50	65	224	228	896
	Total	**70**	**119**	**239**	**394**	**523**	**236**	**252**	**443**	**598**	**2.874**

Jumlah Izin Pengawasan Perusahaan

No	SEKTOR INDUSTRI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Industri, Prasarana dan Jasa	56	301	631	917	946	364	482	273	357	4.327
2	Kehutanan (Karhutla)	170	74	46	136	146	63	8		21	664
3	SDA	12	222	417	375	705	258	276	476	220	2.961
	Total	**238**	**597**	**1094**	**1428**	**1797**	**685**	**766**	**749**	**598**	**7.952**

3. Sanksi Administrasi

Selama tahun 2023, Direktorat PPSA telah berhasil menerbitkan 426 sanksi administratif yang terdiri dari 238 sanksi paksaan pemerintah, 7 sanksi teguran tertulis sebagai tindak lanjut dari penanganan kasus pengaduan dan pengawasan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan, 112 surat peringatan terkait kasus karhutla, dan 24 denda administratif.

Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Tahun 2015-2023

No	Jenis Sanksi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1	Pencabutan Izin	3	0	1	0	0	0			4
2	Pembekuan Izin	16	0	0	0	0	0			16
3	Paksaan Pemerintah	15	90	125	158	347	153	202	238	1.328
4	Teguran Tertulis	8	15	0	0	153	12	14	7	209
5	Denda Administratif							6	24	30
6	Surat Peringatan	0	115	0	0	316	175	297	112	1.015
	Total	**42**	**220**	**126**	**158**	**816**	**340**	**519**	**381**	**2.602**

Pencabutan sanksi administrasi bisa dilakukan apabila perusahaan sudah melaksanaakan kewajiban yang sudah tertuang dalam SK Sanksi Administrasi dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, dan melaporkan progres kegiatan yang sudah dilakukan. Peningkatan kualitas pengawasan dan SA diperlukan agar bisa memberikan efek jera pada pelaku usaha.

Tata Pengurusan PP Nomor 24 Tahun 2021 (Pasal 110B)

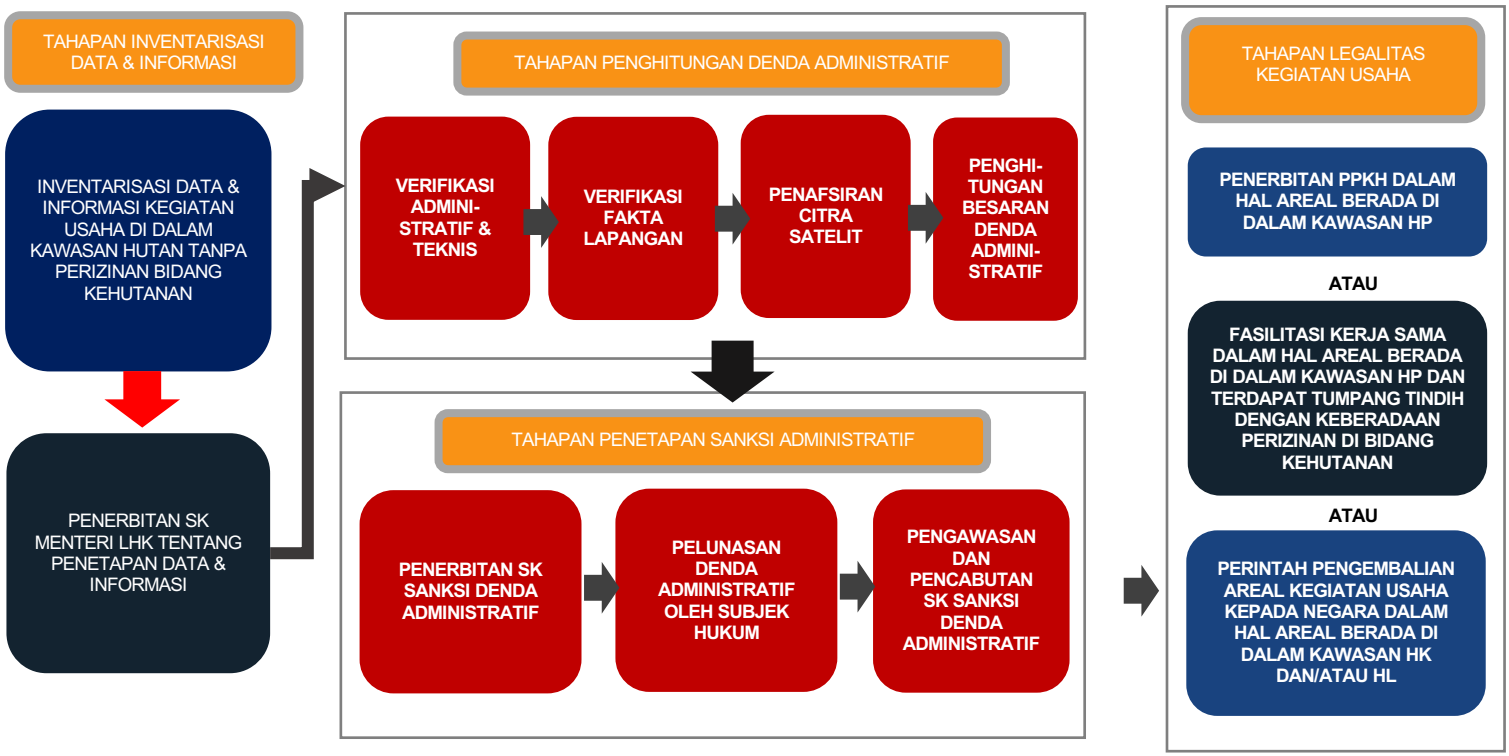

Penerapan denda administratif berlaku bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain pada Kawasan hutan tanpa memiliki izin usaha, ini dikenai sanksi administratif, berupa: penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif; dan/atau paksaan pemerintah.

Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh **orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar**, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

Pada tahun 2023, Ditjen PHLHK telah mengeluarkan 24 denda administratif bagi pelaku pelanggaran di kawasan hutan tanpa izin. Total denda administratif yang akan menjadi PNBP sebesar Rp.619 M.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah PPLHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Peningkatan kapasitas PPLH dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis dasar-dasar pengawasan. Bimbingan teknis tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait pengawasan yang berlaku, termasuk peraturan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tahun 2023 peningkatan kapasitas PPLH telah melebihi target, dari target 438 orang terealisasi 528 orang.

Target	438
Realisasi	528
Capaian Kinerja %	120

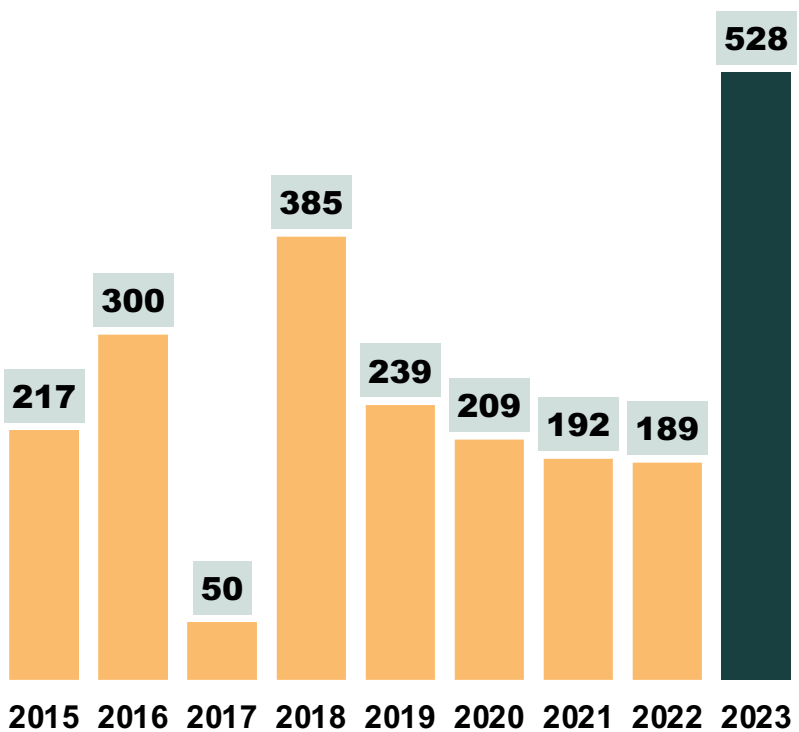

Jumlah PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya Ditjen PHLHK Tahun 2015-2023

Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan secara online melalui aplikasi *Zoom*. Topik yang dibahas mengenai kebijakan pengawasan penataan, aspek persetujan lingkungan pasca UU Cipta Kerja, aspek pengendalian pencemaran air pasca UU Cipta Kerja, aspek pengendalian pencemaran udara pasca UU Cipta Kerja, aspek pengelolaan Limbah B3, Limbah Non B3, dan B3 pasca UU Cipta Kerja, dan tata cara pengawasan.

Secara keseluruhan kegiatan juga diikuti oleh PPLH Kabupaten dan Provinsi. Selain bimbingan teknis pengawasan, tahun 2023 dilakukan juga bimbingan teknis penyusunan draf sanksi administratif, hal ini untuk mendukung pencapaian peningkatan jumlah sanksi administratif yang akan terbit.

Indikator Kinerja Utama 18:

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

IKU 18
IKHTISAR KINERJA

Target	76
Realisasi	77,14
Capaian Kinerja (%)	103,18%
Pagu	190.537.113.000
Realisasi	189.382.000.686
Capaian Anggaran (%)	99,39%
Efektivitas	1,01
Efisiensi	1,04

IKK 1. Nilai SAKIP Ditjen PHLHK Tahun 2022

Target : 76

Realisasi : 77,19

IKK 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PHLHK

Target : 3

Realisasi : 3,98

IKK 3. Laporan Keuangan Ditjen PHLHK

Target : 1

Realisasi : 1

Nilai SAKIP Ditjen PHLHK merupakan kegiatan Dukungan Manajemen dengan sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola pemerintahan Ditjen PHLHK. Melalui penerapan SAKIP, sistem manajemen yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif. Capaian Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat Jenderal Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 menggunakan pendekatan nilai SAKIP tahun 2022 adalah sebesar nilai 77,14 poin dengan kategori BB (Sangat Baik) dari target 76 poin dengan capaian kinerja sebesar 101%.

Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK

Capaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat Jenderal Wilayah III Kementerian LHK tahun 2022 adalah 77,19, atau dengan capaian kinerja sebesar 102%.

Nilai akuntabilitas kinerja merupakan gambaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada tahun 2021 mengalami perubahan, baik dari jumlah komponen yang dinilai, maupun kriteria penilaian. Acuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, yang mencabut Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015. Komponen capaian kinerja tidak lagi dinilai, sehingga total komponen yang dinilai hanya empat.

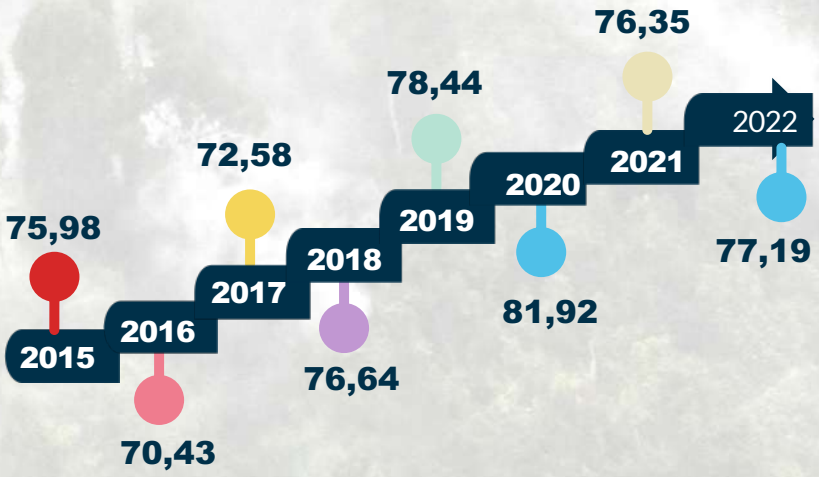

Nilai SAKIP Ditjen PHLHK Tahun 2015-2022

Komponen	2021			2022		
	Bobot	Nilai	%	Bobot	Nilai	%
Perencanaan kinerja	30	22,75	75,83%	30	24,45	84,33%
Pengukuran kinerja	30	22,43	74,77%	30	22,55	75,16%
Pelaporan kinerja	15	11,16	74,40%	15	12,26	81,73%
Evaluasi kinerja	25	20,00	80,00%	25	17,92	71,68%
Capaian kinerja						
Total	**100**	**76,34**		**100**	**77,19**	

Indikator Kinerja Kegiatan 2 :
Nilai Level Maturitas Ditjen Gakkum LHK

Tingkat maturitas SPIP menunjukkan tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Nilai tersebut juga menunjukkan kualitas dari proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Dari nilai tersebut, dapat terlihat gambaran peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker, kemudian akan dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Nilai maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK 3,982 merupakan hasil penilaian mandiri dan masuk pada level 3. Level tersebut menggambarkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

TARGET		REALISASI
4	3,982	99,55%

Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Laporan Keuangan Ditjen Gakkum LHK

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI

Ditjen Gakkum LHK senantiasa memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tersebut dengan menyusun Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, Semester I Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2023 yang berkualitas dengan menjunjung akuntabilitas. Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut Ditjen Gakkum LHK terus melakukan upaya yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap Laporan Keuangan KLHK agar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2023. Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 (empat) tahun berturut-turut juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diperolehnya Maturitas SPIP level 4.

Perincian Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran (RA)

Uraian	TA 2023		% Terhadap Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,127,474,965,000	623,893,083,613	55,34
JUMLAH PENDAPATAN	**1,127,474,965,000**	**623,893,083,613**	**55,34**
BELANJA NEGARA			
Belanja Pegawai	144,725,031,000	143,043,476,913	98,84
Belanja Barang	297,892,785,000	293,409,886,993	98,50
Belanja Modal	53,137,431,000	52,294,060,268	98,41
JUMLAH BELANJA	**495,755,247,000**	**488,747,424,174**	**98,59**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp623.893.083.613,-atau mencapai 55,34% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.127.474.965,000,-. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp488.747.424.174,- atau mencapai 98,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp495.755.247.000,-

b. Neraca Tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	2022
Aset		
Aset Lancar	89.923.555.151	32.806.498.806
Aset Tetap	273.314.359.378	228.605.515.868
Piutang Jangka Panjang	0	-
Aset Lainnya	13.441.018.018	13.321.720.620
Jumlah Aset	**373.678.932.547**	**274.733.735.294**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	2.972.932.857	125.866.184
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.972.932.857	125.866.184
Jumlah Kewajiban	**2.972.932.857**	**125.866.184**
Ekuitas		
Ekuitas	370.705.999.690	274.607.869.110
Jumlah Ekuitas	**370.705.999.690**	**274.733.735.294**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**373.678.932.547**	**300.931.054.838**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan entitas pada 31 Desember 2023. Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp373.678.932.547,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp86.923.555.151,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp273.314.359.378.,- Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,- Aset lainnya sebesar Rp13.441.018.018,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.972.932.857, dan Rp370.705.999.690,-

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp672.796.194.054,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp454.763.375.217,- sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp218.032.818.837,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp218.846.578.779,- dan sebesar Rp0,- sehinggal entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp218.846.578.779,-.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Ekuitas awal adalah sebesar Rp274.607.869.110,- ditambah surplus-LO sebesar Rp218.846.578.779,- kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi, selisih dan penurunan ekuitas sebesar Rp199.271.533,- dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar Rp122.549.176.666,- sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp370.705.999.690,-.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Ralisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Entitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis aktual.

B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2023

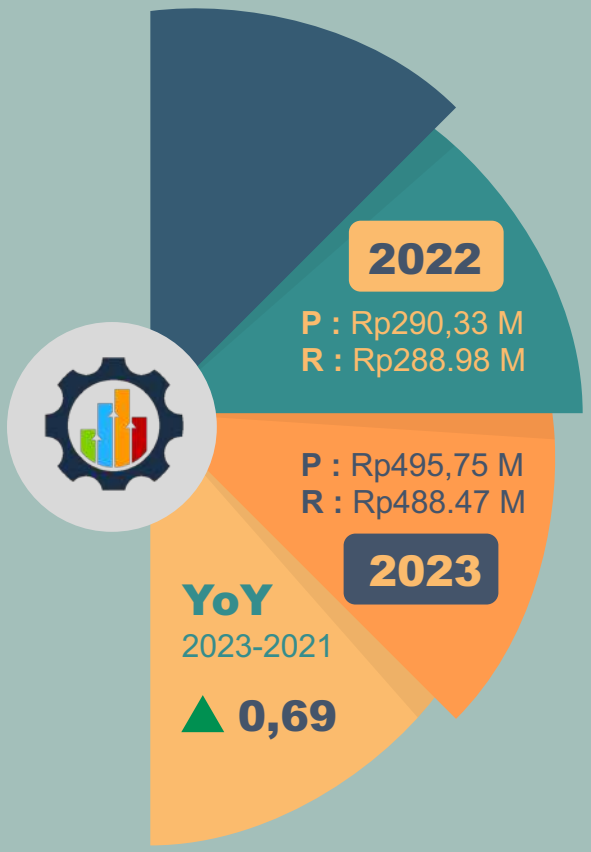

Pagu akhir Ditjen Gakkum LHK Tahun 2023 sebesar Rp495.755.247.000. Anggaran tersebut berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp295.803.365.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp199.718.056.000. Pagu tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis belanja dengan rincian berikut:

- Belanja Pegawai: Rp144.725.031.000
- Belanja Barang: Rp297.892.785.000
- Belanja Modal: Rp53.137.431.000

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp488.474.787.869 dengan presentase realisasi anggaran sebesar 98,53%, sehingga tersisa anggaran sebesar Rp7.280.459.131. Jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2022, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,69.

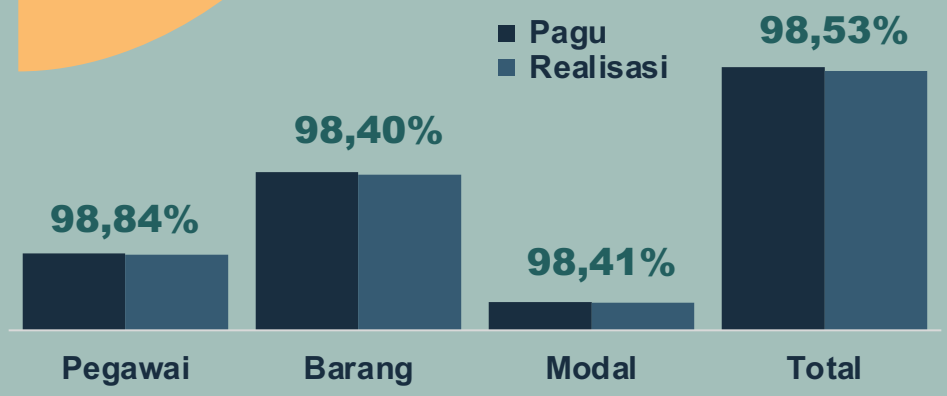

Realisasi Per Jenis Belanja

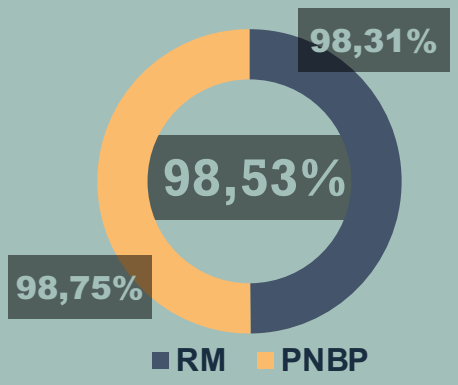

Realisasi Per Sumber Dana

Realisasi Anggaran UKE I KLHK

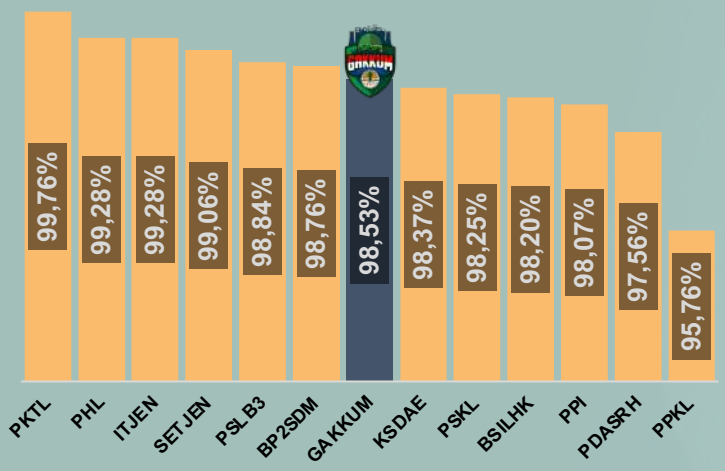

Realisasi Anggaran Satker Ditjen Gakkum LHK

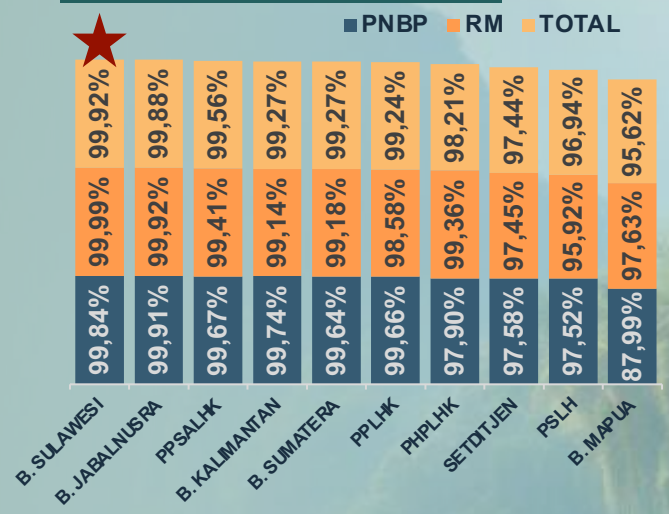

Jika dibandingkan dengan Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup KLHK, Ditjen Gakkum LHK berada pada peringkat ke-enam dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,53%. Adapun rata-rata persentase realisasi anggaran UKE I lingkup KLHK adalah 98,44%, artinya persentase realisasi anggaran Ditjen Gakkum LHK di lingkup KLHK masih berada di atas rata-rata.

Di lingkup Ditjen Gakkum LHK, BPPHLHK Wilayah Sulawesi menjadi satuan kerja dengan persentase realisasi anggaran tertinggi, yaitu sebesar 99,92% (RM: 99,99% dan PNBP: 99,84%).

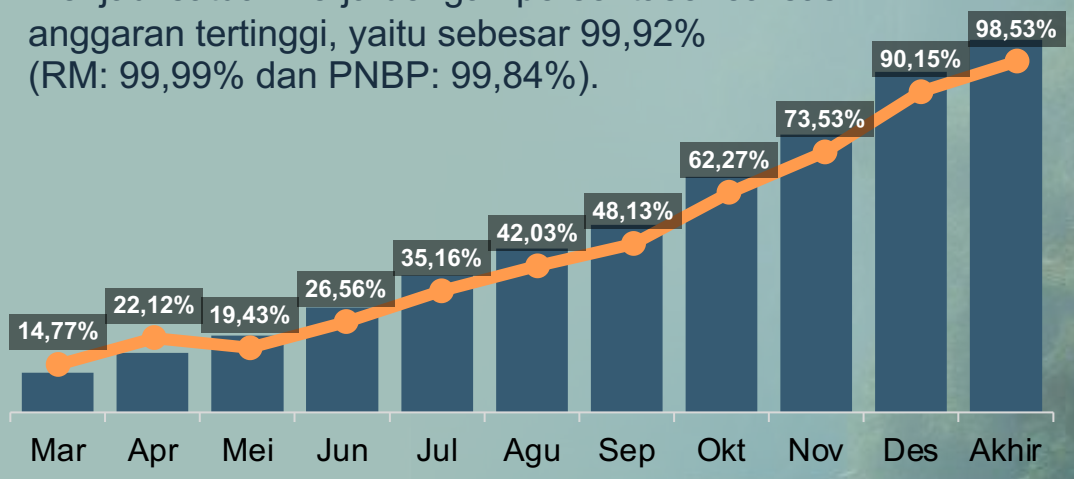

Capaian Realisasi Bulanan

NILAI KINERJA ANGGARAN
DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2023

NKA = 50% EKA + 50% IKPA

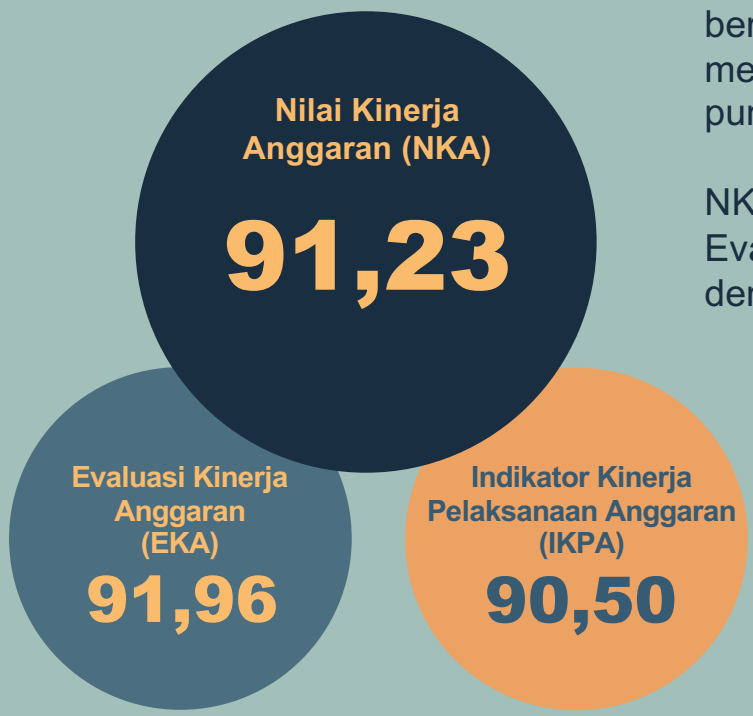

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat berdasarkan perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut merepresentasikan kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Pada tingkat nasional, hasil perhitungan NKA tersebut menjadi dasar dalam penentuan kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu. Selain itu, nilai ini menjadi dasar pemberian reward dan punishment oleh Menteri Keuangan.

NKA diperoleh dari penjumlahan antara nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA SMART) dengan bobot 50% yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50% dari aplikasi OMSPAN. Perhitungan NKA dilakukan oleh setiap entitas, mulai dari Satker, Eselon I, hingga Kementerian. Entitas Eselon II Pusat tergabung ke dalam satu akun Kantor Pusat Ditjen Gakkum LHK.

NKA UKE I KLHK

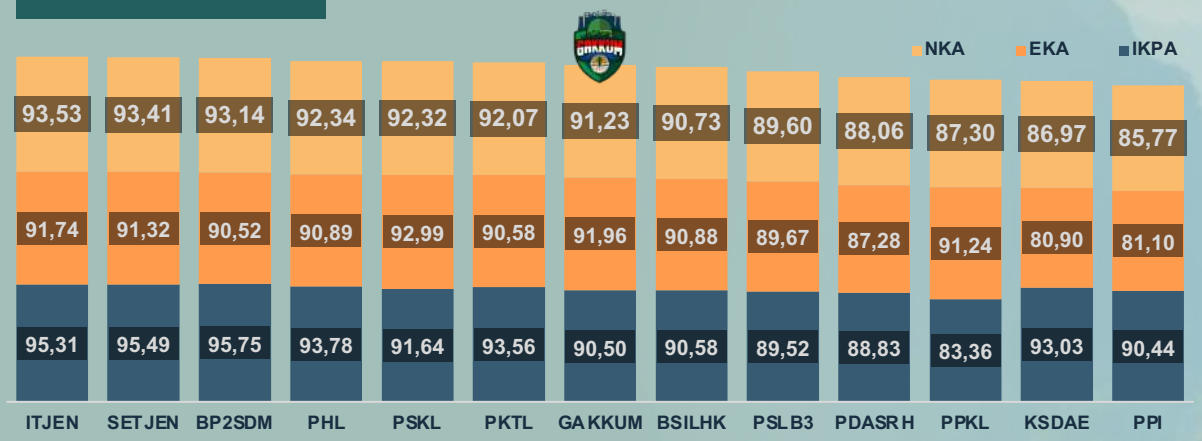

NKA Ditjen Gakkum LHK menempati peringkat ke-tujuh di lingkup UKE I KLHK, dengan nilai sebesar 91,23. Nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai EKA sebesar 91,96 dan nilai IKPA sebesar 91,50. Di lingkup Satker Ditjen Gakkum LHK, BPPHLHK Wilayah Sumatera menjadi satuan kerja dengan NKA tertinggi, dengan nilai sebesar 91,87. Nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai EKA sebesar 87,47 dan nilai IKPA sebesar 96,56. Meskipun NKA Satker lingkup Ditjen Gakkum LHK sudah cukup tinggi, tetapi nilai tersebut perlu untuk ditingkatkan lagi untuk mendukung NKA Ditjen Gakkum LHK.

NKA Satker Ditjen Gakkum LHK

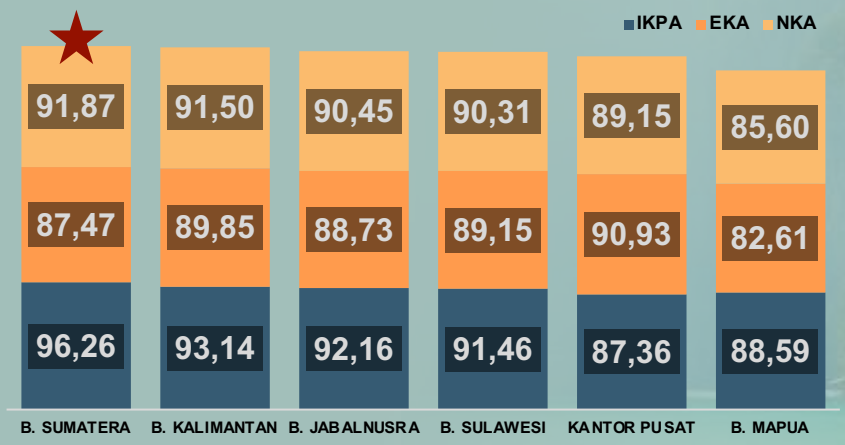

C. KINERJA LAINNYA

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Terdapat 8 (delapan) area perubahan untuk mendukung reformasi birokrasi yang lebih baik. Pembangunan reformasi birokrasi masif Kementerian LHK mulai dilakukan pada tahun 2016 melalui diterbitkannya peta jalan dan rencana aksi reformasi birokrasi yang menjadikan agenda pembangunan reformasi birokrasi menjadi semakin efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

8 AREA PERUBAHAN

- MANAJEMEN PERUBAHAN
- PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PENGUATAN KELEMBAGAAN
- PENGUATAN TATALAKSANA
- PENGUATAN SISTEM MANANEJEM SDM
- PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
- PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan sistem pengawasan yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Pengutaan akuntabilitas kinerja Ditjen Gakkum LHK dapat dilihat melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sedangkan penguatan sistem pengawasan dapat dilihat melalui nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (maturitas SPIP).

Penilaian atas implementasi SAKIP dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP. Komponen dalam penilaian SAKIP dilakukan pada 4 kriteria yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK pada tahun 2022 mencapai nilai 77,19 poin. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 76,35 poin, sedangkan nilai SAKIP tahun 2023 akan dilakukan penilaian pada tahun 2024. Rincian penilaian SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Komponen	Bobot	Tahun 2021		Tahun 2022		Tren (Poin)
			Realisasi (Poin)	Capaian Kinerja	Realisasi (Poin)	Capaian Kinerja	
1	Perencanaan Kinerja	30	22,75	75,83	24,45	81,50	▲ 1,7
2	Pengukuran Kinerja	30	22,43	74,77	22,55	75,17	▲ 0,12
3	Pelaporan Kinerja	15	11,16	74,40	12,26	81,75	▲ 1,1
4	Evaluasi Internal	25	20	80	17,92	71,67	▼ 2,08

Nilai 77,19 atau predikat BB (sangat baik) menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) sangat baik pada 2/3 unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan hinga level eselon III/koordinator.

Dari hasil penilaian SAKIP tahun 2022 Inspektorat Jenderal selaku tim penilai telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan dan telah dilakukan tindak lanjut perbaikan oleh Ditjen Gakkum LHK.

Beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK antara lain:

a. Pada dokumen perencanaan dan laporan kinerja telah ditambahkan keterangan waktu secara lengkap (tanggal, bulan, tahun)
b. Satuan target IKK dan anggaran telah diselaraskan antara dokumen rancana kerja, rencana aksi dan perjanjian kinerja
c. Penggunaan aplikasi e-SAKIP telah dilakukan oleh seluruh satker Ditjen Gakkum LHK
d. Evaluasi telah dilakukan pada satuan kerja Ditjen Gakkum LHK

Perkembangan nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan terus dilakukan untuk menjadikan Ditjen Gakkum LHK sebagai bagian dari agenda pembangunan reformasi birokrasi yang semakin efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kementerian LHK nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK selalu melebihi rata-rata tiap tahunnya.

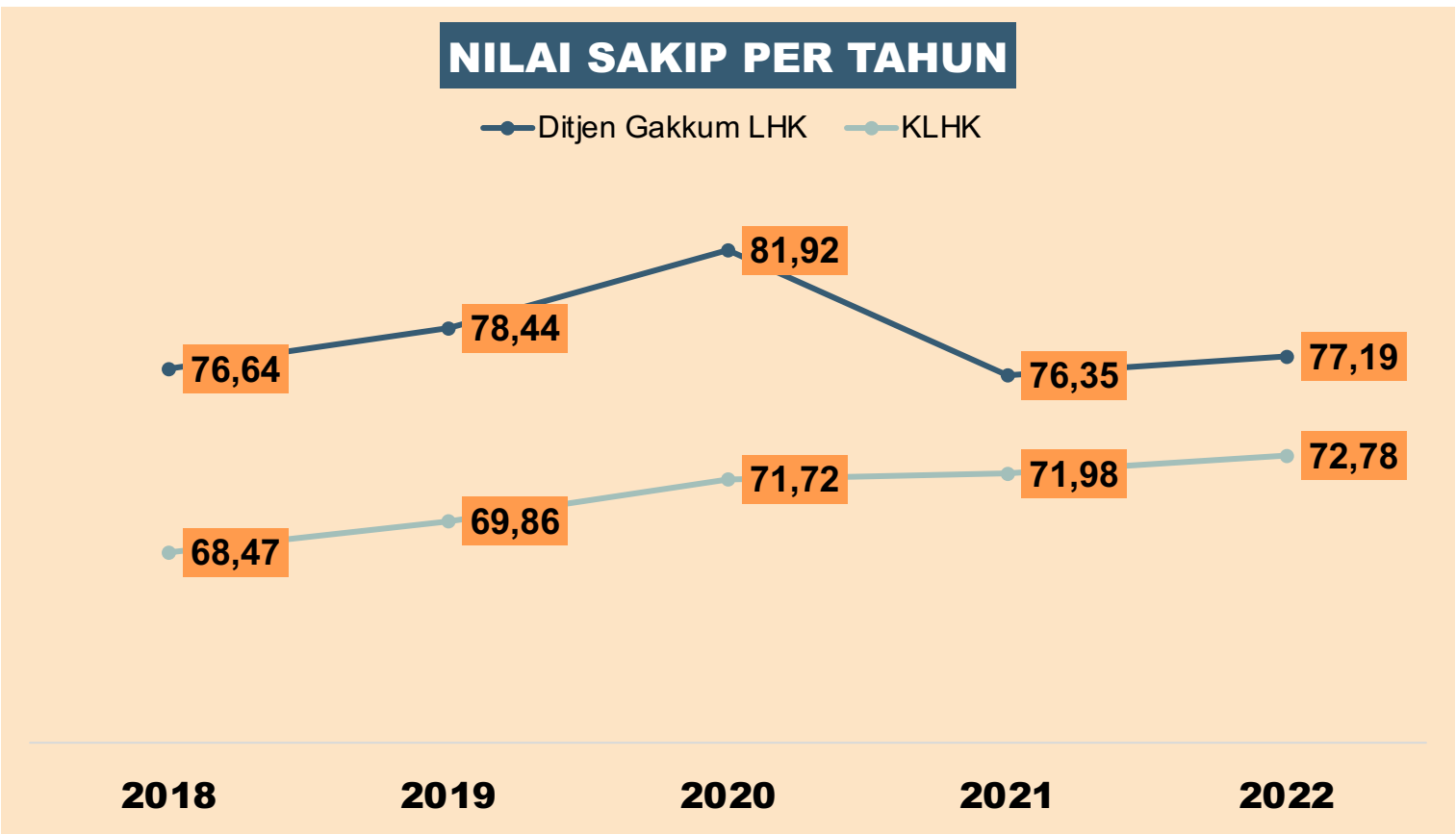

Selain penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan sistem pengawasan juga dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK melalui maturitas SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Untuk mengetahui sejauh mana SPIP dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan pengendalian maka dilakukan penilaian maturitas SPIP.

Maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Proses penilaian maturitas SPIP dimulai dengan penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing eselon I KLHK dan kemudian akan dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK tahun 2022 memperoleh nilai 3,982. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 3,975.

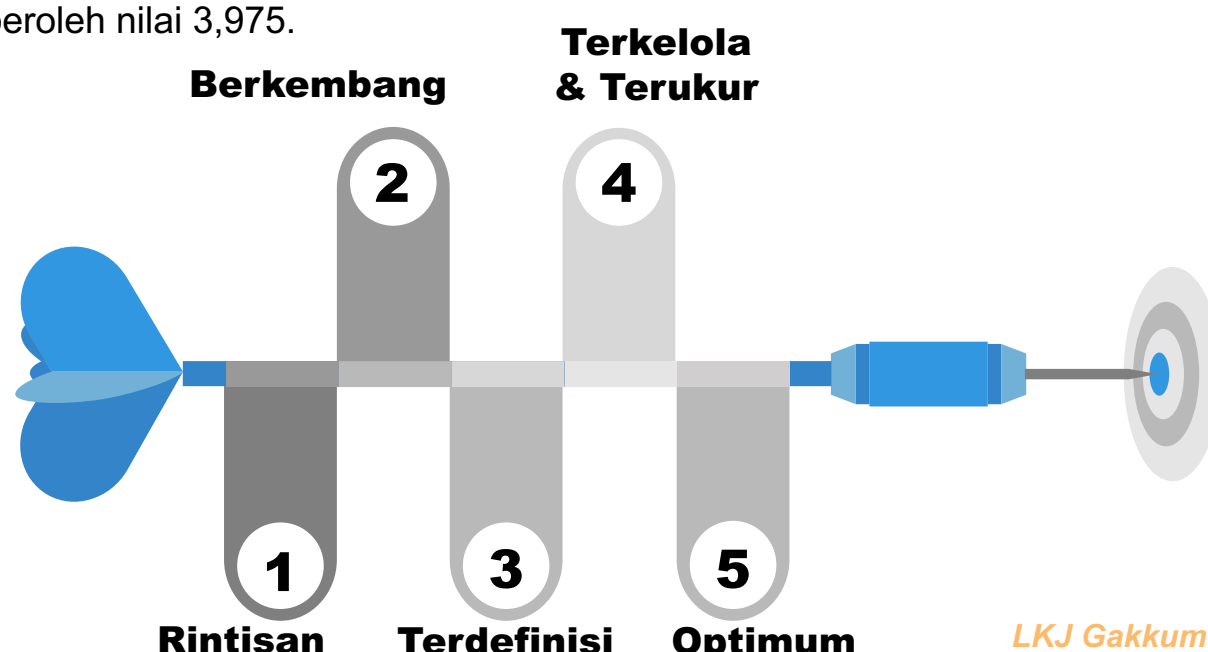

Tingkat maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK sebesar 3,982 dapat diartikan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pada tahun 2023 penilaian mandiri mulai dilakukan oleh setiap satker Kementerian LHK hingga lingkup UPT dan menggunakan aplikasi https://simawas.itjen.menlhk.go.id. Berikut hasil penilaian mandiri maturitas SPIP setiap satker Ditjen Gakkum LHK beserta hasil penjaminan kualitas (PK).

No	Unit Auditi	Hasil Penilaian Mandiri			Hasil Penjaminan Kualitas		
		SPIP	MRI	IEPK	SPIP	MRI	IEPK
1	BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	3,3511	3,3012	3,11	3,5037	2,6621	3,128
2	BPPHLHK Wilayah Kalimantan	3.2553	3.0481	2	3.2869	3.1199	1.928
3	BPPHLHK Wilayah Maluku Papua	3.7752	3.8528	4	3.526	3.3903	3.302
4	BPPHLHK Wilayah Sulawesi	3.4647	3.3621	3.896	3.4259	3.359	3.656
5	BPPHLHK Wilayah Sumatera	3.6335	3.7543	2.118	3.6764	3.7543	3.086
6	Dit. Pencegahan & Pengamanan LHK	3.2741	3.2121	3.062	3.3365	3.1903	2.592
7	Dit. Penegakan Hukum Pidana LHK	3.6822	3.7059	0.264	3.4564	3.6121	2
8	Dit. Pengaduan, Pengawasan & Sanksi Administrasi LHK	3.4747	3.3762	3.156	3.4358	3.334	2.92
9	Dit. Penyelesaian Sengketa LH	3.0336	2.6481	3.68	3.3021	3.1074	2.928
10	Sekretariat Ditjen Gakkum LHK	3.7745	3.9699	3.386	3.6168	3.7074	3.036

Reformasi Birokrasi Tematik

Pada awal tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan terobosan baru dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi. RB yang pada awalnya hanya berfokus pada penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General kini juga berfokus pada penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.

RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan

a. Perhutanan Sosial (PSKL)
b. Kelompok Tani Hutan (BP2SDM)
c. Kemitraan Konservasi (KSDAE)
d. Sirkular Ekonomi Bank Sampah (PSLB3)

RB Tematik Peningkatan Investasi

a. Investasi bidang KSDAE (wisata alam, jasling, dan TSL)
b. Investasi usaha pemanfaatan hutan (PHL)
c. Investasi usaha daur ulang sampah (PSLB3)

RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting

a. Indeks kualitas air (IKA) (PPKL)
b. Indeks kualitas pengelolaan sampah (IPKS) (PSLB3)

RB Tematik Prioritas Aktual Presiden

a. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Biro Umum)
b. Penurunan nilai impor migas melalui efisiensi penggunaan energi dari dunia usaha yang terdaftar dalam anggota PROPER (PPKL)
c. Penurunan frekuensi karhutla menurunkan inflasi (PPI, PDASRH, BRGM)

Ditjen Gakkum LHK sebagai salah satu unit kerja dibawah KLHK yang ikut berperan dalam pelaksanaan RB Tematik mendukung dalam pencapaian kinerja RB Tematik Peningkatan Investasi, terutama dalam 2 sasaran tematik yaitu meningkatnya investasi bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan meningkatnya investasi bidang pemanfaatan hutan.

Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) adalah salah satu potensi alam khusus yang menjadi ladang untuk investasi. Terkhusus juga karena sektor TSL langsung dikelola oleh Kementerian LHK. Berdasarkan data investasi TSL perorang atau perusahaan menunjukkan angka investasi TSL di tahun 2023 menghasilkan sumbangan yang cukup baik. Selain TSL pemanfaatan hasil hutan juga menjadi ladang baik bagi investor. Hasil hutan yang paling awam dihasilkan adalah berupa kayu bulat. Outcome dari adanya RB Tematik salah satunya adalah sumbangan PDB yang diharapkan dapat terus meningkat. Pada tahun 2024, untuk sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu diharapkan dapat menyumbang PDB sebesar Rp122,2 T.

Dalam upaya mendukung hal tersebut kegiatan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK adalah operasi tumbuhan dan satwa liar dan operasi pengamanan hutan. Operasi tersebut dilakukan baik oleh satker Ditjen Gakkum maupun operasi gabungan dengan Balai KSDA, BPHP dan KPH. Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK terkait pengamanan dan penegakan hukum LHK, Balai Ditjen Gakkum LHK juga terlibat dalam mencapai target RB Tematik. Kegiatan yang dilakukan oleh balai Ditjen Gakkum LHK antara lain operasi TSL gabungan bersama dengan Balai BKSA, mengingat pelaksanaan kegiatan represif/operasi TSL menjadi kewenangan Ditjen Gakkum LHK dan juga mempermudah tindak lanjut hasil pelaksanaan operasi TSL berupa penyidikan oleh PPNS Ditjen Gakkum LHK. Dalam mencapai target investasi bidang pemanfaaatan hutan balai Ditjen Gakkum LHK memberikan dukungan tenaga polisi kehutanan, SPORC dan penyidik (PPNS) dalam penyelesaian permasalahan tenurial terkait kawasan hutan.

Transformasi Digital

Transformasi Digital Ditjen Gakkum LHK: Penegakan Hukum LHK Berbasis Sains dan Teknologi

Sejak tahun 2018 Ditjen Gakkum LHK membangun **Center of Intelligence (CoI) untuk menjawab tantangan penegakan hukum LHK yang kompleks, lintas batas, terorganisir sehingga mengancam** keberlangsungan hidup manusia dan alam serta mengakibatkan kerugian negara. CoI melaksanakan fungsi (1) sistem big data, (2)memfasilitasi kolaborasi dan pusat pembelajaran bagi aparat Gakkum LHK maupun bagi mitra kerja lainnya, (3)pusat manajemen pengetahuan, serta sebagai (4)pusat komando untuk penanganan kasus-kasus penting. Keberadaan CoI ditargetkan memperkuat upaya penegakan hukum LHK agar dapat melayani publik secara inovatif, profesional, responsif, dan berintegritas. Dengan demikian kualitas penanganan kasus semakin baik dan dapat menyasar mastermind kejahatan LHK untuk menimbulkan efek jera serta membangun budaya ketaatan

Kegiatan CoI meliputi Akuisisi Data, Analisa, Layanan data, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan. Selain itu CoI juga berperan dalam interopera bilitas sistem informasi, infrastruktur IT, jaringan, dan fasilitas IT lainnya di lingkup Ditjen Gakkum LHK. Dengan demikian, CoI juga berperan ganda sebagai motor transformasi digital di Ditjen Gakkum LHK. Pada tahun 2023 CoI telah memasuki tahapan operasional dan otomatisasi dimana dilakukan beberapa kegiatan penting dalam pemanfaatan sainstek untuk mendukung penegakan hukum LHK:

- Pemanfaatan teknologi baru ditingkatkan, utamanya pemanfaatan AI dan IoT. Saat ini pemanfaatan AI dilakukan melalui monitoring kejahatan LHK dengan *intelligence media monitoring*, pemantauan titik panas dan bukaan lahan di kawasan hutan dengan GeoAI, dan pelaporan harian hotspot di wilayah konsesi melalui *dashboard* interaktif. Pemanfaatan GeoAI dan teknologi spasial lainnya juga dilakukan untuk tipologi kejahatan lainnya seperti permasalahan pencemaran udara Jabodetabek pada tahun 2023 ini. Dengan teknologi spasial yang ada dilakukan pemantauan dan identifikasi sumber-sumber pencemar udara untuk kemudian menjadi data dukung pelaksanaan penegakan hukum LHK selanjutnya seperti pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum pidana.

- Penguatan kolaborasi antar instansi untuk pemutakhiran sistem interkoneksi dan pengembangan database. Dengan kekuatan data dan informasi yang komprehensif dan akurat yang berasal dari internal Ditjen Gakkum LHK, KLHK, maupun Kementerian/Lembaga maupun instansi lainnya, upaya penegakan hukum dapat semakin diperkuat dampak dan efek jeranya. Hal ini terutama membantu upaya penegakan hukum LHK misalnya dalam upaya penyusunan gugatan, pemeriksaan saksi, pengembangan kasus, penelusuran asset yang berdampak pada ekseskusi perdata maupun untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2023 CoI secara intensif telah memanfaatkan data dan informasi dari mitra-mitra kerja sama strategis dalam pertukaran data dan informasi melalui sistem informasi seperti akses data kependudukan pada sistem Dukcapil Kemendagri serta data administrasi badan usaha pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

- Replikasi Intelligence Center di kantor pusat telah dilakukan pada 4 kantor UPT Ditjen Gakkum LHK, yakni di Pontianak, Palembang, Pekanbaru, Surabaya. Saat ini CoI daerah bertugas sebagai perpanjangan tangan layanan CoI pusat dengan fungsi akuisisi, analisis dan layanan data dan informasi, sedangkan fungsi pengembangan sistem maupun forensik digital masih terpusat. Pada tahun 2024 direncanakan dilakukan Pembangunan Intelligence Center di Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi di Kota Makassar. Pada tahun 2023 telah dilakukan persiapan ruangan maupun penyiapan SDM untuk Pembangunan CoI pertama di wilayah timur Indonesia ini. Apabila tersedia sumber-sumber pendanaan dan kesiapan infrastruktur dan SDM di UPT daerah, CoI direncanakan dapat beroperasi pada setiap balai/seksi wilayah Ditjen Gakkum LHK.

- Secara infrastruktur pada tahun 2023 CoI telah memperkuat infrastruktur berbasis teknologi informasi yang dikelola *inhouse* dengan penguatan keamanan sistem dan jaringan, pembaruan peralatan komputasi, pembaruan lisensi-lisensi terkait keamanan informasi maupun pengolahan data, serta pembaruan dan penambahan kapasitas server untuk menjamin operasionalisasi berbagai sistem dan informasi yang dikelola CoI.

- CoI yang dikelola secara *inhouse* juga membutuhkan tenaga-tenaga ASN yang andal dan cakap dalam mengelola peralatan maupun sistem informasi. sebagai upaya penguatan dan keberlanjutan CoI. Pada tahun 2023 dilakukan sekitar 9 pelatihan secara intensif penguatan SDM pengelola CoI maupun SDM terkait lainnya (seperti

pranata komputer, PPNS, PPLH, SPORC yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya).

Beberapa pelatihan yang dilakukan CoI pada tahun 2023 antara lain:

No	Nama Pelatihan	Tanggal	Peserta	Keterangan
1	Pengayaan dasar Open Source Intelligence	09 Februari 2023	100 orang (jumlah peserta hybrid)	terbuka bagi seluruh jajaran Ditjen Gakkum LHK
2	Environmental and Forestry Law 101	30 Maret 2023	100 orang (Terbuka bagi seluruh jajaran Ditjen Gakkum LHK)	Terbuka bagi seluruh jajaran Ditjen Gakkum LHK
3	Peningkatan Kapasitas Pengolahan Mapping Drone dan Aplikasi Pix4dMapper	10 dan 13 Maret 2023	Tim CoI di Kantor Pusat	Pelatihan untuk pengolahan foto-foto drone menjadi peta
4	Peningkatan Kapasitas Pengelola Intlegence Centre	26-27 Juni 2023	Tim CoI di Kantor Pusat dan UPT	Penguatan kemampuan Tim CoI dalam dukungan Gakkum LHK
5	Pengolahan data dan informasi dengan aplikasi analisis dan visualisasi data	10 November 2023	Tim CoI di Kantor Pusat dan UPT	
6	Peningkatan Kapasitas Esri Experience Builder	09 November 2023	Tim CoI di Kantor Pusat dan UPT	Pelatihan pemanfaatan dashboard interaktif
7	Pelatihan forensic digital dengan oxygen forensic	30 Oktober – 11 November 2023	2 Orang	
8	Pelatihan data analytic by daring	21 November 2023 – 31 Januari 2024	Tim Data CoI dan Pranata Komputer lingkup Ditjen Gakkum LHK	Pelatihan pengolahan database dengan sql, python dan tableau

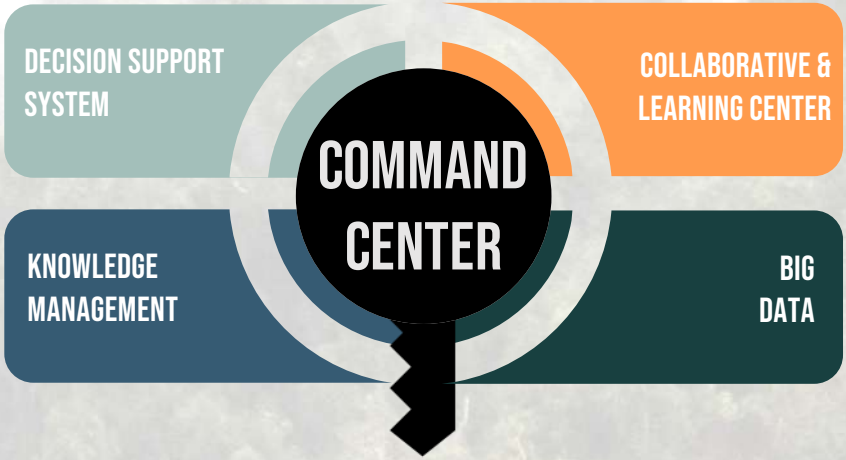

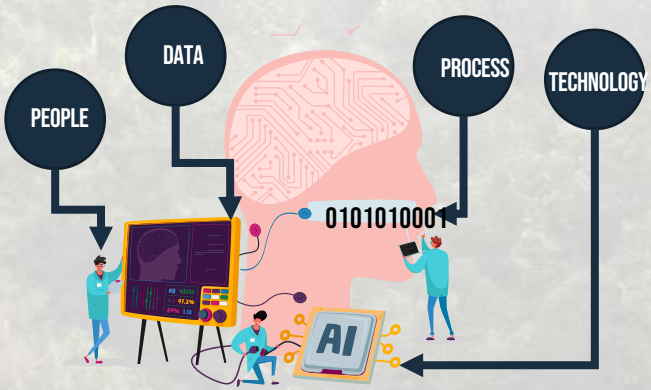

UPAYA HUKUM
DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2023

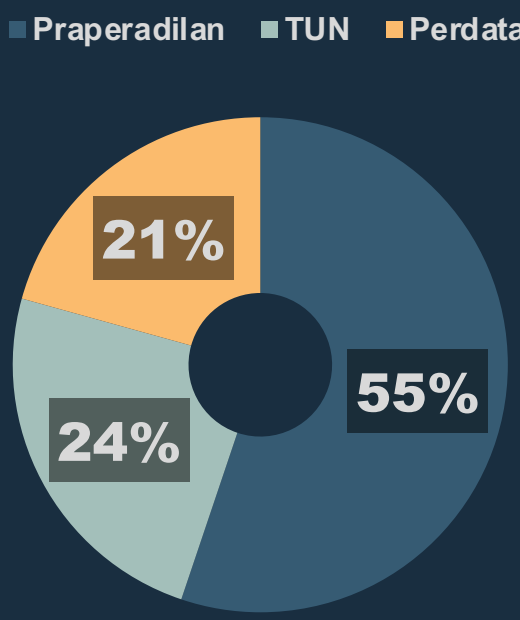

Sepanjang tahun 2023, Ditjen Gakkum LHK tercatat melakukan 30 upaya hukum yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Upaya hukum tersebut dilakukan untuk menghadapi permohonan praperadilan, gugatan perdtaa maupun gugatan TUN. Upaya hukum yang paling banyak dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK adalah upaya hukum untuk menghadapi permohonan praperadilan dengan persentase sebesar 55%.

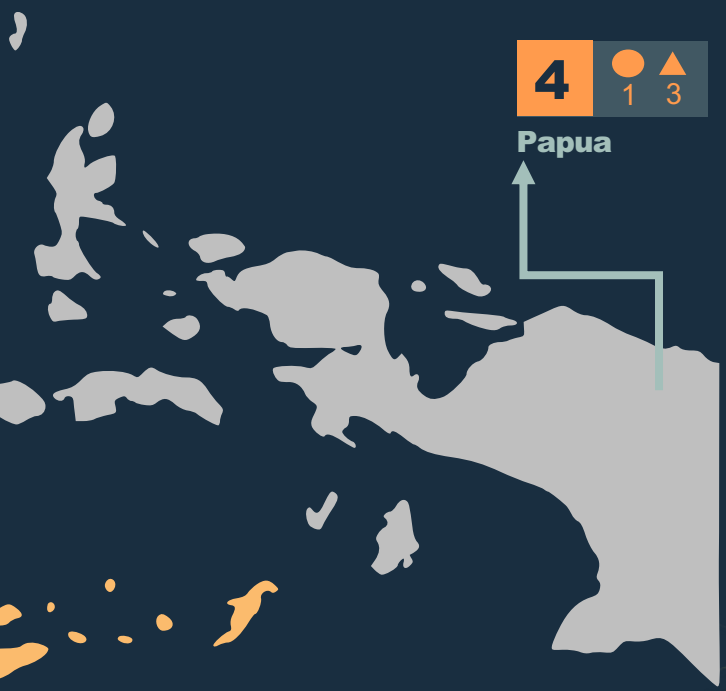

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi kerangka bersama *stakeholders* untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia mengacu pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017, yang selanjutnya diperbaharui melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB global Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Pelaksanaan TPB/SDGs di Ditjen Gakkum LHK pada prinsipnya adalah upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada. Secara garis besar, kontribusi Ditjen PHLHK dalam mendukung TPB/SDGs berada pada 6 tujuan, yaitu Tujuan 5 Kesetaraan Gender, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Pelaksanaan Tujuan 5 terkait Kesetaraan Gender dapat terlihat dari pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat memberikan akses dan partisipasi bagi laki-laki maupun perempuan untuk melaporkan kejadian kejahatan LHK melalui kanal pengaduan LHK, kesetaraan penegakan hukum baik perempuan maupun laki-laki, baik individu maupun badan usaha. Berdasarkan kerja-kerja konsisten Ditjen Gakkum LHK, di Tahun 2019 Ditjen Gakkum LHK mendapatkan penghargaan pada *Asia Environmental Enforcement Awards* oleh UNDP dalam kategori *innovation, integrity* dan *gender leadership.* Pada tahun 2022, Pengawas Lingkungan Hidup Ditjen PHLHK mendapatkan penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards dalam kategori *gender leadership* dan *women's empowerment.*

Pemberian Asia Environmental Awards Tahun 2019 pada Drektur Jendral Gakkum LHK

Pemberian Asia Environmental Awards Tahun 2022 pada Pengawas LH Ditjen Gakkum LHK

Capaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak didapat dari pelaksanaan kegiatan atas kasus – kasus pencemaran air dan tanah yang diselesaikan menggunakan instrumen penerapan Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Perdata.

Di tahun 2023, dalam penerapan Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum telah melakukan pengawasan terhadap pencemaran air dan tanah sebanyak 546 pengawasan. Sanksi administrasi yang diberikat terkait kasus pencemaran air dan tanah sebanyak 59 sanksi administrasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan penanganan kasus hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 16 perkara, dan melakukan fasilitasi dengan POLRI/Kejaksaan sebanyak 11 fasilitasi. Selain itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum perdata melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan total sebanyak 186 perkara dan melalui pengadilan sebanyal 6 gugatan perdata.

Kegiatan pengambilan sampel limbah cair dalam rangka pengawasan lingkungan hidup

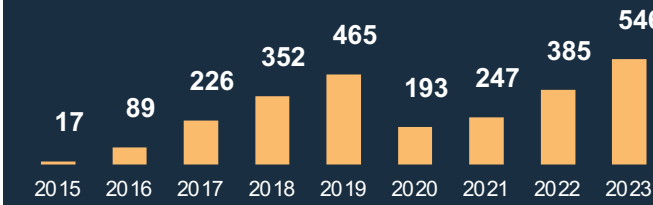

2.520 Pengawasan

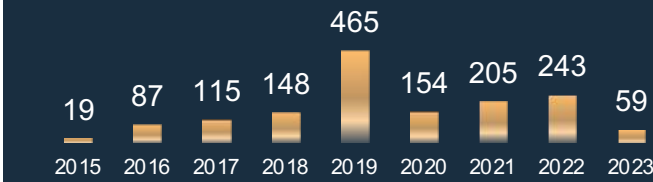

1.494 Sanksi Administatif

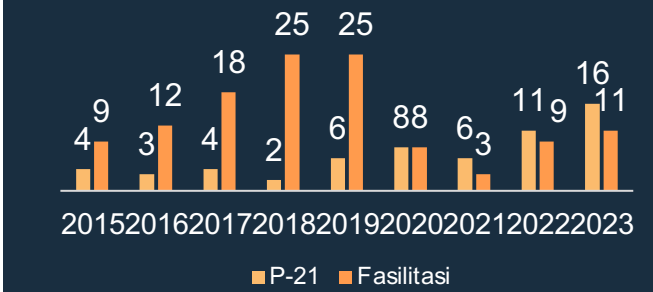

60 Pidana (P-21) Pencemaran

120 Fasilitasi Perkara Pencemaran

186 PSLH di Luar Pengadilan

6 Gugatan Perdata

Capaian Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau TPB/SDGs Ditjen Gakkum LHK didapat dari pelaksanaan meningkatnya budaya taat hukum pelaku usaha bidang energi. Di tahun 2023, badan usaha bidang energi yang telah diawasi sebanyak 19 badan usaha, penerapan sanksi administratif terhadap badan usaha bidang energi sebanyak 4 sanksi administrasi.

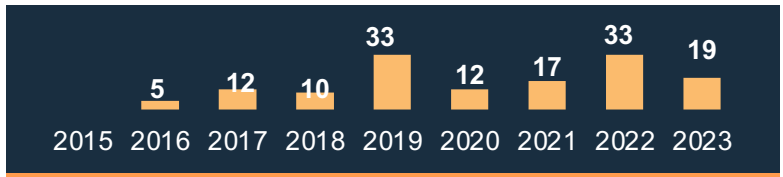

141 Pengawasan Badan Usaha

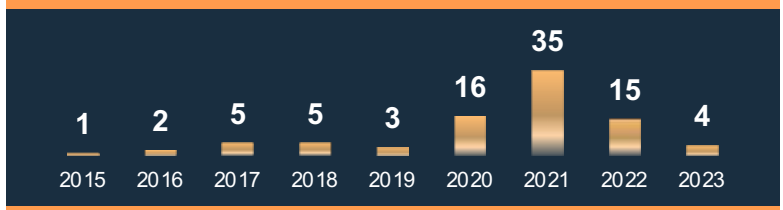

86 Sanksi Administatif

Pelaksanaan capaian Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Ditjen Gakkum LHK dilakukan untuk memastikan adanya efek jera bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan.

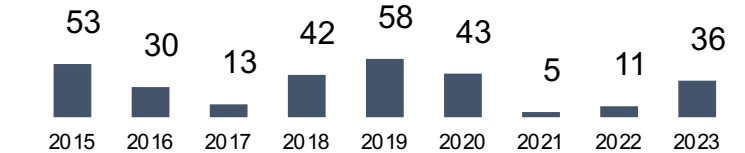

291 Pengawasan Badan Usaha

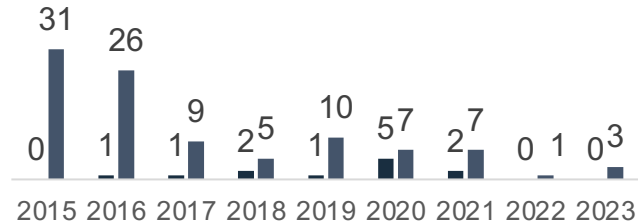

12 Pidana (P-21) Karhutla

99 Fasilitasi Perkara Karhutla

13	Inkracht	3	Proses Persidangan
6	Upaya Hukum		

Perdata Melalui Pengadilan

Di tahun 2023, kegiatan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan sebanyak 36 pengawasan, penanganan kasus hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 0 perkara, fasilitasi kebakaran hutan dan lahan dengan POLRI/Kejaksaan sebanyak 3 fasilitasi dan penegakan hukum perdata yang telah dilaksanakan antara lain 22 perkara melalui pengadilan.

Capaian Tujuan 14 Ekosistem Lautan TPB/SDGs Ditjen Gakkum LHK dilakukan dengan memastikan kasus – kasus perusakan ekosistem laut yang diselesaikan. Penanganan kasus hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) pada perkara kerusakan lingkungan sebanyak 4 perkara, fasilitasi yang dilakukan dengan POLRI/Kejaksaan sebanyak 10 fasilitasi, penanganan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan lautan sebanyak 2 perkara dan gugatan perdata yang dilakukan terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan laut sebanyak 2 gugatan.

Pengecekan terumbu karang yang rusak di TN Karimunjawa

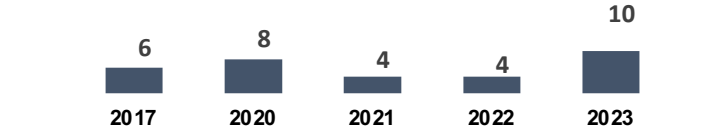

32 Fasilitasi Perkara Kerusakan Lingkungan

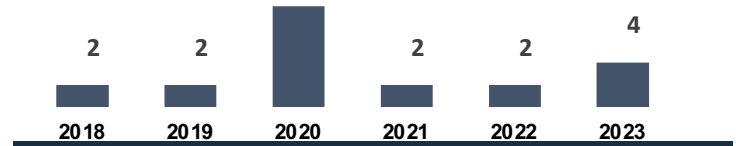

21 Pidana (P-21) Perusakan Llingkungan di Pesisir dan Laut

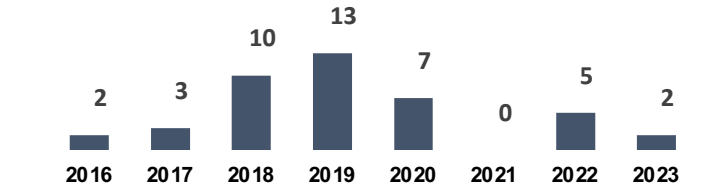

42 PSLH Luar Pengadilan Perkara Kerusakan Lingkungan di Pesisir dan Laut

2 Gugatan Perdata Kerusakan Llingkungan Pesisir dan Laut

Capaian Tujuan 15 Ekosistem Daratan TPB/SDGs Ditjen Gakkum LHK dilakukan dengan memastikan kawasan hutan aman dari kejahatan kehutanan melalui penegakan hukum. Di tahun 2023, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 31 operasi. Dengan pelaksanaan operasi tersebut, jumlah satwa yang berhasil ditemukan sebanyak 8.248 ekor satwa dan 2.487 bagian tubuh satwa. Tindak lanjut dari kegiatan operasi tersebut, kasus yang ditangani hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 45 perkara. Selain operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar,

dilakukan juga operasi pembalakan liar (*illegal logging*) sebanyak 66 operasi dengan kayu sitaan sebanyak 193.001 m^3, dari operasi tersebut selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dan penanganan kasus hingga berkas tersebut dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 75 perkara. Kegiatan fasilitasi Kepolisian dan Jaksa total sebanyak 10 fasilitasi.

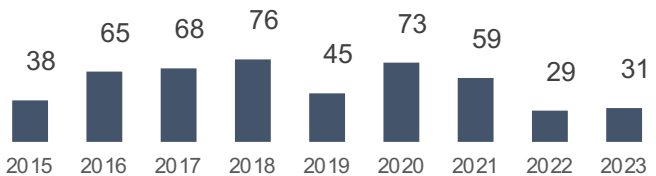

484 Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

248.145 Total Ekor Satwa
18.536 Total Bagian Tubuh Satwa

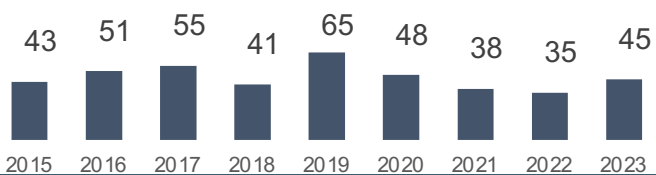

421 Pidana (P-21) Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

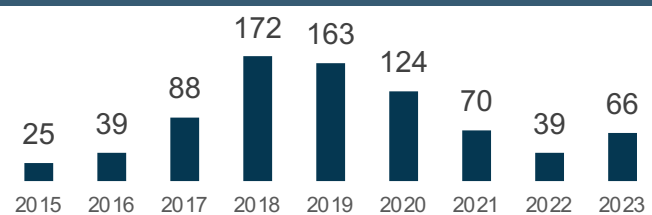

786 Operasi Pembalakan Liar

1.003.446,16 m^3
Total Kayu Sitaan

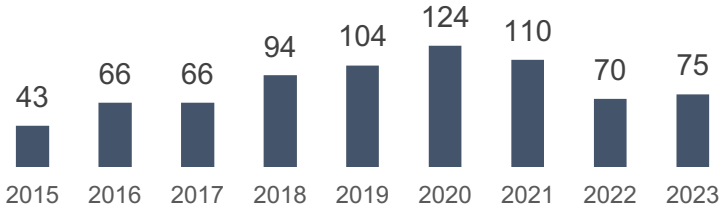

752 Pidana (P-21) Pembalakan Liar

10 Kasus Fasilitasi POLRI & Kejaksaan

Kegiatan Operasi Pembalakan Liar dengan temuan log kayu

Pelaksanaan *Roadmap* Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Gakkum LHK di tahun 2023, Sub Pokja Ditjen Gakkum LHK telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Penegakan Hukum LHK. Tujuan dari pelaksanaan peningkatan kapasitas ini yaitu untuk mengimplementasikan *practical gender concern* dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran di Ditjen Gakkum LHK dan agar mampu membuat *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Kegiatan ini merupakan tahapan terakhir dari milestone kegiatan peningkatan kapasitas yang diawali dengan Pembentukan Koordinator Fasilitator yang memiliki tugas untuk melakukan fasilitasi Peningkatan Kapasitas PUG bidang Penegakan Hukum LHK baik di unit kerja pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di Balai Penegakan Hukum LHK.

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 5 – 6 Juli 2023 di Yogyakarta dengan metode *on class room* dan *benchmarking study* ke Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Hutan Wonosadi, Gunung Kidul, DIY. Peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ini berjumlah 42 peserta dengan jumlah perempuan 22 orang dan laki– laki 20 orang.

Agenda kegiatan *on classroom* dilaksanakan yaitu praktik penyusunan lembar kerja GAP. GAP ini merupakan alat bantu analisis yang berisi langkah – langkah sistematis untuk menemukan isu gender da merumuskan langkah strategis dalam menyelesaikannya. Selanjutnya praktik menyusun dokumen GBS yang penyusunannya melalui transformasi hasil analisis GAP ke dalam GBS.

Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan A/P/K/M	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender

Lembar Kerja GAP

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L	:	(Nama Kementerian Negara/ Lembaga)	
Unit Organisasi	:	(Nama Unit Eselon I sebagai KPA)	
Unit Eselon II/ Satker	:	(Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat/ Nama Satker di Pusat	
Program	Tuliskan Nama Program, kegiatan, IKK, Output kegiatan		
Tujuan Program	Tuliskan tujuan program sesuai yang diisikan pada GAP		
Capaian Program	Indikator capaian program diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja K/L		
Kegiatan	Tuliskan nama kegiatan sesuai dengan isian dari GAP		
Tujuan kegiatan	Tuliskan tujuan kegiatan sesuai dengan isian dari GAP		
Kode Rekening Kegiatan	Isikan kode rekening		
Analisis Situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani melalui kegiatan yang menghasilkan output. Berisi tentang: • **Data Pembuka Wawasan** sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-2 (analisis situasi) • **Faktor Kesenjangan** Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat, sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-3 • **Sebab Kesenjangan internal** sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-4 • **Sebab Kesenjangan eksternal** sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-5		
Perencana Kegiatan	Rencana Aksi	(isikan langka GAP ke 7) (kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)	
		Tujuan	isikan langkah GAP ke 6
		Aktivitas	Isikan jabaran langkah GAP ke 7 yang mampu menjawab permasalahan gender yang telah teridentifikasi pada langkah ke 3, 4, dan 5
		Sumber daya	Dana
			SDM mencakup Panitia, Fasilitator dan peserta kegiatan (dipilah menurut jenis kelamin
		Indikator Output	Sarana dan prasarana: Ambil dari langkah GAP ke-9, dihubungkan dengan barang dan jasa/ pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan K/L
Alokasi sumber daya	Dana	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan	
	SDM	Jumlah SDM yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan, baik SDM sebagai nara sumber/ fasilitator, panitia kegiatan maupun peserta program/ kegiatan (dipilah menurut jenis kelamin)	
	Sarana dan prasarana	Peralatan yang dibutuhkan untuk pencapaian output kegiatan	
Dampak/ manfaat (outcome)		Ambil dari langkah GAP ke-9, dihubungkan dengan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program K/L. Dampak program harus berkontribusi terhadap penurunan/penghapusan kesenjangan gender dalam bidang pembangunan.	

Form GBS

Kegiatan *benchmarking study* dilakukan untuk mengetahui penerapan PUG di instansi lain dan mengetahui peran perempuan dalam menjaga hutan di Hutan Wonosadi, DIY. Berdasarkan hasil benchmarking study ke Dinas Kesehatan DIY didapatkan bahwa pelaksanaan PUG sudah sampai ke tahap implementasi dari PPRG. Kebijakan PPRG di Dinas Kesehatan DIY sudah dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian Dinas Kesehatan DIY dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY. Selain itu, perencanaan yang disusun di Dinas Kesehatan DIY secara konsisten dan berkomitmen untuk mengawal PPRG melalui aplikasi Dinkesplan, serta ada kegiatan pendampimgan PPRG untuk setiap Eselon IV lingkup Dinas Kesehatan DIY baik di induk maupun UPT untuk menyusun dokumen GAP dan GBS.

Kegiatan benchmarking study ke Dinas Kesehatan DIY

Kegiatan *benchmarking study* di Hutan Wonosadi merupakan implementasi kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Desa Beji dalam pengelolaan hutan yang menghasilkan dampak positif terhadap keberlanjutan ekosistem hutan. Masyarakat Desa Beji memanfaatkan lahan di sekitar hutan untuk bercocok tanam dengan pola *agroforestry*.

Kegiatan benchmarking study ke Hutan Wonosadi

Perjalanan menuju Hutan Wonosadi, Gunung Kidul DIY

Hal menarik dari Hutan Wonosadi selain keindahan alamnya yaitu aktivitas pengelolaan dan perlindungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengelolaan Hutan Wonosadi dilakukan secara bersama – sama baik oleh laki – laki maupun perempuan. Pembagian tugas ini diharapkan dapat tercipta keseimbangan pembagian peran antara laki – laki dan perempuan sehingga peran perempuan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan terlihat nyata. Perempuan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga menepis stereotip bahwa perempuan hanya cocok bekerja di ranah domestic. Pembagian tugasnya antara lain yaitu untuk kegiatan patroli hutan, menyiapkan lahan tanam dan membuat lubang tanam dilakukan oleh Jagawana laki – laki, sementara kegiatan menanam, menyiangi, mengairi dan membersihkan lahan dilakukan oleh Jagawana perempuan. Sejarah terbentuknya Jagawana berawal dari kerusakan Hutan Wonosadi akibat *illegal logging.* Oleh sebab itu, tokoh masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah untuk melestarikan hutan kembali dan terhindar dari *illegal logging*.

Jagawana perempuan diawali oleh Ibu Sri Hartini sebagai penggerak utama untuk konsisten melakukan pengelolaan hutan dan mengajarkan cinta alam pada generasi muda di lingkungan sekitar hutan. Adapun peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan hutan seperti pemberian bibit buah – buahan dan tanaman obat yang kemudian kegiatan penanamannya dilakukan di area hutan tanaman tanaman Kelompok Pengelolaan Keanekaragaman Hayati oleh kelompok pengelola Hutan Wonosadi.

Pemaparan oleh Ibu Sri Hartini (kiri) Ketua Jagawana Perempuan Hutan Wonosadi

Peserta Peningkatan Kapasitas PPRG Ditjen Gakkum LHK

Media Sosial

38.544 Pengikut
356 Postingan

23.105 Pengikut
256 Postingan

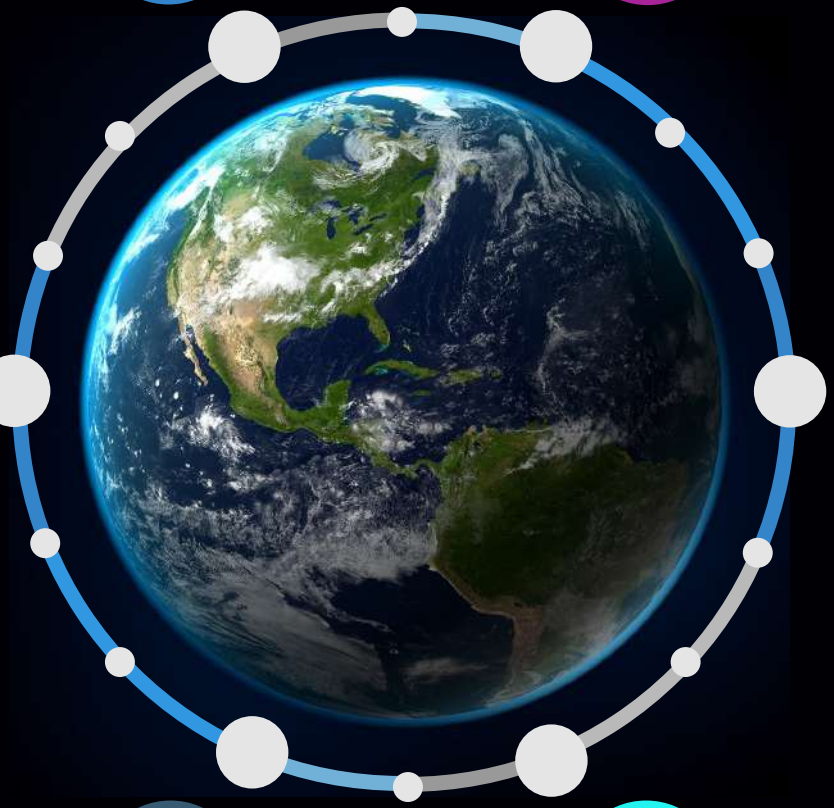

9.545 Pengikut
290 Postingan

3.099 Subscriber
33 Video

150 Berita

391 Pengikut
33 Postingan

MEDIA SOSIAL BALAI
DITJEN GAKKUM LHK

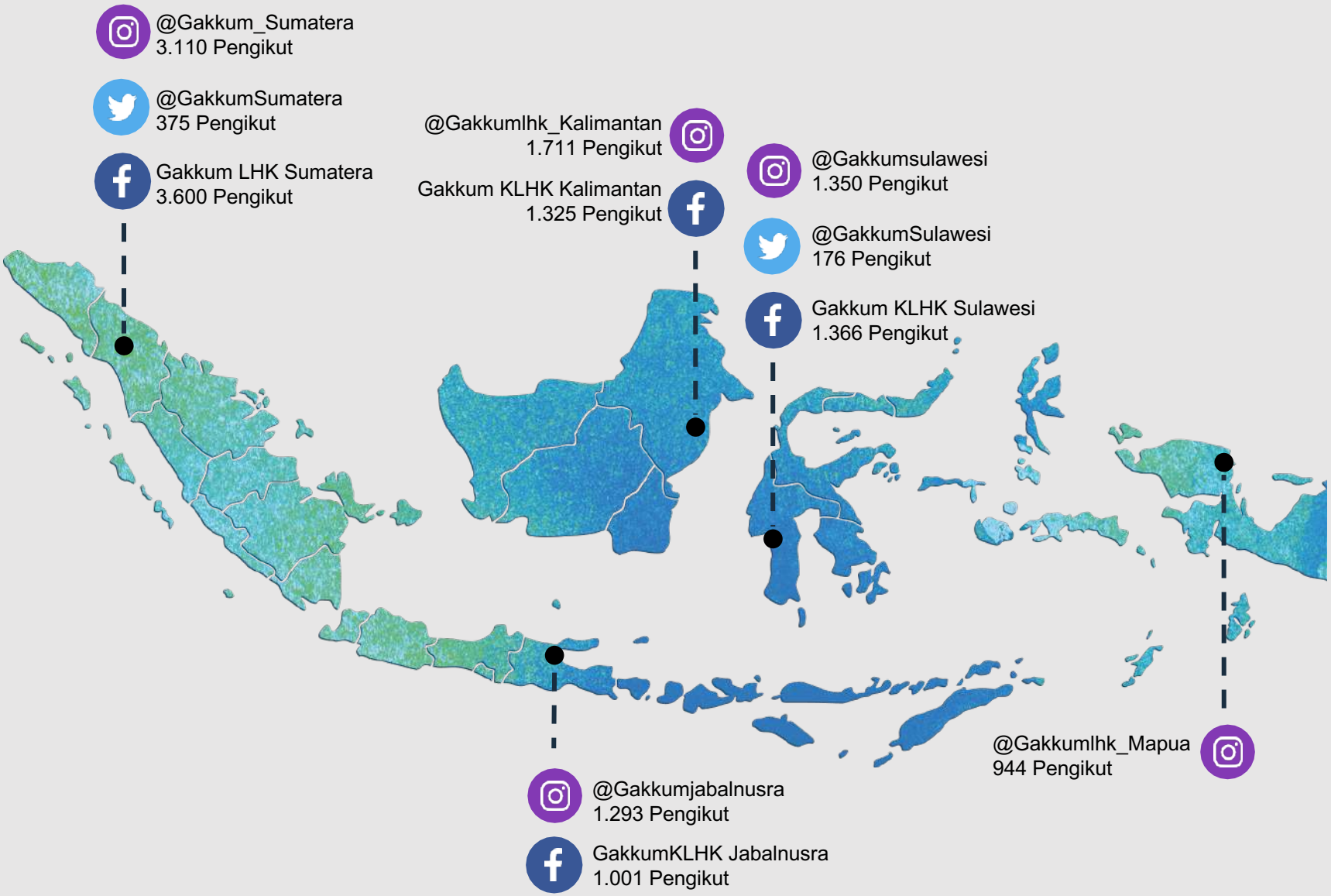

KONTEN MEDIA SOSIAL

Ditjen Gakkum LHK memiliki beberapa media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kinerja yang telah dilakukan. Masing-masing media sosial memiliki fungsi dan target audien yang berbeda, sehingga dalam pengelolaannya memerhatikan audien yang ingin dituju. Fungsi yang berbeda setiap media sosial menjadikan konten yang paling banyak diminati setiap media sosial berbeda-beda. Berikut adalah 3 konten teratas yang paling diminati oleh pengguna media sosial Facebook, Youtube, dan Instagram

FACEBOOK

KLHK Segel Lahan Perkebunan Sawit Perusahaan Singapura

KLHK Kembali Tangkap Dua Pelaku Perambahan Hutan TN Tesso Nilo

Tim Gabungan KLHK– Polri – TNI – Pemda Pelalawan Tertibkan Perambahan

INSTAGRAM

KLHK Segel Lahan Perkebunan Sawit Perusahaan... gakkum_klhk	Boost reel	13,5 rb Reach	685 Likes	20 Comments	46 Shares

Pemberitaan dengan judul KLHK Segel Lahan Perkebunan Sawit Perusahaan Singapura

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementeria... gakkum_klhk	Boost reel	12,3 rb Reach	616 Likes	1 Comments	2 Shares

Kegiatan Penanaman Pohon Serentak di Seluruh Indonesia

Sobat Gakkum, hari ini kita dapat kunjungan dari... gakkum_klhk	Boost reel	10,9 rb Reach	352 Likes	9 Comments	22 Shares

Kunjungan dari SDN 01 Pagi Tanjung Duren Selatan pada Kegiatan Gakkum Festival 2023

YOUTUBE

	Content	Average view duration	Views
1	[LAGU] NUSANTARAKU Jul 19, 2021	2:21 (51.0%)	21,596
2	Berhadapan dengan HARIMAU - Podcast Gakkum #polhut #klhk #penyelamat... Nov 24, 2023	0:38 (63.7%)	10,396
3	Kegiatan Diklat pembentukan Polhut (Diklat reguler) Tahun Anggaran 2022 Oct 20, 2022	0:25 (70.1%)	10,168

Statistik Pemberitaan

Pemberitaan secara online terkait Ditjen Gakkum LHK selama tahun 2023 terdapat 1.055 berita dengan berita terbesar setiap bulannya sebagai berikut:

- **Januari** : Gakkum KLHK serahkan pemodal perusak Taman Nasional Tesso Nilo ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera disidangkan
- **Februari** : WNA Vietnam tersangka penyelundup satwa dilindungi segera disidangkan
- **Maret** : Gakkum KLHK ungkap kasus perdagangan online ilegal satwa dilindungi di Mimika, Papua Tengah
- **April** : Jual beli kulit harimau, mantan Bupati Bener Meriah Aceh divonis 1,5 tahun penjara
- **Mei** : Gakkum KLHK dan Bea Cukai gagalkan penyelundupan 360kg sisik trenggiling di Banjarmasin
- **Juni** : Bongkar sindikat perdagangan satwa illegal di Kalbar, Gakkum KLHK dan tim gabungan tangkap 3 orang tersangka dan sita 57kg sisik trenggiling
- **Juli** : Terlibat perambahan hutan oknum kepala desa ditangkap Gakkum KLHK
- **Agustus** : Operasi gabungan pengamanan kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
- **September** : Awasi polusi udara Jabodetabek, satgas KLHK dan Pemda hentikan kegiatan dan terapkan sanksi hukum berlapis untuk pencemar udara
- **Oktober** : Gakkum KLHK Segel lahan terbakar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
- **November** : Gakkum KLHK tangkap pelaku penyelundupan burung dilindungi 31 kakatua dan1 ekor nuri berhasil diamankan
- **Desember :** Gakkum LHK tangkap para pelaku penambangan emas tanpa izin di Taman Nasional Lore Lindu

Grafik pemberitaan di atas dihitung berdasarkan berapa banyak berita yang disiarkan oleh plaform media online baik nasional maupun regional mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK

PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

Pemberitaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK selain disebarkan melalui media sosial dan website Ditjen Gakkum LHK juga disebarkan melalui media pemberitaan online baik nasional maupun regional. Ditjen Gakkum LHK selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan media online baik nasional dan regional agar kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan dapat terinformasikan kepada masyarakat. Tidak jarang para reporter juga ikut meliput secara langsung di lokasi kejadian di mana kejahatan terjadi.

Selama tahun 2023 telah terdapat 1.055 pemberitaan yang diberitakan oleh media online. Banyak media online baik nasional maupun regional yang ikut memberitakan kegiatan Ditjen Gakkum. Lebih dari 50 media pemberitaan online termasuk media online regional yang turut memberitakan kegiatan Ditjen Gakkum LHK, namun jika dilihat dari media online nasional terdapat 5 media online nasional yang cukup sering memberitakan kegiatan Ditjen Gakkum LHK, antara lain

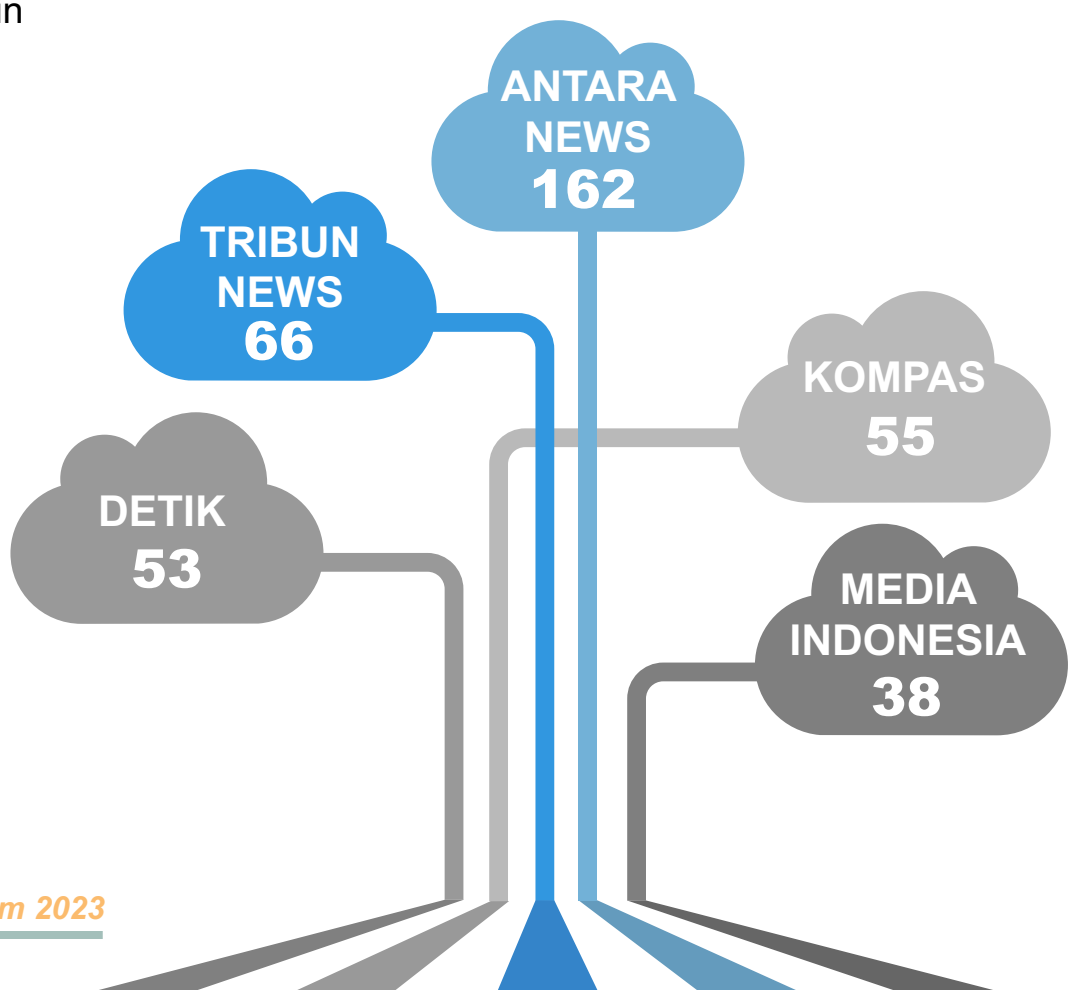

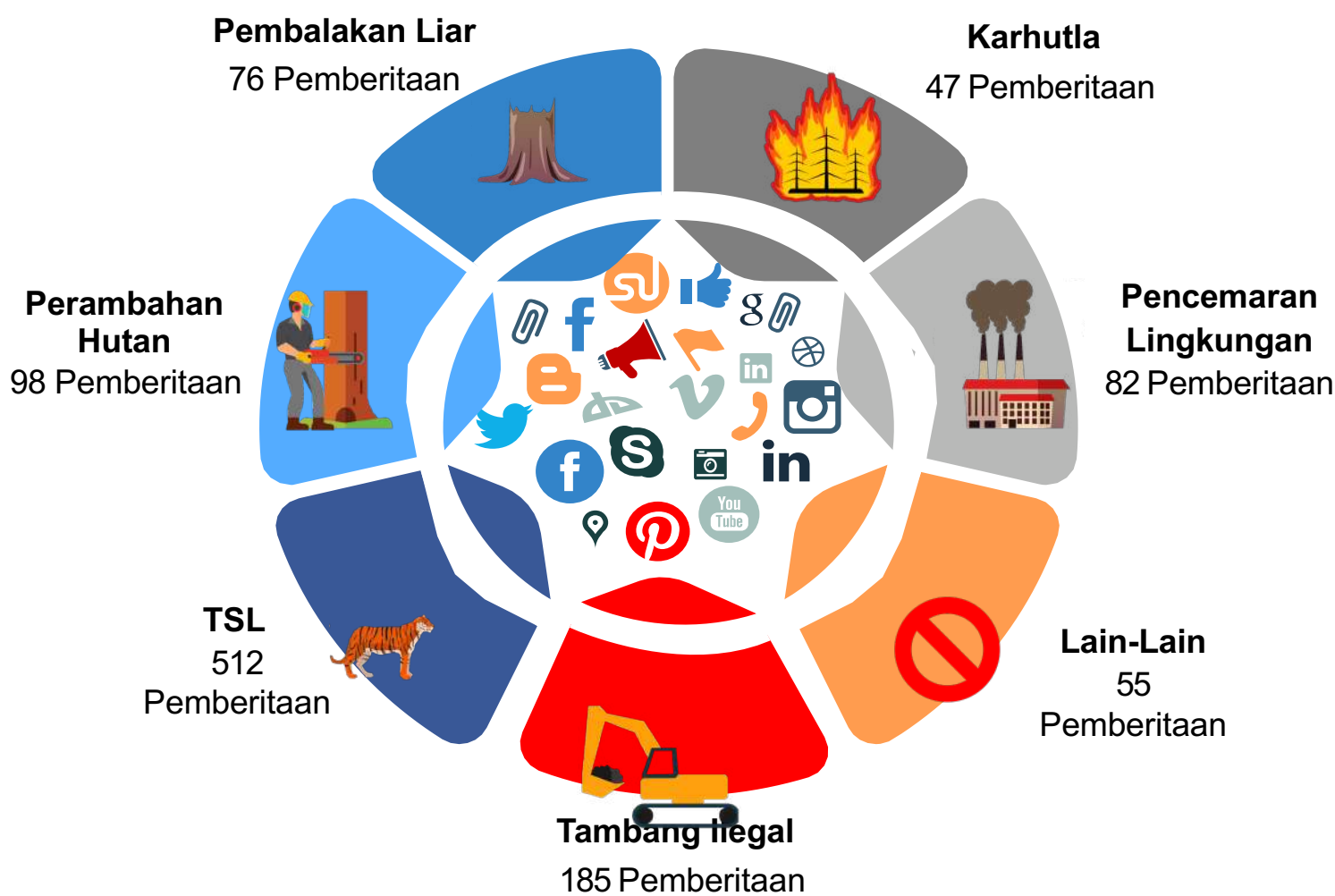

Gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup, kehutanan dan ekosistemnya yang ditangani oleh Ditjen Gakkum LHK dapat dibedakan menjadi beberapa tipologi kejahatan. Banyak kasus-kasus besar yang ditangani oleh Ditjen Gakkum LHK tidak luput dari perhatian baik media nasional maupun regional. Tipologi kejahatan yang diangkat menjadi bahan pemberitaan Ditjen Gakkum LHK dapat dibedakan antara lain perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, kejahatan terhadap TSL dan tambang illegal. Dari beberapa tipologi tersebut yang memperoleh pemberitaan paling banyak sepanjang tahun 2023 adalah pemberitaan terkait kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar.

E. DATA TEMATIK

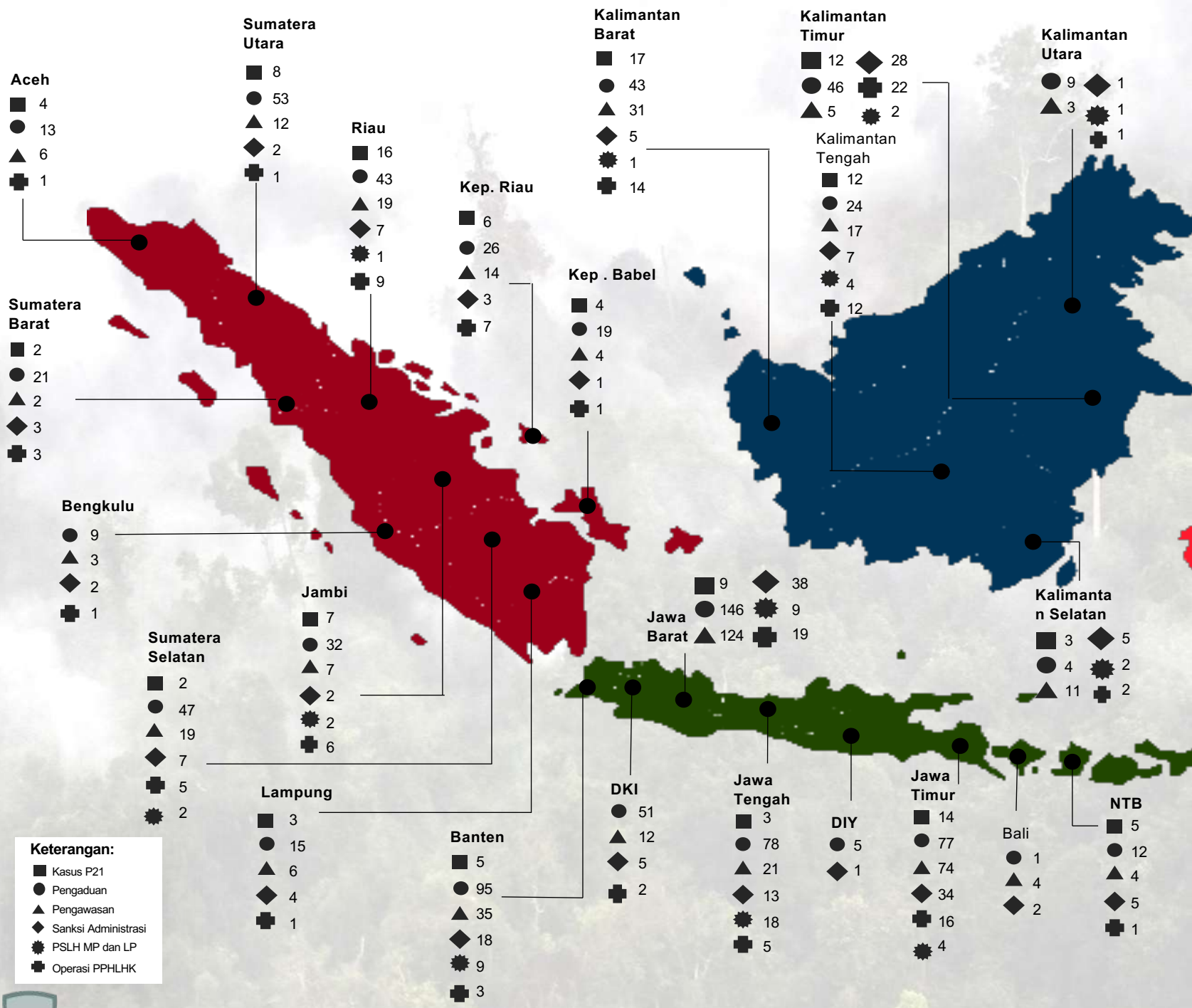

Capaian Kinerja 2023 per Provinsi

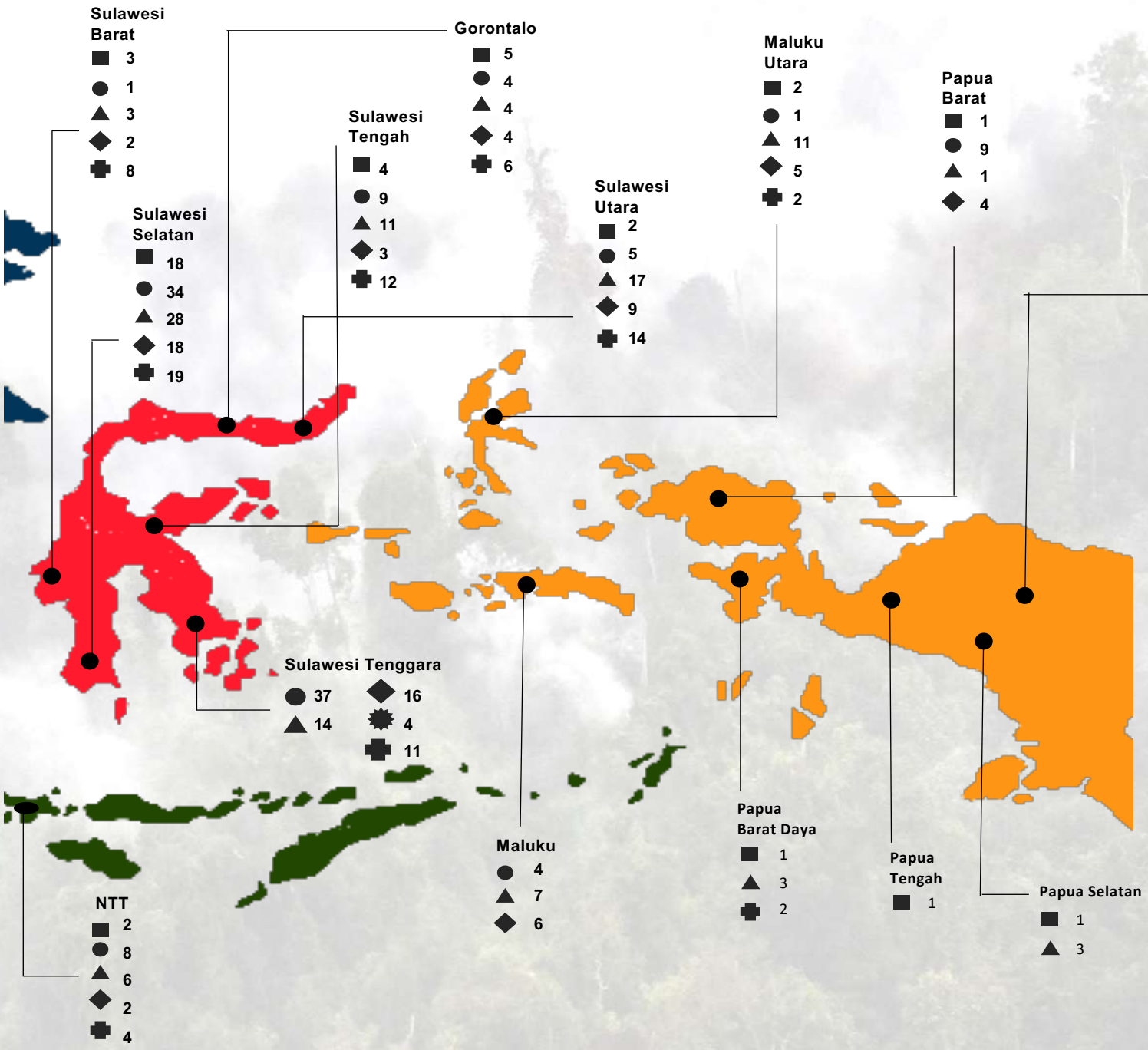

Tipologi: Kebakaran Hutan dan Lahan

1.416 Sanksi Administrasi

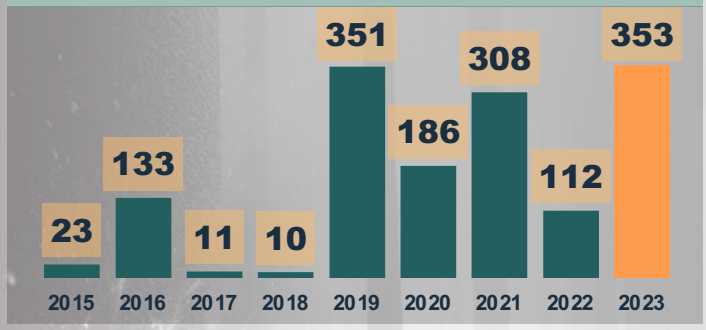

12 Berkas Kasus P-21

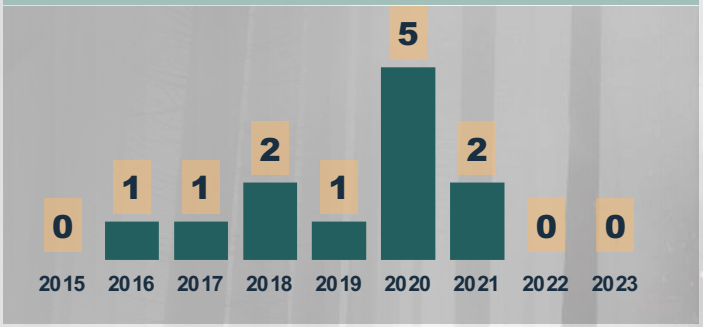

291 Pengawasan Perusahaan

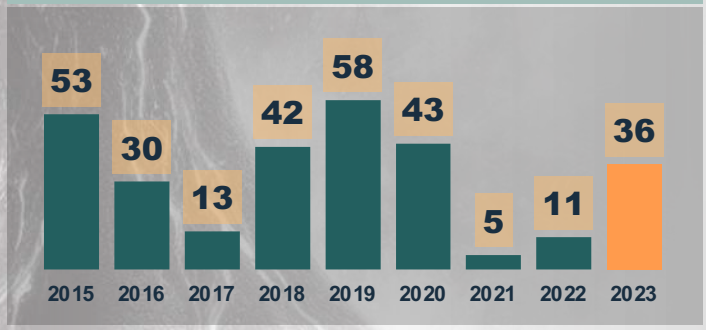

99 Kasus Fasilitasi Polri dan Kejaksaan

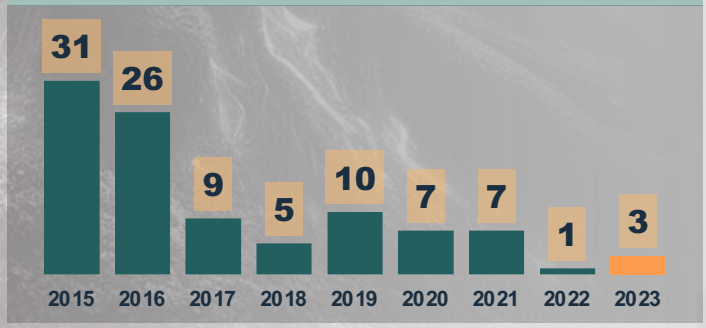

Tipologi: Perambahan Kawasan Hutan

26.574.537 Ha Kawasan Hutan yang Diamankan

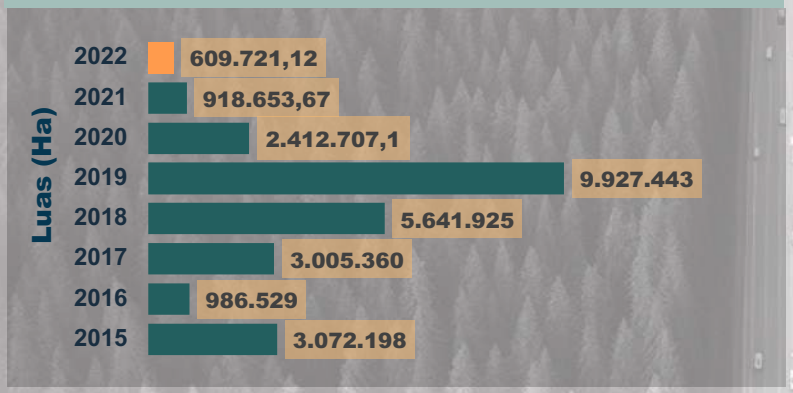

16 Kasus Fasilitasi Polri dan Kejaksaan

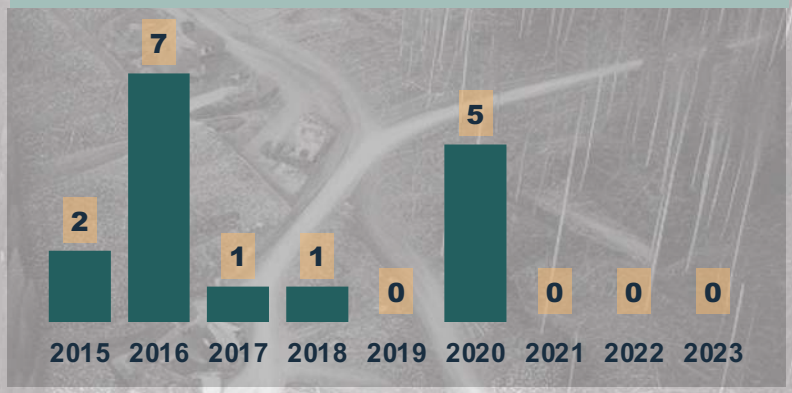

864 Operasi Pemulihan Kawasan Hutan

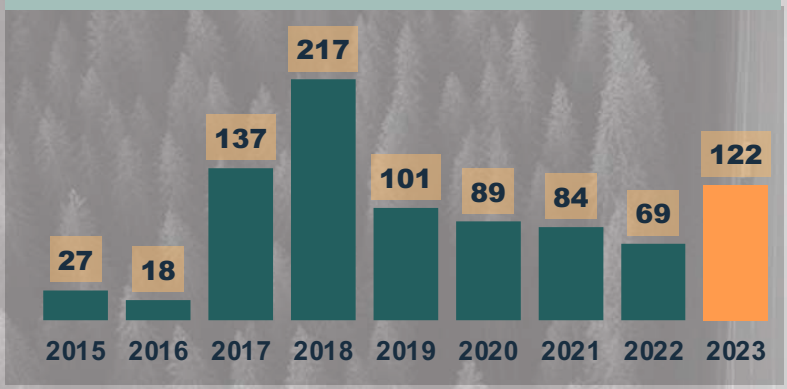

223 Berkas Kasus Dinyatakan Lengkap P-21

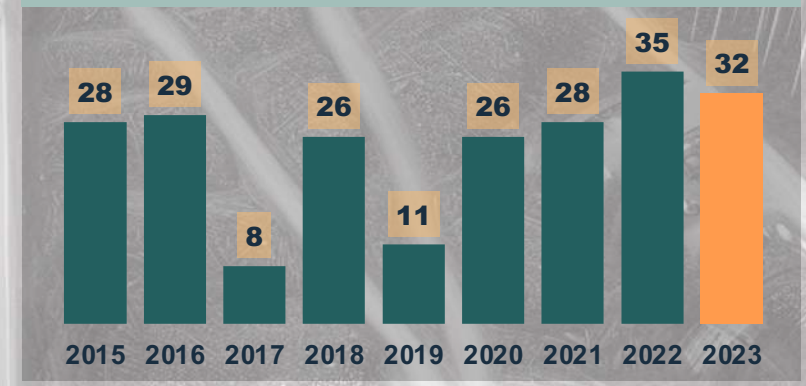

Tipologi: Pencemaran Lingkungan

2392 Pengawasan Perusahaan

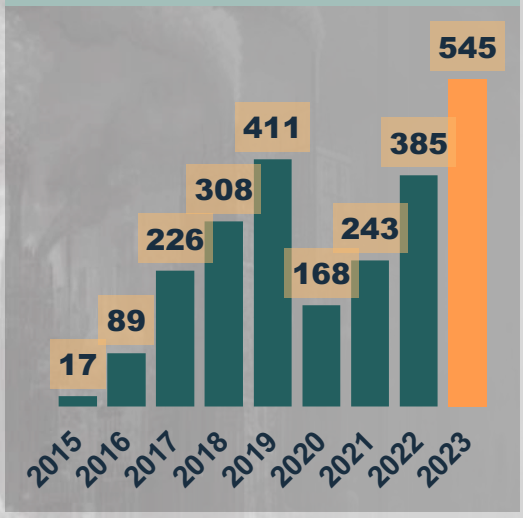

188 Kesepakatan Perdata di Luar Pengadilan

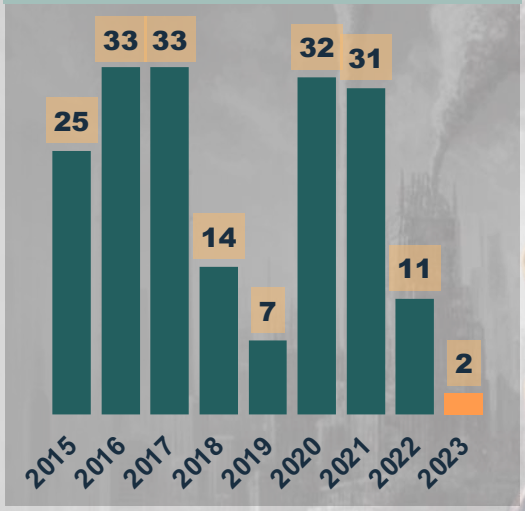

60 Berkas Kasus P-21

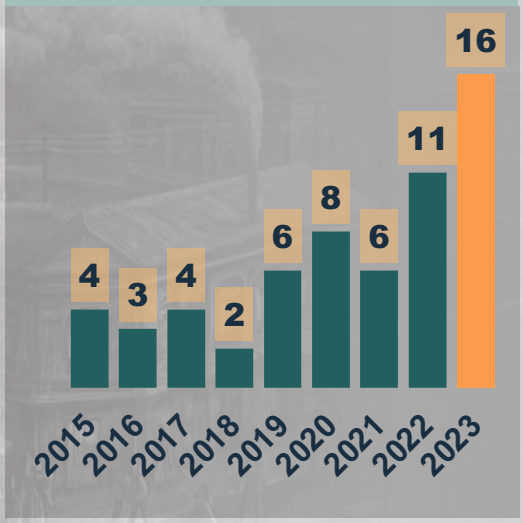

132 Kasus Fasilitasi Polri dan Kejaksaan

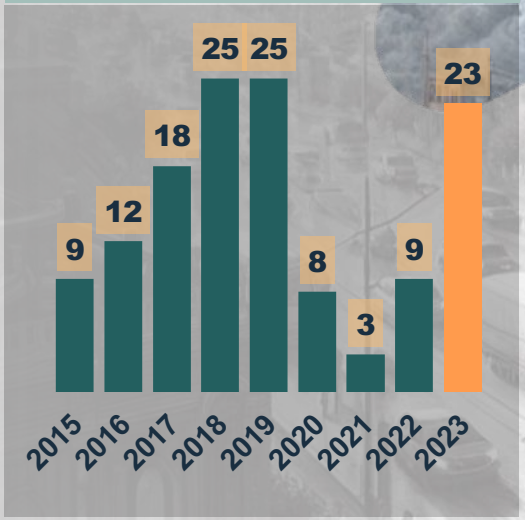

1462 Penerapan Sanksi Administratif

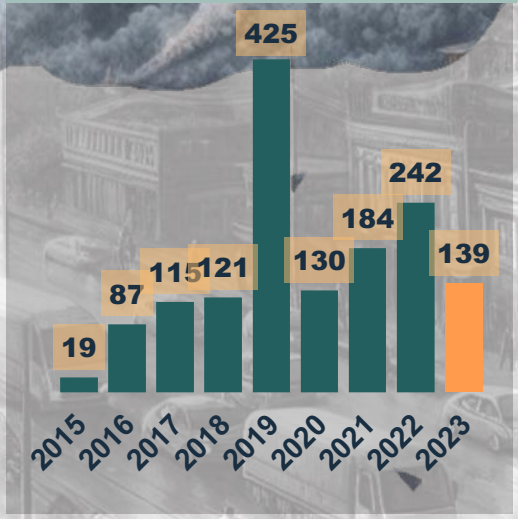

Tipologi: Kerusakan Lingkungan

42
Berkas Kasus P-21

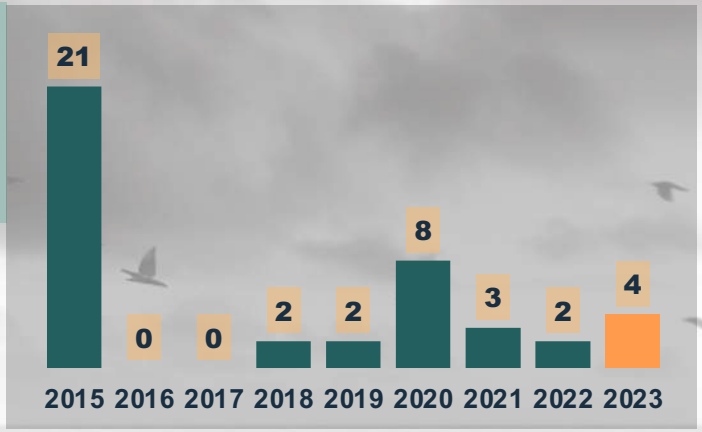

32
Kasus Fasilitasi Polri dan Kejaksaan

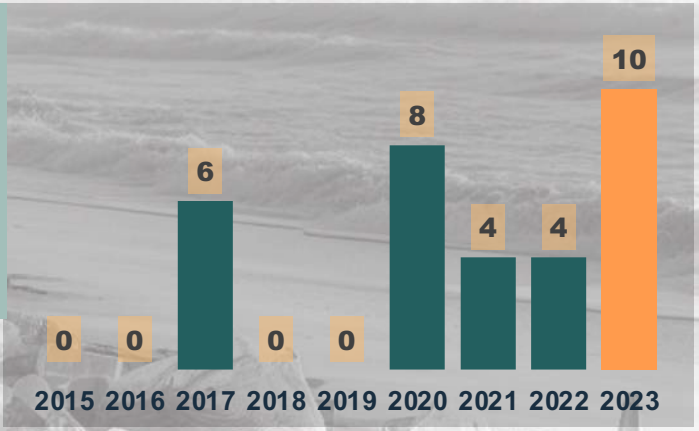

51
Kesepakatan Perdata di Luar Pengadilan

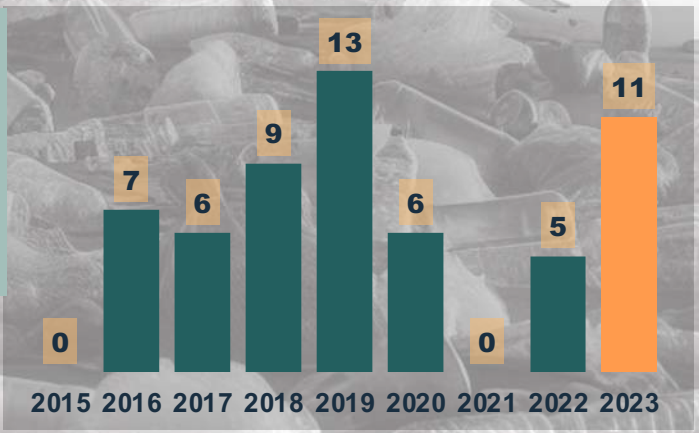

Tipologi: Kejahatan Tumbuhan & Satwa Liar

497 Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

421 Berkas Kasus P-21

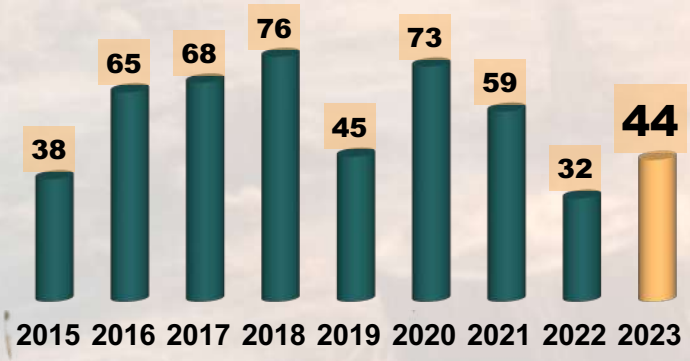

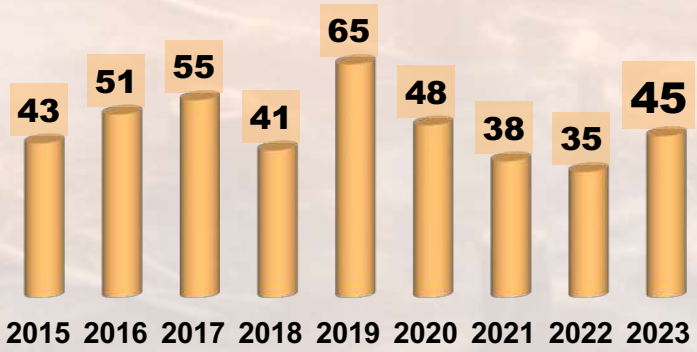

239.904 Ekor Satwa

16.049 Bagian Tubuh

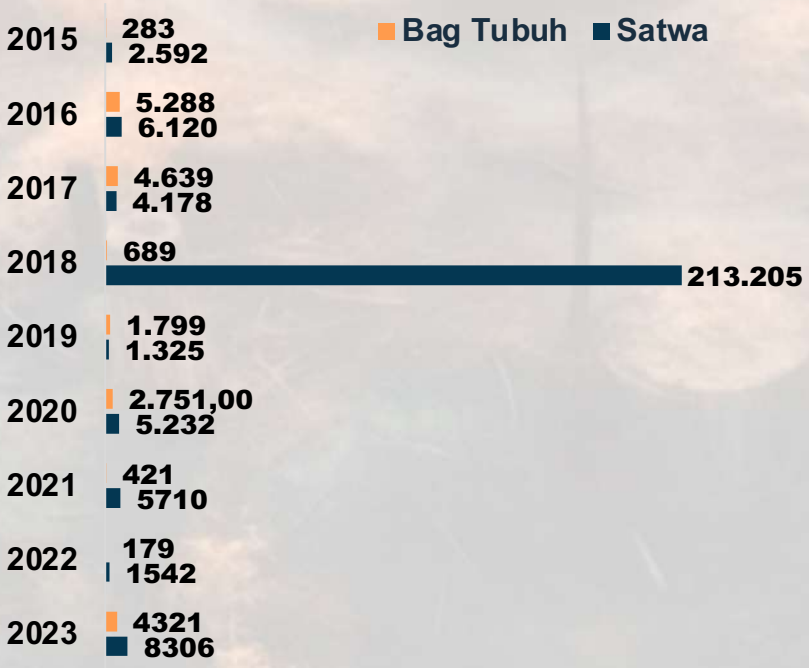

Tipologi: *Illegal Logging*

967.765,72 m³ Total Kayu Sitaan

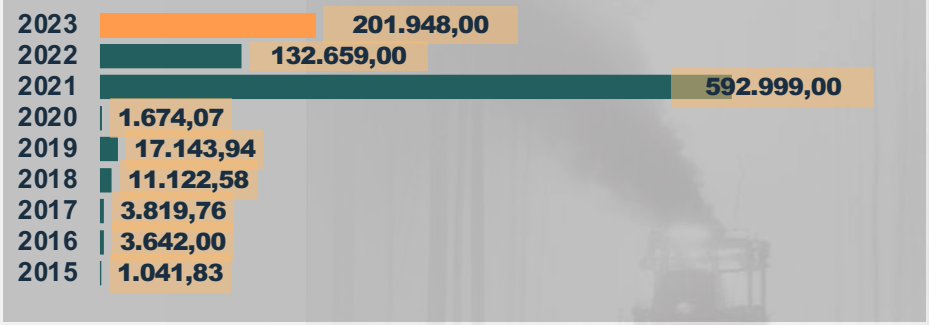

785 Operasi Peredaran Hasil Hutan Kayu

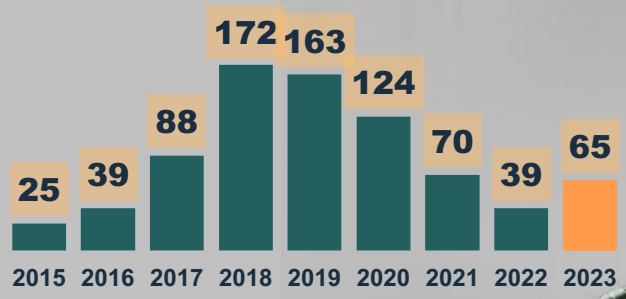

752 Berkas Kasus P-21

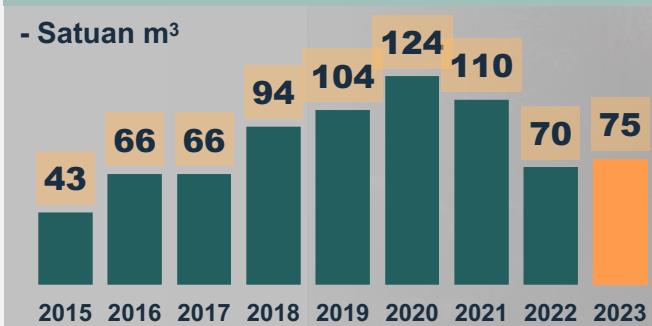

Tipologi: DAS Citarum

112 Pengawasan Perusahaan

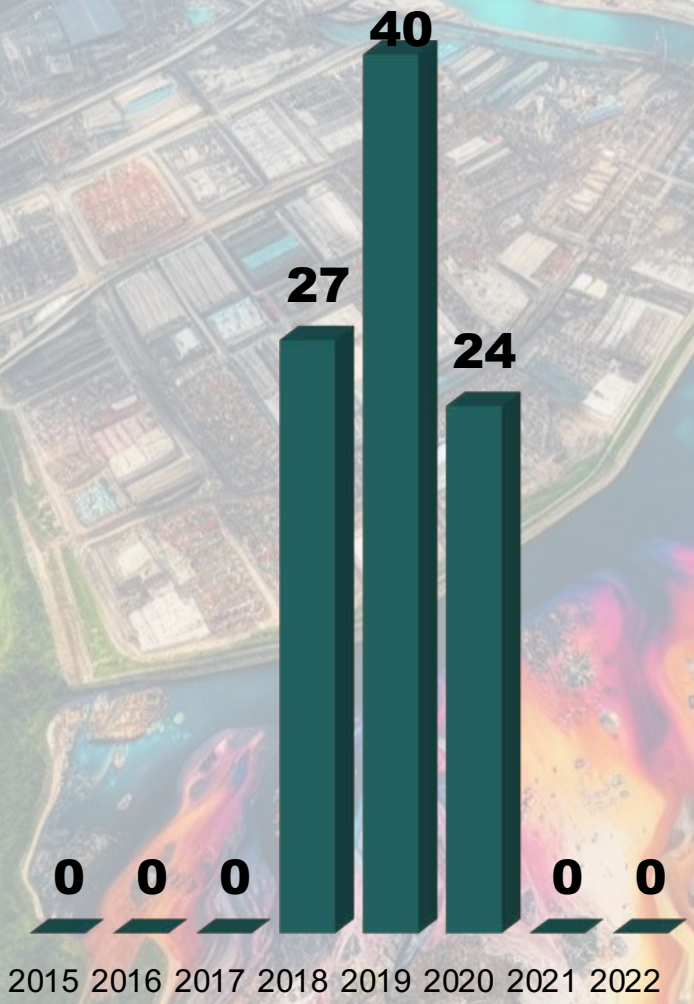

127 Pengawasan Perusahaan

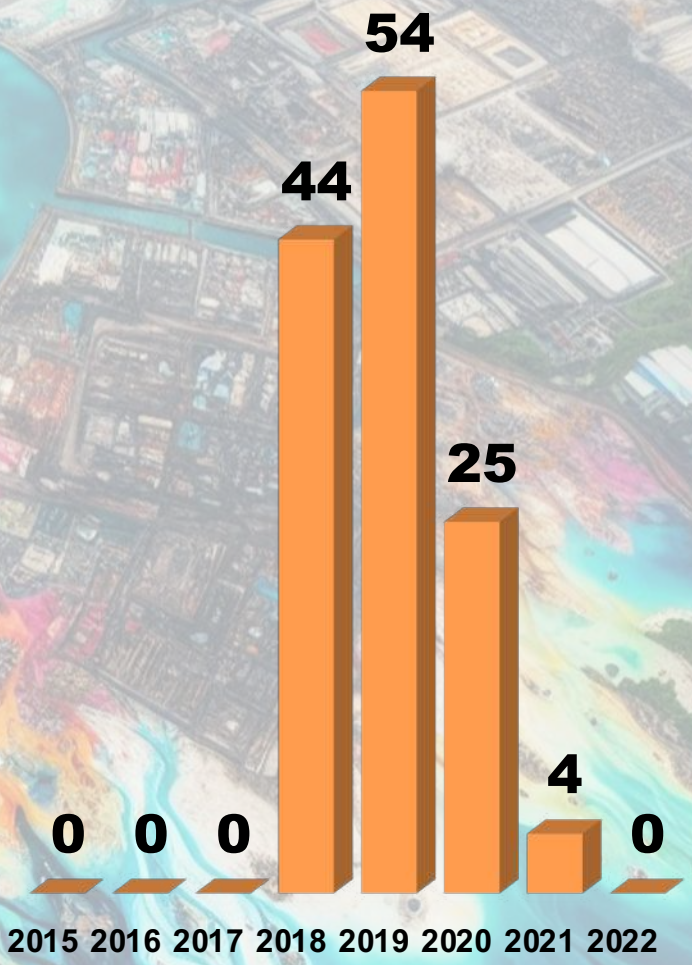

HITACHI

PENUTUP

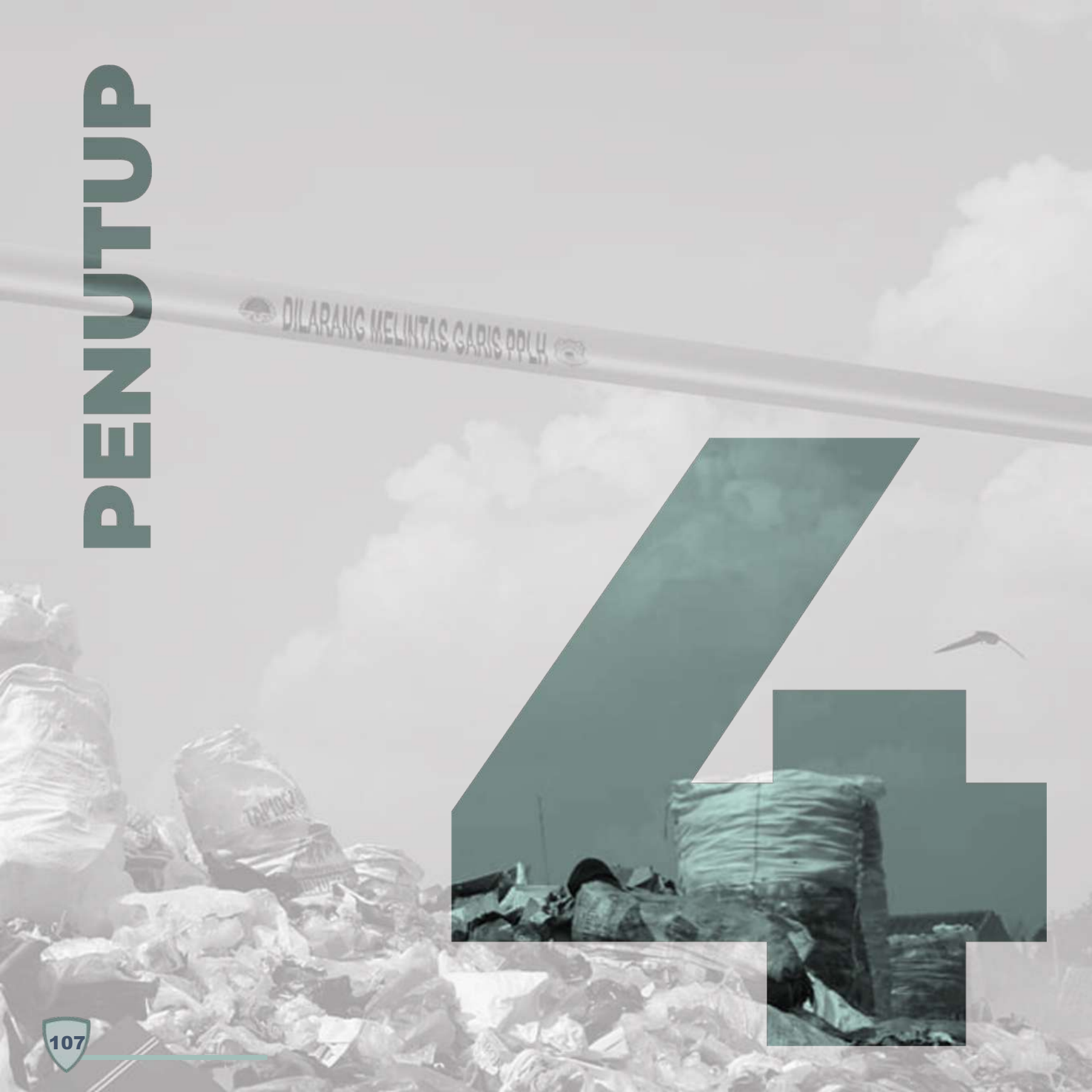

4

PENUTUP

- Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun 2023 adalah sebesar 488,74 M atau 98,59% dari pagu sebesar 495,75 M

- Jumlah Kasus yang ditangani oleh Penegakan Hukum LHK 2015 kasus. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK mendukung IKU 1 IKLH, IKU 4 Penyusutan Hutan, dan IKU 13 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Tingkat efektivitas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2023 termasuk dalam kategori rasio perbandingan = 1, artinya pencapaian kinerja tetap/sama dengan kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya sebesar 1,21. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien terhadap capaian kinerja karena rasio yang dihasilkan lebih dari 1.

- Evaluasi kinerja anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2023 menempati posisi delapan dari 13 unit kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai NKA 91,23

- Dengan perencanaan usaha, dan kegigihan yang tinggi dari seluruh personil Ditjen PHLHK serta kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, seluruh target kinerja Ditjen PHLHK di tahun 2023 dapat tercapai dengan baik.

REKOMENDASI

Ditjen Gakkum LHK terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dalam penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam perjalanannya hal-hal yang masih dapat ditingkatkan baik dalam jangka waktu dekat, menengah ataupun panjang adalah sebagai berikut :

1. **Penguatan Pengawasan:**
   Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan Gakkum LHK melalui teknologi terkini, dan mengimplementasikan sistem pelaporan *real-time* untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat
2. **Kolaborasi dan Kemitraan:**
   - Meningkatkan kerja sama dengan Lembaga terkait, termasuk Kepolisian RI, Kejaksaan, TNI, dan yang lainnya untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
   - Membentuk tim lintas sektoral untuk menangani isu-isu kompleks yang melibatkan berbagai pihak.
3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:**
   - Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan aparat Gakkum LHK dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
   - Perekrutan tenaga ahli dengan keterampilan khusus beserta transfer pengetahuan (*knowledge* transfer) untuk menghadapi tantangan LHK yang berkembang.
4. **Optimasi tata Kelola Internal**:
   - Meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur internal secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan dan perundangan.
   - Memperkuat implementasi mekanisme pengaduan internal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

REKOMENDASI

5. Pemanfaatan Teknologi Digital:

- Penguatan Intellligence Center dengan Imlementasi kecerdasan buatan dan analitika data Tingkat lanjut untuk penganalisaan pola pelanggaran dan prediksi potensi resiko.

6. Kesadaran Publik dan Pendidikan:

- Pada tahun anggaran 2024 Ditjen Gakkum LHK akan menggalakkan gelaran kampanye informasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

7. Perencanaan Jangka Panjang:

- Hasil-hasil kerja dan Analisa data historical penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi data penting untuk background study dan pembahasan kerangka RPJMN 2025-2029.

8. Pengembangan Kerjasama Internasional:

- Ditjen Gakkum LHK perlu terus meningkatkan Kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara yang telah maju dalam penegakan hukum lingkungan serta Lembaga internasional dalam Upaya melawan perdagangan illegal dan pelestarian lingkungan.

9. Pengelolaan Krisis dan Tanggap Darurat:

- Ditjen Gakkum LHK harus meningkatkan dan memperbarui prosedur tanggap darurat yang jelas dan efektif dalam mengatasi insiden yang kritis.

Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat Ditjen Gakkum LHK dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, meningkatkan tata kelola organisasi, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan sejalan dalam kerangka menyongsong Folu Net Sink 2030, dan dukungan penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia secara khususnya dan Global pada umumnya.

FIGHT AGAINST X-CRIME

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM KLHK GAKKUM_KLHK GAKKUMKLHK